



PEMERINTAH
KABUPATEN
GRESIK
TAHUN 2015

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2015



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat ridlo dan hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik dapat selesai sesuai batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (2), bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) bahwa kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum ditetapkan, maka dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini masih didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, bahwa sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB VI : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN BUKU I DAN BUKU II

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD pada dasarnya menginformasikan gambaran kinerja pemerintah daerah secara utuh sepanjang Tahun 2014, berdasarkan tolok ukur kinerja pemerintah daerah sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2011–2015 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2014 yang memuat ruang lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Dalam Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2014 ini, penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2014 ini. Saya berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah di waktu yang akan datang dalam rangka mewujudkan "Gresik Bisa Lebih Baik".

Gresik, Maret 2015

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
A. Dasar Hukum	I-1
1. Dasar Hukum Pembentukan Daerah	I-1
2. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	I-1
B. Gambaran Umum Daerah	I-4
1. Kondisi Geografis Daerah	I-4
2. Gambaran Umum Demografis	I-7
3. Kondisi Ekonomi	I-9
a. Potensi Unggulan Daerah	I-9
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	I-17
 BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH	 II-1
A. Visi, Misi, dan Motto	II-1
B. Strategi Daerah	II-38
C. Arah Kebijakan Daerah	II-40
D. Prioritas Daerah.....	II-45
 BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	 III-1
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	III-4
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	III-4
2. Target dan Realisasi Pendapatan	III-6
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-7
1) Pajak Daerah	III-9

2) Retribusi Daerah	III-11
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	III-13
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	III-15
b. Dana Perimbangan	III-16
1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	III-17
2) Dana Alokasi Umum (DAU)	III-19
3) Dana Alokasi Khusus (DAK)	III-19
c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	III-20
1) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	III-21
2) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	III-22
3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	III-23
3. Permasalahan dan Solusi	III-23
B. Pengelolaan Belanja Daerah	III-24
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III-24
2. Permasalahan dan Solusi	III-28
C. Rencana dan Realisasi Pembiayaan	III-29

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN IV-1

DAERAH

A. Urusan Wajib	IV-1
1. Urusan Pendidikan	IV-2
2. Urusan Kesehatan	IV-7
3. Urusan Pekerjaan Umum	IV-15
4. Urusan Perumahan Rakyat	IV-19
5. Urusan Penataan Ruang	IV-21
6. Urusan Perencanaan Pembangunan	IV-23
7. Urusan Perhubungan	IV-26
8. Urusan Lingkungan Hidup	IV-28

9. Urusan Pertanahan	IV-31
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-32
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-36
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	IV-39
13. Urusan Sosial	IV-41
14. Urusan Ketenagakerjaan.....	IV-45
15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	IV-48
16. Urusan Penanaman Modal	IV-51
17. Urusan Kebudayaan	IV-54
18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	IV-55
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	IV-57
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	IV-63
21. Urusan Ketahanan Pangan	IV-74
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-76
23. Urusan Statistik	IV-81
24. Urusan Kearsipan	IV-82
25. Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-83
26. Urusan Perpustakaan	IV-85
B. Urusan Pilihan	IV-86
1. Urusan Pertanian	IV-86
2. Urusan Kehutanan	IV-91
3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	IV-92
4. Urusan Pariwisata	IV-94
5. Urusan Kelautan dan Perikanan	IV-95
6. Urusan Perdagangan	IV-97
7. Urusan Industri.....	IV-99
C. Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	IV-100
D. Pelaksanaan Bantuan Keuangan	IV-105

E. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik	IV-107
F. Pelaksanaan Bantuan Belanja Tidak Terduga	IV-108
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	V-1
A. Urusan Kelautan dan Perikanan	V-1
B. Urusan Ketenagakerjaan	V-6
C. Urusan Kesehatan	V-8
D. Urusan Pertanian	V-10
E. Urusan Kependudukan	V-15
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	VI-1
A. Kerjasama Antar Daerah	VI-2
1. Kebijakan	VI-2
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI-2
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	VI-4
1. Kebijakan	VI-4
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI-4
C. Pembinaan Batas Wilayah	VI-10
1. Kebijakan	VI-10
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI-10
D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	VI-11
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya	VI-11
a. Bencana Kekeringan	VI-11
b. Bencana Banjir dan Tanah Longsor	VI-13
2. Status Bencana	VI-16
3. Sumber dan Jumlah Anggaran	VI-16
4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana	VI-16
5. Satuan kerja perangkat daerah yang menangani bencana	VI-17
E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	VI-17
1. Gangguan yang terjadi	VI-17
2. SKPD yang menangani ketentraman dan Ketertiban Umum	VI-17

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan	VI-18
4. Sumber dan Jumlah Anggaran	VI-19
5. Penanggulangan dan Kendalanya	VI-19
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan	VI-19
 BAB VII PENUTUP	 VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2014	I-7
Tabel I.2.	Jumlah Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014	I-9
Tabel I.3.	Jumlah Indusri dan Tanda Daftar Industri (TDI) di Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014	I-10
Tabel I.4.	Jumlah SIUP, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014	I-10
Tabel I.5.	Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014	I-11
Tabel I.6.	Populasi Ternak dan Produksi hasil Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014	I-11
Tabel I.7.	Produksi Perikanan di Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014	I-12
Tabel I.8.	Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014	I-13
Tabel I.9.	PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014	I-18
Tabel I.10.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014	I-20
Tabel II.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015	II-3
Tabel II.2	Misi dan Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015	II-40
Tabel II.3	Penjelasan Program Kabupaten Gresik Tahun 2014	II-46
Tabel III.1	Komposisi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-6
Tabel III.2	Perincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-8
Tabel III.3	Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-10
Tabel III.4	Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-12
Tabel III.5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-14

Tabel III.6	Perincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-15
Tabel III.7	Rincian Dana Perimbangan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-17
Tabel III.8	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-18
Tabel III.9	Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-19
Tabel III.10	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-20
Tabel III.11	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-21
Tabel III.12	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-22
Tabel III.13	Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-25
Tabel III.14	Perincian Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-25
Tabel III.15	Perincian Belanja Langsung Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-28
Tabel III.16	Komposisi Pembiayaan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-30
Tabel III.17	Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-31
Tabel VI.1	Daftar Desa Yang Ditetapkan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan Katagori Kering Kritis* Di Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2014	IV-11
Tabel VI.2	Kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Gresik Tahun 2014	IV-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Administrasi Kabupaten Gresik	I-5
Gambar I.2	Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur	I-6
Gambar I.3	Peta Demografi Kabupaten Gresik	I-8
Gambar I.4	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013-2014	I-17
Gambar I.5	Grafik Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014	I-18
Gambar III.1	Struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-3
Gambar III.2	Komponen APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-4
Gambar III.3	Grafik Persentase Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-7
Gambar III.4	Grafik Persentase Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-9
Gambar III.5	Grafik Capaian Target Hasil Perusahaan Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-14
Gambar III.6	Komponen Dana Perimbangan	III-16
Gambar III.7	Grafik Capaian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-26
Gambar III.8	Grafik Capaian Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum Pembentukan Daerah

Pemerintah Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya.

2. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011–2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2012;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2013;
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2014;
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

B. Gambaran Umum Daerah

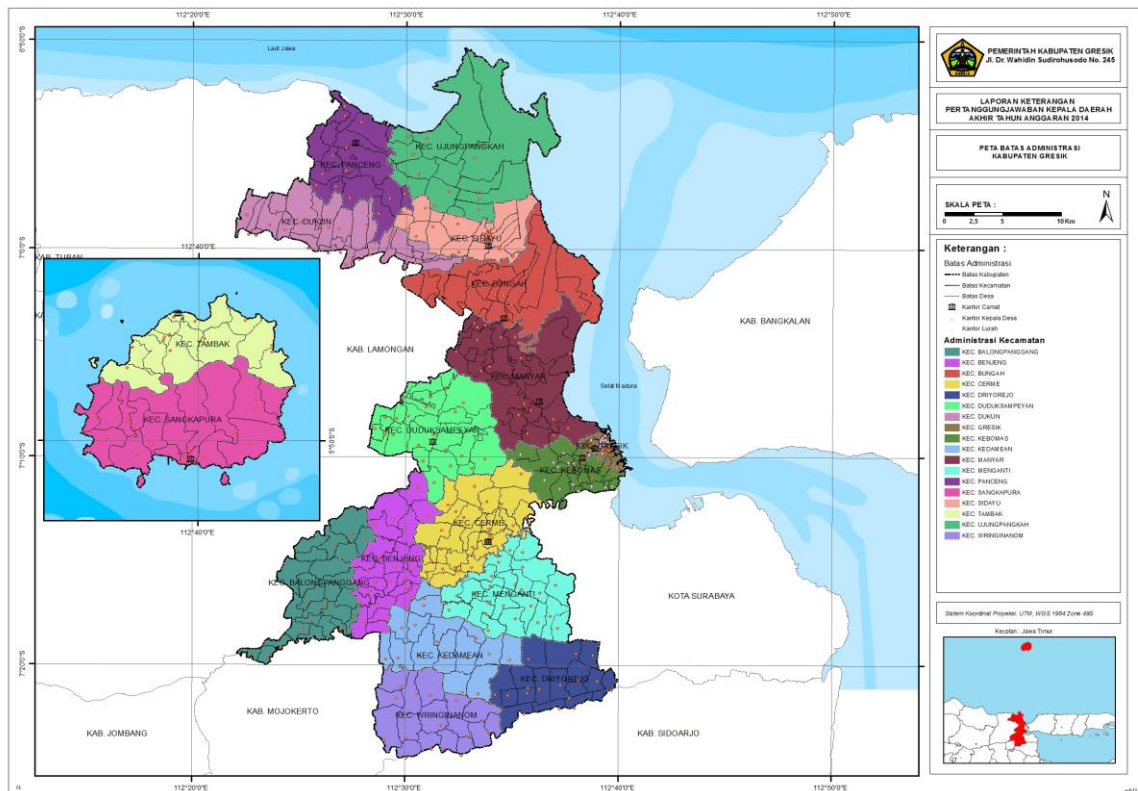
1. Kondisi Geografis Daerah

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan yang terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean.

Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Peta administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:

Peta Administrasi Kabupaten Gresik

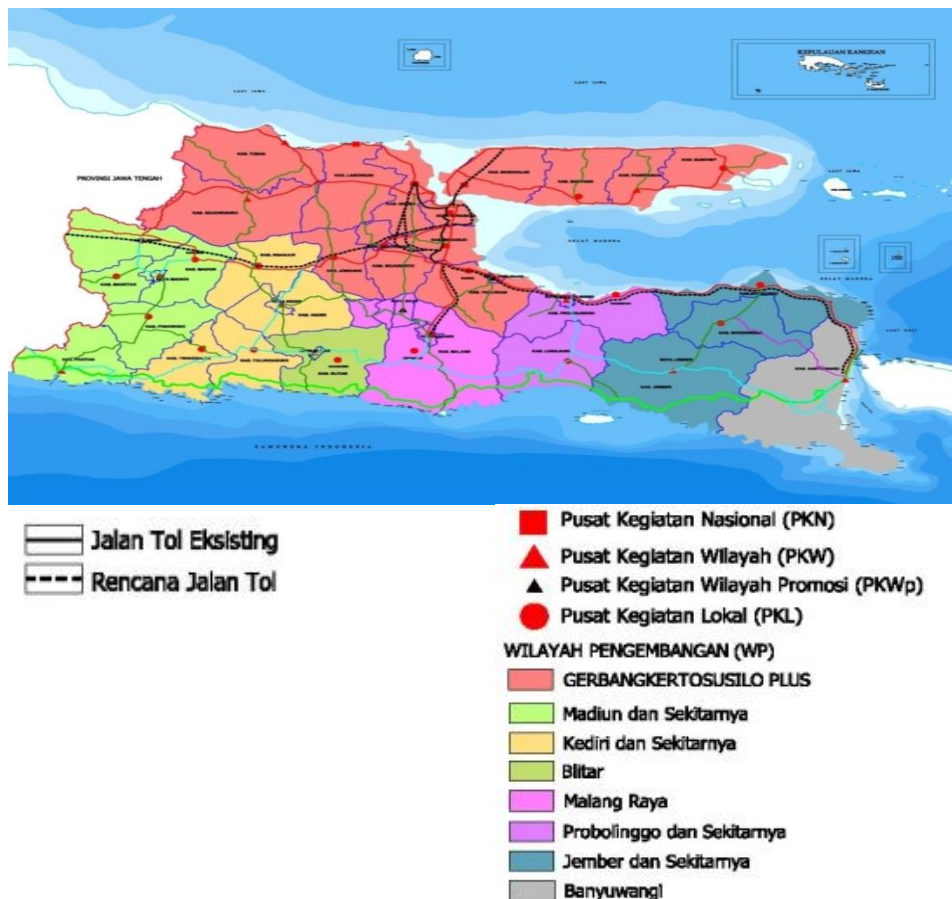


Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Gresik Tahun 2014

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan).

Berikut ini gambar yang menunjukkan posisi strategis Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur:

Gambar I.2
Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur



Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kab. Gresik Tahun 2014

Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) dengan sektor unggulan industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah yang ada disekitarnya.

2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2014 sebanyak 1.319.314 jiwa yang terdiri dari 664.288 laki-laki dan 655.026 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2014 sebesar 1.107 jiwa/Km². Sedangkan angka rasio jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2014 sebesar 101,41%. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

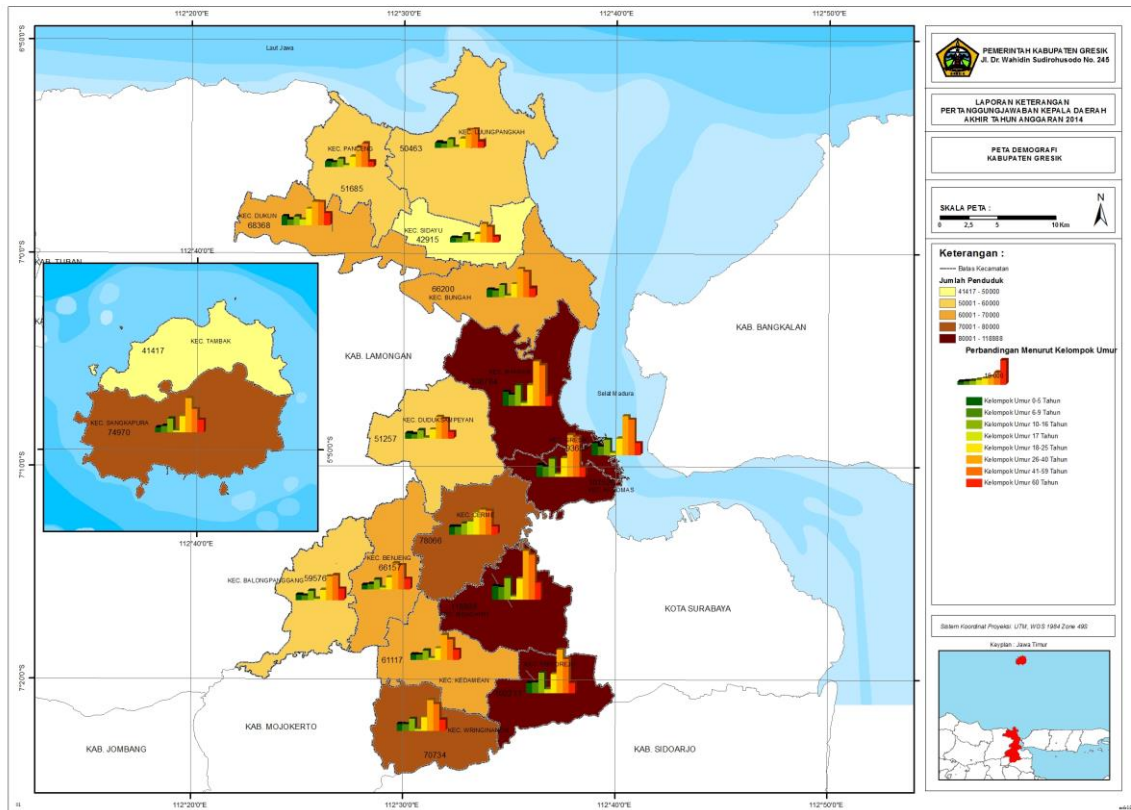
Tabel I.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik
Tahun 2014

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	LUAS WILAYAH Area (Km ²)	PENDUDUK TH. 2014		
				L	P	L+P
1	DUKUN	26	59,03	34680	34025	68.705
2	BALONGPANGGANG	25	63,88	29430	29560	58.990
3	PANCENG	14	62,59	26477	26075	52.552
4	BENJENG	23	61,26	33196	33045	66.241
5	DUDUKSAMPEYAN	23	74,29	25752	25794	51.546
6	WRINGINANOM	16	62,62	36355	35818	72.173
7	UJUNGPAKKAH	13	94,82	25636	25430	51.066
8	KEDAMEAN	15	65,96	31453	31113	62.566
9	SIDAYU	21	47,13	22052	21705	43.757
10	MANYAR	23	95,42	56434	54607	111.041
11	CERME	25	71,73	39463	39457	78.920
12	BUNGAH	22	79,49	33926	33501	67.427
13	MENGANTI	22	68,71	61223	60043	121.266
14	KEBOMAS	21	30,06	52522	51133	103.655
15	DRIYOREJO	16	51,30	52252	51371	103.623
16	GRESIK	21	5,54	45734	45390	91.124
17	SANGKAPURA	17	118,72	36941	36749	73.690
18	TAMBAK	13	78,70	20762	20210	40.972
JUMLAH		356	1.191,25	664.288	655.026	1.319.314

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik Tahun 2015

Gambaran kepadatan dan sebaran penduduk dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.3
Peta Demografi Kabupaten Gresik



Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Gresik Tahun 2015

Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2014 sebanyak 370.363 keluarga, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 364.104 keluarga sehingga dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi kenaikan jumlah keluarga sebanyak 6.259 Keluarga atau 1,72%. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.2.
Jumlah Keluarga di Kabupaten Gresik
Tahun 2013-2014

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH KK	
			2013	2014
1	DUKUN	26	18.790	19.077
2	BALONGPANGGANG	25	17.494	17.596
3	PANCENG	14	13.955	14.250
4	BENJENG	23	19.231	19.384
5	DUDUKSAMPEYAN	23	13.997	14.171
6	WRINGINANOM	16	22.013	22.415
7	UJUNGPAKKAH	13	13.751	13.987
8	KEDAMEAN	15	18.962	19.077
9	SIDAYU	21	11.216	11.476
10	MANYAR	23	29.187	29.958
11	CERME	25	21.054	21.460
12	BUNGAH	22	17.900	18.348
13	MENGANTI	22	34.148	34.862
14	KEBOMAS	21	27.755	28.603
15	DRIYOREJO	16	29.220	29.796
16	GRESIK	21	25.449	25.578
17	SANGKAPURA	17	19.593	19.643
18	TAMBAK	13	10.659	10.682
JUMLAH		356	364.374	370.363

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik Tahun 2015

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Perkembangan potensi unggulan Kabupaten Gresik pada tahun 2014 antara lain:

- 1) Dalam Bidang Perindustrian pada tahun 2014 jumlah industri sebanyak 6.525 industri, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 6.451 industri sehingga dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi kenaikan jumlah industri sebanyak 74 industri. Perkembangan industri dilihat dari penerbitan tanda daftar industri (TDI) juga meningkat sebanyak 5 tanda daftar industri, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.3.
Jumlah Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI)
di Kabupaten Gresik
Tahun 2013-2014

No.	Uraian	Satuan	2013	2014
1	Industri	Unit	6.451	6.525
2	Tanda Daftar Industri (TDI)	Unit	25	30

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik Tahun 2015

- 2) Dalam Bidang Perdagangan di Kabupaten Gresik Tahun 2014, penerbitan SIUP pada tahun 2014 sebanyak 1.248 SIUP sedangkan tahun 2013 sebanyak 1.166 SIUP sehingga dari tahun 2013 ke tahun 2014 penerbitan SIUP mengalami peningkatan sebanyak 82 SIUP, sedangkan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 sebanyak 11.131 orang dengan nilai pertumbuhan investasi sebesar Rp4.618.392.400,00 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.4.
Jumlah SIUP, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja
di Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014

No.	Uraian	Satuan	2013	2014
1	Surat Izin Usaha Perdagangan	SIUP	1.166	1.248
-	SIUP Perusahaan Mikro	SIUP	178	186
-	SIUP Perusahaan Kecil	SIUP	799	858
-	SIUP Perusahaan Menengah	SIUP	170	193
-	SIUP Perusahaan Besar	SIUP	19	11
2	Investasi			
	Nilai Investasi	Rp.	2.318.129.600,00	6.936.522.000,00
	Investasi Tahun Lalu	Rp.	907.559.000,00	2.318.129.600,00
	Pertumbuhan Investasi	Rp.	1.410.570.600,00	4.618.392.400,00
3	Penyerapan tenaga kerja	Orang	12.253	11.131

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik Tahun 2015

- 3) Dalam bidang pertanian di Kabupaten Gresik tahun 2014, total produksi pertanian sebanyak 553.633 ton sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 537.730

ton sehingga dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan produksi pertanian sebanyak 15.903 ton seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.5.
Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik
Tahun 2013-2014

No.	Uraian	Satuan	2013	2014
1	Padi	Ton	376.535	395.594
2	Jagung	Ton	135.287	131.767
3	Kedelai	Ton	1.368	1.952
4	Kacang Tanah	Ton	5.029	3.451
5	Kacang Hijau	Ton	2.792	2.911
6	Ubi kayu	Ton	13.526	14.854
7	Ubi Jalar	Ton	3.193	3.104
	JUMLAH	Ton	537.730	553.633

Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Gresik Tahun 2015

- 4) Dalam bidang peternakan, jumlah populasi ternak di Kabupaten Gresik pada tahun 2014 sebanyak 7.538.593 ekor sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 3.568.270 ekor sehingga dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 3.970.323 Ekor, selain itu produksi hasil ternak juga mengalami kenaikan sebesar 81,05 ton. Adapun jumlah populasi ternak dan produksi hasil ternak secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.6.
Populasi Ternak dan Produksi hasil Ternak
di Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014

No.	Uraian	Satuan	2013	2014
1	Populasi ternak	Ekor	3.568.270	7.538.593
	terdiri dari:			
-	Sapi	Ekor	44.703	47.697
-	Kerbau	Ekor	198	198
-	Kuda	Ekor	236	215
-	Kambing	Ekor	65.270	66.357
-	Domba	Ekor	30.396	30.898

No.	Uraian	Satuan	2013	2014
-	Ayam ras petelur	Ekor	134.700	140.000
-	Ayam bukan ras	Ekor	647.762	663.830
-	Ayam ras pedaging	Ekor	2.603.500	6.532.000
-	Itik	Ekor	28.120	27.920
-	Entok dan angsa	Ekor	13.385	29.478
2	Produksi hasil ternak	Ton	13.491,51	13.572,56
-	Terdiri dari:			
-	Telur	Ton	2.725,26	2.754,96
-	Susu	Ton	306,14	315,00
-	Daging	Ton	10.460,11	10.510,16

Sumber data : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun 2015

- 5) Dalam bidang perikanan, produksi bidang perikanan di Kabupaten Gresik pada tahun 2014 untuk produksi perikanan budidaya sebanyak 78.010,06 ton, penangkapan sebanyak 17.379,23 ton, dan untuk perairan umum sebanyak 916,75 ton. Produktivitas lahan tambak payau sebanyak 277,96 ton, dan tawar sebanyak 321,60 ton. Adapun jumlah produksi perikanan, produktivitas, jumlah kapal dan areal budi daya perikanan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.7.
Produksi Perikanan, Produktivitas Jumlah Kapal Dan Areal
Budidaya Perikanan di Kabupaten Gresik
Tahun 2013-2014

No.	Uraian	Satuan	2013	2014
1	Produksi perikanan	Ton	103.519,98	97.222,79
a.	Budi Daya :	Ton	83.414,45	78.010,06
	- Udang Windu	Ton	4.005,80	3.375,70
	- Udang Vanamae	Ton	7.160,62	6.237,08
	- Bandeng	Ton	68.811,44	65.975,68
	- Kerapu	Ton	12,00	66,71
	- Nila	Ton	3.424,59	2.354,89
b.	Penangkapan	Ton	18.380,99	17.379,23
c.	Perairan Umum	Ton	862,27	916,75
2	Produktivitas Lahan Tambak		560,04	599,56
	- Payau	Ton/Ha	258,82	277,96
	- Tawar	Ton/Ha	301,22	321,60

No.	Uraian	Satuan	2013	2014
3	Jumlah perahu/kapal penangkap ikan	Unit	4.533	4.519
4	Areal Budidaya	Ha	31.964,07	32.065,02
	- Tambak payau	Ha	17.335,02	17.335,02
	- Tambak tawar/kolam	Ha	14.629,05	14.730,00

Sumber data : Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun 2015

- 6) Investasi daerah di Kabupaten Gresik pada tahun 2013 berdasarkan realisasi persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp2.989.426.800.000 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp8.009.042.000.000 atau naik 267,91%, sedangkan realisasi persetujuan Penanaman Modal Asing pada tahun 2013 sebesar US\$ 79.299.800 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar US\$ 250.584.400 atau meningkat 271,62%.

Adapun jumlah investasi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.8.
Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik
Tahun 2013-2014

No.	Uraian	Satuan	2013	2014	Pertumbuhan
1	Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri	Juta Rupiah	15.445.440,6	17.158.985,2	111,09
2	Persetujuan Penanaman Modal Asing	US\$	83.364.700	250.584.400	300,59
3	Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri	Juta Rupiah	2.989.426,80	8.009.042,00	267,91
4	Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Asing	US\$	79.299.800	215.390.800	271,62

Sumber data : Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik Tahun 2015

Keberhasilan dalam peningkatan investasi tersebut karena :

- Tersedianya regulasi investasi
- Ketersediaan infrastruktur pendukung investasi daerah

- Meningkatnya jumlah pemohon izin
- Ketersediaan lahan bagi penanam modal di wilayah Kabupaten Gresik
- Iklim investasi yang kondusif

7) Potensi Kepelabuhanan

Kabupaten Gresik memiliki wilayah pesisir pantai yang potensial untuk kegiatan kepelabuhanan. Keberadaan pelabuhan di Kabupaten Gresik cukup penting untuk mendukung akses bahan baku dan pemasaran produk industri yang telah berkembang di Kabupaten Gresik. Di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Kebomas, Gresik, dan Manyar terdapat 1 (satu) pelabuhan umum yaitu Pelabuhan Nyi Ageng Pinatih yang dikelola oleh PT. Pelindo III Cabang Gresik dan 8 (delapan) terminal khusus yang dikelola oleh Perusahaan Swasta/BUMN untuk kepentingan sendiri dan melayani umum dalam kondisi tertentu. Adapun 8 (delapan) terminal khusus tersebut yaitu:

1. Terminal Khusus PT. Sumbermas Indah Playwood
2. Terminal Khusus PT. Wilmar Nabati
3. Terminal Khusus PT. Semen Gresik
4. Terminal Khusus PT. PLN PJB 2 Gresik
5. Terminal Khusus PT. Pertamina
6. Terminal Khusus PT. Petrokimia Gresik
7. Terminal Khusus PT. Smelthing
8. Terminal Khusus PT. Maspion

Pemerintah Kabupaten Gresik juga menggagas pembangunan Pelabuhan Internasional Kalimireng di Kecamatan Manyar yang pembangunannya sudah dilaksanakan mulai tahun 2014 oleh PT. BJTI (Berlian Jasa Terminal Indonesia) dan PT. AKR (Aneka Kimia Raya).

8) Potensi Wisata

Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten di Wilayah Propinsi Jawa Timur yang memiliki Potensi pariwisata yang cukup beragam diantaranya: Wisata Alam, Peninggalan Sejarah, Wisata Seni dan Budaya. Beragamnya wisata ini merupakan modal yang potensial bagi usaha pengembangan

kepariwisataan di Kabupaten Gresik. Potensi kepariwisataan perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya.

Adapun obyek wisata tersebut antara lain:

A. Wisata Alam

- Danau Kastoba (Kec. Tambak)
- Air Panas Kebondaya (Kec. Sangkapura)
- Telaga Ngipik/ Giri Wana Tirta (Kec. Kebomas)
- Bukit Surowiti (Kec. Panceng)
- Penangkaran Rusa Bawean (Kec. Sangkapura)
- Pantai Pulau Cina (Kec. Sangkapura)
- Air Terjun Patar Selamat (Kec. Sangkapura)
- Air Terjun Udhuk-udhuk (Kec. Tambak)
- Pantai Labuhan (Kec. Tambak)
- Pantai Nyimas (Kec. Sangkapura)
- Pantai Hutan Lindung (Kec. Sangkapura)
- Pantai Tinggen (Kec. Sangkapura)
- Pantai Dalegan (Kec. Panceng)
- Pulau Noko dan Pulau Gili (Kec. Sangkapura)
- Kawasan Pantai Selayar (Kec. Sangkapura)
- Air Terjun Laccar (Kec. Tambak)



Danau Kastoba



Pulau Noko

B. Wisata Budaya/Religi

- Makam Maulana Malik Ibrahim (Kec. Gresik)
- Makam Sunan Giri (Kec. Kebomas)
- Makam Pusponegoro (Kec. Gresik)
- Makam Raden Santri (Kec. Gresik)
- Makam Nyai Ageng Pinatih (Kec. Gresik)
- Makam Sunan Prapen (Kec. Kebomas)
- Makam Siti Fatimah Binti Maimun (Kec. Manyar)
- Makam Kanjeng Sepuh (Kec. Sidayu)



Makam Maulana Malik Ibrahim



Makam Sunan Giri

C. Wisata Minat Khusus

- Kampung Kemasan (Kec. Gresik)
- Kampung Adenium (Kec. Kedamean)
- Sentra Industri Songkok dan Rebana
- Benteng Lodewijk (Kec. Bungah)
- Sentra Makanan Khas Gresik



Kampung Adenium



Benteng Lodewijk

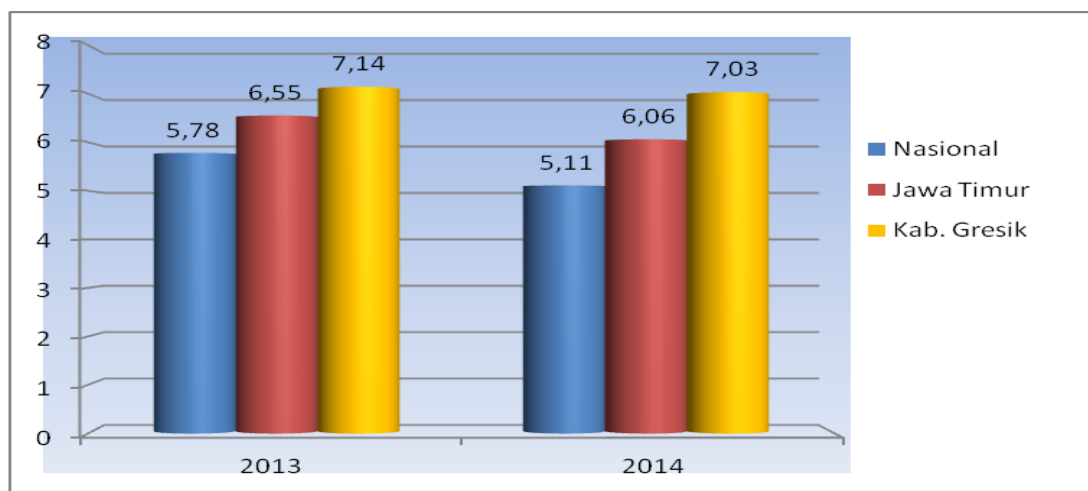


Kampung Kemasan

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2013 sebesar 7,14% dan tahun 2014 sebesar 7,03%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 6,55% dan pada tahun 2014 sebesar 6,06%, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik masih lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur, adapun secara rinci pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada grafik berikut:

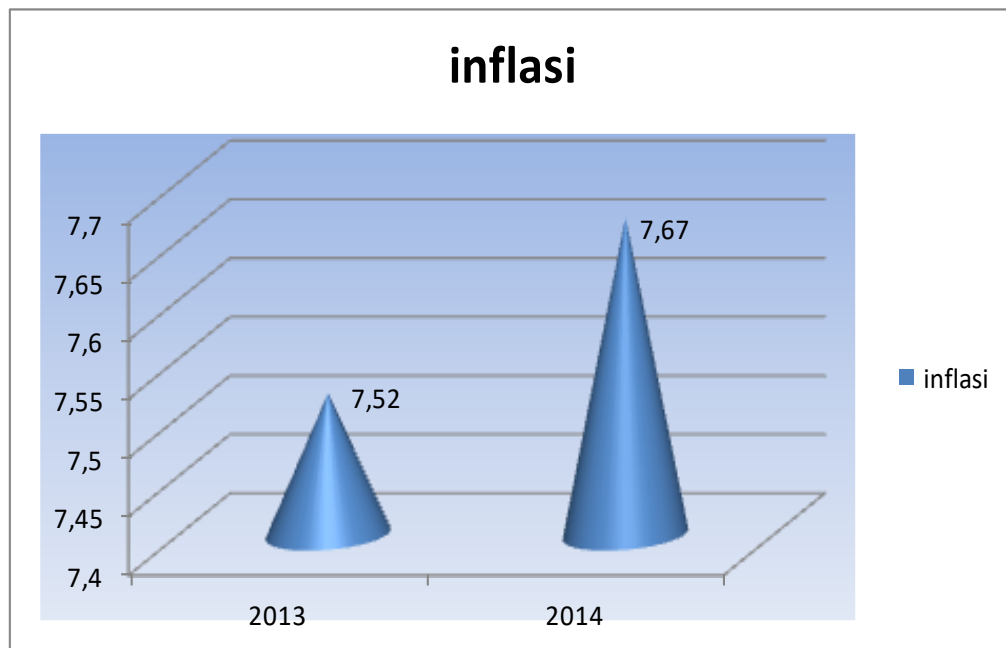
Gambar I.4
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kab. Gresik, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2013-2014



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik dan Provinsi Jatim Tahun 2014

Tingkat inflasi Kabupaten Gresik pada tahun 2014 sebesar 7,67% lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 7,52%. Salah satu penyebab kenaikan inflasi pada tahun 2014 di Kabupaten Gresik yakni adanya kenaikan harga BBM secara nasional. Adapun secara rinci inflasi di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar I.5
Grafik Inflasi Kab. Gresik
Tahun 2013-2014



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kab. Gresik Tahun 2014

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2013 sebesar Rp57.264.224.400.000,00, kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp65.609.306.730.000,00. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada tahun 2013 sebesar Rp20.811.653.460.000,00, kemudian pada Tahun 2014 meningkat menjadi Rp22.274.018.910.000,00. Adapun secara rinci PDRB Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.9.
PDRB Kabupaten Gresik
Tahun 2013-2014

NO.	SEKTOR / SUB SEKTOR	SATUAN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000	
			2013**	2014***	2013**	2014***
1	Pertanian	Juta Rupiah	4.954.428,37	5.534.072,96	1.562.702,69	1.605.677,02
2	Pertambangan dan Penggalan	Juta Rupiah	2.182.396,84	2.332.537,82	962.710,15	972.626,07

NO.	SEKTOR / SUB SEKTOR	SATUAN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000	
			2013**	2014***	2013**	2014***
3.	Industri Pengolahan	Juta Rupiah	28.601.067,03	32.598.492,87	10.260.563,20	10.976.750,51
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	Juta Rupiah	910.176,55	1.068.609,12	441.750,23	483.539,80
5.	Konstruksi	Juta Rupiah	744.848,83	869.309,33	274.068,68	300.680,75
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Juta Rupiah	13.750.450,59	16.231.409,88	4.853.190,55	5.308.905,14
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	Juta Rupiah	1.740.624,67	1.986.774,12	699.118,63	746.798,52
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Juta Rupiah	1.684.277,83	1.913.319,13	751.112,03	804.065,43
9.	Jasa-Jasa	Juta Rupiah	2.695.953,70	3.074.781,51	1.006.437,28	1.074.975,66
	Jumlah	Juta Rupiah	57.264.224,40	65.609.306,73	20.811.653,46	22.274.018,91

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kab. Gresik Tahun 2014

Catatan:

** Angka Sementara

*** Angka Sangat Sementara

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2013 didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 49,95%, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 24,01%, dan Sektor Pertanian sebesar 8,65%. Demikian pula pada tahun 2014 masih didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 49,69%, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 24,74%, dan Sektor Pertanian sebesar 8,43%. Sehingga secara ekonomi Kabupaten Gresik adalah daerah Industri dan Perdagangan yang didukung oleh sektor Pertanian. Adapun secara rinci Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.10.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gresik
Tahun 2013-2014

NO.	SEKTOR / SUB SEKTOR	SATUAN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000	
			2013**	2014***	2013**	2014***
1	Pertanian	%	8,65	8,43	7,51	7,21
2	Pertambangan dan Penggalan	%	3,81	3,56	4,63	4,37
3.	Industri Pengolahan	%	49,95	49,69	49,30	49,28
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	%	1,59	1,63	2,12	2,17
5.	Konstruksi	%	1,30	1,32	1,32	1,35
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	%	24,01	24,74	23,32	23,83
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	%	3,04	3,03	3,36	3,35
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	%	2,94	2,92	3,61	3,61
9.	Jasa-Jasa	%	4,71	4,69	4,84	4,83

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kab. Gresik Tahun 2014

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah pada hakekatnya ditujukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan oleh dan untuk masyarakat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, semua aspirasi dan segala kepentingan daerah yang tumbuh dari masyarakat harus diarahkan untuk menjaga keserasian dan keselarasan antara Pembangunan Daerah, Pembangunan Regional dan Pembangunan Nasional.

Dalam upaya menjaga keserasian dan keselarasan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, yang kemudian telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (RPJMD) 2011–2015.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015 antara lain Visi, Misi, Motto, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Daerah sebagai berikut.

A. Visi, Misi, dan Motto

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah:

Visi : "Gresik yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan Yang Berkualitas".

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu:

1. **GRESIK** : adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.
2. **AGAMIS** adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya.
3. **ADIL** adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.
4. **MAKMUR** adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya.
5. **BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS** adalah hidup yang sehat dengan berlatarbelakang pendidikan yang sesuai jaman serta pemenuhan pendapatan yang memadai.

Dalam mencapai Visi tersebut juga dijunjung motto "Gresik Bisa Lebih Baik". Sebagai penjabaran visi termaksud, telah ditetapkan 4 (empat) Misi Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 yang merupakan rumusan-rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Misi : 1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri.

2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2015

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
1.	Misi 1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati yang dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri, ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun sebagai berikut: - Meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun, saling menghormati dan demokratis Perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati merupakan harapan setiap warga masyarakat. Kondisi ini selain akan menciptakan kesejahteraan batin bagi masyarakat, juga akan menjadi pendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Sehingga pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengamalan nilai-nilai agama dan moral menjadi sangat penting. Pentingnya pemahaman tentang kehidupan yang sejuk, santun dan saling menghormati harus senantiasa diberikan kepada masyarakat. Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang tergabung dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	urusan kepemudaan dan olahraga, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan kebudayaan dan urusan social Untuk mencapai tujuan Meningkatkan perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati ditetapkan sasaran sebagai berikut: 1) Meningkatkan aktivitas keagamaan Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengamalan nilai-nilai agama dan moral serta kesetiakawanan sosial sangat penting, karena dapat menciptakan kesejahteraan batin bagi masyarakat, dan menjadi pendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Jumlah hari besar yang dirayakan pada tahun 2014 ditargetkan 5 kegiatan; b) Persentase realisasi bantuan sarana ibadah pada tahun 2014 ditargetkan 90%. 2) Meningkatkan suasana yang sejuk, santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Meningkatkan suasana kehidupan yang sejuk, santun dan saling menghormati merupakan harapan seluruh masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten akan melakukan upaya sosialisasi dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang kesatuan bangsa dan kerukunan kehidupan beragama. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	a) Jumlah Parpol yang dibina pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 11 parpol; b) Jumlah LSM/Ormas/OKP yang dibina pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 164 LSM Ormas/OKP; c) Persentase konflik yang dapat diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%. 3) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) Peraturan daerah sebagai produk hukum daerah yang mengatur kehidupan masyarakat pada lingkup kabupaten memerlukan pengawalan dan upaya penegakan agar dapat berfungsi secara efektif. Penegakan hukum tersebut melalui sosialisasi dan operasi oleh satuan kerja terkait. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan Perda di Kab. Gresik pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 70%; b) Persentase demo/protes terhadap Perda/Perbub yang dilaksanakan secara tertib pada tahun 2014 ditargetkan 98,00%; c) Keberadaan Perda tentang penyelenggaraan Trantibum pada tahun 2014 ditargetkan ada; d) Keberadaan Perda tentang PSK dan Miras pada tahun 2014 ditargetkan ada; e) Rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk pada tahun 2014 ditargetkan 0,05% per 10.000 penduduk.

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	4) Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan Pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kampanye terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan melalui pemberdayaan perempuan. Perempuan seharusnya bukan hanya sebagai obyek pembangunan tetapi dapat lebih aktif menjadi subyek pembangunan. Perempuan harus dipacu kemampuannya agar terwujud kesetaraan gender di setiap bidang kehidupan dengan tetap menjaga martabat dan kehormatannya. Perlindungan lainnya dilakukan terhadap permasalahan tenaga kerja perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kemungkinan adanya kasus Perdagangan (<i>human trafficking</i>) terhadap perempuan dan anak. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; b) Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 94,00%; c) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	d) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan Rumah Sakit pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; e) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 89,00%; f) Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 40,00%. 5) Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah Untuk menjaga kekayaan seni dan budaya daerah harus ada upaya untuk melestarikan keberadaannya melalui pelaksanaan even budaya dan pemeliharaan cagar budaya. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 8 kegiatan; b) Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang tersedia Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 8 unit; c) Persentase peninggalan/Cagar Budaya (Situs) yang dilestarikan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 36,36%;
2.	Misi 2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut: - Terwujudnya pelayanan publik yang adil dan merata Peran utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanannya pemerintah

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	kabupaten harus berupaya memberikan yang terbaik, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan filosofi keberadaan pemerintah sebagai pelayan masyarakat sekaligus bentuk komitmen dari setiap kepala daerah yang berjanji akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap warganya. Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang tergabung dalam urusan Perdagangan, urusan perindustrian, urusan koperasi dan UKM, urusan penanaman modal, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan perikanan dan kelautan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan ketenagakerjaan, urusan pariwisata, urusan pekerjaan umum dan urusan energi dan sumber daya mineral Untuk mencapai tujuan Terwujudnya pelayanan publik yang adil dan merata ditetapkan sasaran sebagai berikut: 1) Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan kepada golongan masyarakat miskin ekonomi lemah melalui lembaga kemasyarakatan desa berupa PKK dan Posyandu yang ada di masyarakat. Masyarakat dibimbing dan dibantu agar mampu mandiri secara ekonomi dan diberikan ketrampilan dan pelayanan dasar kesehatan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Persentase PKK aktif pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 84,41%; b) Persentase Posyandu Aktif pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 98,95%; c) Persentase keluarga miskin pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 19,67%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	2) Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial Pelayanan sosial oleh Pemerintah Kabupaten terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilaksanakan melalui pemberian bantuan dan pelatihan untuk meningkatkan kemandirian secara ekonomi sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah PMKS yang ada. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang tersedia pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 19 unit; b) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2014 ditargetkan 435 PMKS; c) Jumlah PMKS pada tahun 2014 diestimasi sebanyak 67.352 jiwa; d) Persentase realisasi bantuan santunan kematian pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; e) Penyaluran Raskin ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 100%. 3) Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman Sarana permukiman yang sehat dan layak merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya melalui program dan bantuan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 75,00%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	b) Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 14,00%; c) Persentase Rumah Layak Huni pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 91,00%; 4) Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian hukum Produk hukum daerah yang dihasilkan, baik yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten atau lembaga legislatif harus mampu dijaga kualitasnya. Produk hukum yang baik harus dapat diaplikasikan di masyarakat sehingga efektivitasnya dapat diandalkan. Sedangkan untuk kepastian hukum diharapkan semua permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga harus ada upaya hukum yang jelas pada setiap masalah hukum yang dihadapi. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Jumlah Perda yang ditetapkan tahun 2011-2014 ditargetkan sebanyak 40 Perda; b) Jumlah Perda yang dibatalkan pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 0 Perda; c) Persentase Kasus hukum yang diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 80%; d) Persentase Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti/dilaksanakan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; e) Persentase Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 100%.

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	5) Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Guna memperoleh kepastian atas kesuksesan pembangunan daerah, pengawasan merupakan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan bukan hanya bersifat penindakan (represif) tetapi juga bersifat pencegahan (preventif), sehingga diharapkan dapat terwujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan akuntabilitas tersebut dapat diukur tingkat keberhasilan kinerja dari setiap instansi pemerintahan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; b) Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi pada tahun 2014 ditargetkan 100%; c) Persentase informasi pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; 6) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, harus dapat diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilan kinerjanya. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Jumlah konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 34 kali; b) Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD) pada tahun 2014 ditargetkan baik;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	7) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik pula, sehingga seiring dengan standarisasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 maka pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan akurasi dan kecepatan pengolahan datanya. Produk akhir pengelolaan keuangan daerah adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan harus selesai selambat lambatnya akhir Maret tahun berikutnya. Selain itu Pengelolaan aset daerah adalah bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban pengelolaan aset daerah ini sehingga pemanfaatannya dapat lebih maksimal. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Opini laporan keuangan Pada tahun 2014 ditargetkan (Wajar Tanpa Pengecualian) WTP; b) Laporan keuangan yang disusun pada tahun 2014 ditargetkan tepat waktu; c) Penetapan APBD pada tahun 2014 ditetapkan tepat waktu; d) Keberadaan PERDA tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2014 ditetapkan ada;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	e) Persentase peningkatan PAD pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 27,49%; f) Rasio keberadaan kemandirian daerah pada tahun 2014 ditargetkan 24,84%; g) Jumlah Perusahaan Daerah dalam kondisi sehat pada tahun 2014 ditargetkan 2 buah; h) Persentase Aset (Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan) Pada tahun 2014 ditargetkan 95,95%; 8) Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan Melalui sekretariat DPRD, Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan layanan atas kebutuhan administrasi dan keuangan lembaga legislatif. Sehingga diharapkan legislatif sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dapat berfungsi secara maksimal khususnya dalam hal penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang berfihak kepada kepentingan publik serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Pelaksanaan voting yang dilakukan dalam sidang paripurna pada tahun 2014 ditargetkan 0%; b) Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembahasan ranPerda pada tahun 2014 ditargetkan 100%; c) Jumlah Perda inisiatif DPRD tahun 2011-2014 ditargetkan sebesar 18 Perda;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	9) Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional Jumlah SDM yang besar memerlukan pengelolaan yang baik sehingga akan terwujud sinergi yang positif serta menghasilkan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan tersebut meliputi penetapan ketrampilan, keahlian, kesejahteraan sampai dengan sistem karir yang transparan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; b) Rasio jabatan yang terisi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; c) Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; d) Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; e) Kesesuaian SOTK SKPD dengan Pedoman/Peraturan tentang SOTK pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; f) Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan pada tahun 2014 ditargetkan 80%; 10) Meningkatnya kerjasama Daerah Kerjasama Daerah diperlukan untuk semakin meningkatkan kemampuan sumber daya Kabupaten.

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga pada tahun 2014 ditargetkan 24 buah. 11) Meningkatnya Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kabupaten harus dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Keberadaan unit pelayanan pengadaan pada tahun 2014 ditargetkan ada; b) Keberadaan E-procurement pada tahun 2014 ditargetkan ada; c) Jumlah Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada tahun 2014 ditargetkan 25 orang; 12) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan Layanan administrasi kependudukan yang dilakukan berupa pelayanan KTP, KK dan akte catatan sipil harus terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan juga semakin meningkat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	a) Kepemilikan KTP pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 92,00%; b) Cakupan Penerbitan Akta kelahiran pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 95,24%; c) Lama pengurusan KTP pada tahun 2014 ditargetkan 1 hari; 13) Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa Komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan dalam rangka mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, sehingga dapat terjadi sinergi yang positif dalam pembangunan. Mengingat banyaknya segmen masyarakat, maka sistem komunikasi yang dilakukan juga harus menggunakan berbagai macam metode sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Keberadaan Website Pemerintah Daerah pada tahun 2014 ditargetkan ada; b) Pengunjung website pada tahun 2014 ditargetkan 554.261 netter; c) Jumlah Sistem informasi yang tersedia pada tahun 2014 ditargetkan 26 buah; d) Jumlah pemberitaan di media pada tahun 2014 ditargetkan 400 kali; e) Keberadaan Persuratan secara elektronik pada tahun 2014 ditargetkan ada;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	14) Meningkatnya penanganan pertanahan a) Pelayanan pertanahan di daerah perlu dikoordinasikan antara pemerintah kabupaten dengan instansi pemerintah pusat badan pertanahan, sehingga diharapkan permasalahan pertanahan yang ada dapat diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat. b) Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: c) Penyelesaian Kasus Tanah Negara pada tahun 2014 ditargetkan 0 kasus. 15) Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW Kebijakan penataan ruang daerah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2011. Agar penerapan kebijakan pemanfaatan ruang dapat berhasil dalam pencapaian sasaran sesuai yang diharapkan, maka dalam implementasinya Pemerintah Daerah telah membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) melalui Keputusan Bupati Gresik yang mempunyai tugas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Keberadaan Perda RTRW pada tahun 2014 ditargetkan ada; b) Perubahan pemanfaatan fungsi kawasan RTRW pada tahun 2014 ditargetkan ada pada tahun 2015 ditargetkan ada.

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	16) Meningkatnya efektifitas perencanaan Pembangunan Mengingat adanya keterbatasan sumber daya daerah baik SDM maupun keuangan maka perencanaan daerah harus disusun secara efektif dengan berupaya menyiapkan dokumen perencanaan yang baik sesuai dengan kemampuan SDM dan keuangan yang ada. Selain itu perlu juga adanya keterlibatan secara aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Ketersediaan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada tahun 2014 ditargetkan ada; b) Program RKPD yang diakomodasi dalam APBD pada tahun 2014 ditargetkan 90%. 17) Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu Data pembangunan yang disusun adalah Kabupaten Gresik dalam angka, perhitungan PDRB, pengukuran IPM dan dokumen lainnya. Data ini harus disediakan sebelum laporan pertanggungjawaban tahunan disusun dan sebelum perencanaan tahun berikutnya dibuat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Ketersediaan dokumen statistik (Kabupaten dalam Angka dan PDRB Kabupaten) pada tahun 2014 ditargetkan ada; 18) Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
3.	Pengelolaan arsip oleh satuan kerja perangkat harus tertib, rapi dan handal. Oleh karena itu prioritas yang harus dilakukan adalah menyiapkan sistem dan sarana penyimpanan arsip sesuai standar. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Penerapan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2014 ditargetkan 74,33%; Misis 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. – Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Peningkatan perekonomian daerah merupakan indikator utama dalam usaha mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingkat pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten ke depan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat dan penurunan angka pengangguran.

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	Untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam urusan Perdagangan, urusan perindustrian, urusan koperasi dan UKM, urusan penanaman modal, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan perikanan dan kelautan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan ketenagakerjaan, urusan pariwisata, urusan pekerjaan umum dan urusan energi dan sumber daya mineral. Untuk mencapai tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat ditetapkan sasaran sebagai berikut: 1) Meningkatkan usaha Perdagangan Untuk meningkatkan perekonomian daerah perlu ditingkatkan usaha Perdagangan di daerah. Oleh karena itu keberadaan pasar komoditas dan pasar umum harus tersedia di setiap wilayah. Kemudahan akses transportasi dan prasarana yang memadai menjadi suatu kebutuhan untuk meningkatkan sektor ini. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Pertumbuhan penerbitan SIUP pada tahun 2014 ditargetkan 11,50%; b) Pertumbuhan penerbitan TDP pada tahun 2014 ditargetkan 10,30%; c) Pertumbuhan penerbitan TDG pada tahun 2014 ditargetkan 16,92%; d) Pertumbuhan nilai investasi Perdagangan pada tahun 2014 ditargetkan 1,60%; e) Jumlah Pameran/Ekspo yang diikuti/dilaksanakan pada tahun 2014 ditargetkan 3 even;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	2) Meningkatnya sektor industri Untuk meningkatkan sektor industri perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan para pelaku industri di daerah. Beberapa produk dari industri di wilayah kabupaten perlu mendapatkan perhatian sehingga mampu meningkatkan ekonomi daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Pertumbuhan Industri pada tahun 2014 ditargetkan 1%; b) Pertumbuhan Nilai Produksi pada tahun 2014 ditargetkan 3,50%; 3) Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan sektor yang paling banyak menyerap pelaku ekonomi di kabupaten, sehingga upaya untuk memberdayakan dan melindungi kesinambungan usaha mereka harus dilakukan. Antara lain dengan meningkatkan kemampuan usaha koperasi dan UKM, meningkatkan kualitas kelembagaan, meningkatkan jiwa wirausaha pelaku ekonomi serta memberikan kemudahan akses permodalan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Koperasi aktif pada tahun 2014 ditargetkan 90%; b) Persentase Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2014 ditargetkan 63%; c) Koperasi yang mendapatkan penilaian baik pada tahun 2014 ditargetkan 80%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	4) Meningkatnya investasi di daerah Untuk meningkatkan investasi di daerah perlu dilakukan berbagai upaya mulai dari promosi potensi daerah, regulasi perijinan, kesiapan infrastruktur sampai dengan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha. Usaha ini harus dilakukan oleh lintas SKPD yang bersangkutan secara simultan sehingga mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Kenaikan Nilai Realisasi PMDN pada tahun 2014 ditargetkan 851,50 milyar rupiah; b) Persentase Penyelesaian Permohonan: Ijin Lokasi, Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), Ijin Gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Prinsip Ijin Usaha pada tahun 2014 ditargetkan 100%; 5) Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Sektor pertanian tanaman pangan merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura diperlukan pembinaan yang intensif. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Produksi Pertanian pada tahun 2014 ditargetkan 549.485 ton. b) Produksi Sayur pada tahun 2014 ditargetkan 17.972 ton.

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	c) Produksi Buah pada tahun 2014 ditargetkan 524.205 Kuintal. 6) Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan Produksi perkebunan di Kabupaten Gresik cukup mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan potensi perkebunan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Produksi hasil perkebunan pada tahun 2014 ditargetkan 14.018 ton. 7) Meningkatnya produksi dan populasi peternakan Untuk menjaga kecukupan gizi masyarakat perlu dilakukan pembangunan di bidang peternakan. Pembangunan ini ditujukan untuk menjaga persediaan kebutuhan daging, susu dan telur serta populasi binatang ternak. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Produksi peternakan pada tahun 2014 ditargetkan untuk daging 10.610,00 ton, telur 2.822,61 ton, dan susu 470,16 ton; b) Populasi binatang ternak dan unggas pada tahun 2014 ditargetkan untuk sapi 48.366 ekor, kerbau 285 ekor, kambing 53.355 ekor, domba 30.499 ekor, kuda 324 ekor, ayam buras 660.962 ekor, ayam ras petelur 131.000 ekor, ayam ras pedaging 2.258.286 ekor, itik 25.892 ekor dan entok 13.564 ekor; 8) Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan Untuk menjaga pemanfaatan sumber daya alam agar terjaga kelestariannya maka diperlukan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Sehingga pengawasan pada lingkungan

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	eksploitasi alam harus dilakukan secara ketat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2014 ditargetkan 1,3%; b) Jumlah Produksi hasil hutan pada tahun 2014 ditargetkan untuk kayu jati 525 m3 dan non kayu jati 58 m3; 9) Meningkatnya Produksi dan produktivitas perikanan Agar dapat mengembangkan sektor perikanan perlu dilakukan peningkatan produksi perikanan budidaya dan perairan umum. Untuk itu diperlukan jumlah benih ikan yang cukup. Peningkatan perikanan budidaya dilakukan melalui budidaya kolam dan tambak sedangkan untuk produksi perairan umum dilakukan melalui penyebaran benih ikan pada perairan umum serta hasil tangkapan laut oleh nelayan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Produksi Perikanan Budi daya pada tahun 2014 ditargetkan untuk udang windu 1.975,00 ton, udang vannamee 4.100,00 ton, bandeng 36.840,00 ton, kerapu 11,00 ton, nila 1.138,00 ton; b) Produksi Perikanan penangkapan pada tahun 2014 ditargetkan 17.500,00 ton; c) Produksi Perikanan perairan umum pada tahun 2014 ditargetkan 675,00 ton; d) Produktivitas lahan tambak payau pada tahun 2014 ditargetkan 101,11 ton/Ha; e) Produktivitas lahan tambak tawar pada tahun 2014 ditargetkan 116,87 ton/Ha;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	10) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kerusakan lingkungan dapat dipicu dari perkembangan industri. Oleh karena itu setiap industri seharusnya memiliki instalasi pengolahan limbah yang baik sehingga dapat meminimalkan pencemaran lingkungan, Hal ini memerlukan ketegasan dari Pemerintah Kabupaten untuk mencegah terjadinya pencemaran tersebut dengan menerapkan sanksi terhadap pelaku industri yang melakukan pencemaran lingkungan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Luas Lahan Kritis pada tahun 2014 ditargetkan seluas 5.746 Ha; b) Rasio Luas Kawasan Lindung pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 10%; c) Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 63 unit; d) Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 175 unit; e) Luas RTH perkotaan ditargetkan pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 717,35 Ha; 11) Meningkatnya penanganan persampahan Agar kesehatan lingkungan dapat terjaga dengan baik maka setiap sampah yang dihasilkan oleh masyarakat harus mampu terangkut dan terbuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	a) Persentase Penanganan sampah pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 92%; b) Rasio Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2014 sebanyak 0,030 m³/penduduk; c) Jumlah tempat pengolahan sampah pada tahun 2014 ditargetkan 100 unit; 12) Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau Agar dapat menjamin terlaksananya lalu lintas orang dan barang di wilayah Kabupaten Gresik diperlukan pelayanan transportasi yang baik. Pelayanan dimaksud bukan hanya berupa sarana angkutan umum yang layak jalan saja tetapi juga sarana lalu lintas seperti rambu, marka, halte dan sebagainya sebagai pendukung keselamatan dan kenyamanan transportasi daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase Ketersediaan Angkutan darat pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; b) Persentase Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 50%; c) Persentase Angkutan Umum darat dalam kondisi layak jalan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 72%; d) Ketersediaan angkutan laut penyeberangan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 154,21%; e) Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	f) Persentase permasalahan bidang perhubungan yang diselesaikan tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; 13) Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi semua warganya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten. Sehingga melalui kebijakan publik yang terencana dan jelas harus mampu menurunkan angka pengangguran terbuka kabupaten, menciptakan lapangan kerja baik formal maupun informal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 67,51%; b) Pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 32,33%; c) Angka pengangguran penduduk usia 15-24 tahun pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 20,12%; 14) Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja Agar dapat menjamin setiap pekerja memperoleh hak-haknya maka perlu dilakukan upaya pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha tentang perlindungan terhadap tenaga kerja, yang meliputi keselamatan kerja, kesehatan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	a) Kepatuhan terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 70,44%; b) Kepatuhan Terhadap Norma kerja pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 87,50%; c) Kepatuhan Terhadap Norma Jaminan Sosial Tenaga kerja pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 94,28%; d) Angka Kecelakaan Kerja pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 2,82%; e) Angka Penuntasan/ penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; f) Pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 8,47%; g) Kepatuhan atas ketentuan mengenai Kepemilikan Lembaga Kerjasama Bipartit pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 3,71%; 15) Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata Untuk meningkatkan pariwisata daerah salah satu ukurannya adalah jumlah kunjungan wisatawan. Untuk itu perlu dikembangkan obyek-obyek pariwisata daerah yang dapat menarik kunjungan masyarakat. Disamping itu, agar kunjungan dapat meningkat perlu terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pengusaha pariwisata baik di dalam maupun luar Kabupaten. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2014 ditargetkan 1.460.000 orang;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	16) Meningkatnya sarana infrastruktur daerah Pemenuhan infrastuktur jalan dan jembatan dimaksudkan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah. Ketersediaan jalan dan jembatan yang baik akan mampu mendorong pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu pemerintah kabupaten harus mendorong tersedianya jalan dan jembatan yang memadai terutama untuk daerah pengembangan ekonomi yang telah direncanakan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2014 ditargetkan 73%; b) Jembatan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2014 ditargetkan 95,81%; c) Persentase Jalan Poros Desa Yang Terbangun pada tahun 2014 ditargetkan 100%; 17) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi Pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian. Oleh karena itu upaya prioritas dalam pengelolaan air adalah ketersediaan air untuk pertanian. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2014 ditargetkan 54%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	b) Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik pada tahun 2014 ditargetkan 82,09%; 18) Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah Energi dan Sumber daya mineral yang dimiliki oleh daerah merupakan karunia Tuhan yang perlu dijaga kelestariannya. Eksploitasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestariannya akan menyebabkan potensi tersebut menjadi habis dan hilang. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap pertambangan yang ada di masyarakat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase ABT berijin yang membayar pajak pada tahun 2014 ditargetkan 74,06%; 4. Misi 4 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. - Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya . Meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah tugas utama pemerintah daerah. Kualitas hidup masyarakat diukur dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga dan ketersediaan pangan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut diharapkan kualitas hidup masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	Untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, urusan perpustakaan, urusan ketahanan pangan, urusan kepemudaan dan olah raga. Untuk mencapai tujuan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah Pembangunan pendidikan terfokus kepada dua hasil yang ingin dicapai yaitu pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih menekankan kepada kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan peningkatan kualitas pendidikan mengarah kepada kualitas hasil anak didik. Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana penunjang belajar seperti buku, laboratorium dan ruang praktek, peningkatan manajemen sekolah, peningkatan metodologi pembelajaran. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2014 ditargetkan 84.50%; - Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) pada tahun 2014 ditargetkan 95%; - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada tahun

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	2014 ditargetkan 95,7%; d) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 75,4%; e) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C pada tahun 2014 ditargetkan 90,00%; f) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada tahun 2014 ditargetkan 0,025%; g) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada tahun 2014 ditargetkan 0,1%; h) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA pada tahun 2014 ditargetkan 0,20%; i) Angka Kelulusan (AL) SD/MI pada tahun 2014 ditargetkan 100%; j) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs pada tahun 2014 ditargetkan 100%; k) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA pada tahun 2014 ditargetkan 98%; l) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2014 ditargetkan 97,39%; m) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2014 ditargetkan 97%; n) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2013 ditargetkan 97%.

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diharapkan usia harapan hidup masyarakat juga meningkat. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah, pelayanan imunisasi, pelayanan pengobatan/perawatan, pelayanan kesehatan jiwa, pemantauan pertumbuhan balita, pelayanan gizi, pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan komprehensif, pelayanan gawat darurat, penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa dan gizi buruk, pencegahan dan pemberantasan penyakit endemis, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan pengendalian vektor, pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum, penyuluhan perilaku sehat, penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat, pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan penggunaan obat generik, penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan, penyelenggaraan pembiayaan untuk keluarga miskin dan masyarakat rentan, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan lanjut usia, pelayanan gizi, pencegahan dan pemberantasan HIV-AIDS serta pelayanan dasar dan rujukan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 94%; - Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 80%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	c) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 94%; d) Cakupan Pelayanan Nifas pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 94%; e) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 80%; f) Cakupan Pelayanan Anak Balita pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 85%; g) Cakupan Kunjungan Bayi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 90%; h) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; i) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+) Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 80%; j) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; k) Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 55,00%; l) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; m) Cakupan Balita yang Mendapat Vitamin A pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 90%; n) Persentase Rumah Sehat pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 85%; o) Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 98,46%; p) Pengadaan Obat Esensial pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 99,19%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	q) Pengadaan Obat Generik pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 99,55%; r) Cakupan Rawat Jalan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 52%; s) Cakupan Rawat Inap pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 1,5%; t) Cakupan rumah tangga sehat pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 73%; u) Posyandu Purnama pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 77%; v) Pelayanan pasien jamkesmas dan jamkesda pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 10,00%; w) <i>Bed Occupancy Rate</i> pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 69,90%; x) <i>Average Lenght Of Stay</i> pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 4,25 hari; y) <i>Turn Over Internal</i> pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 1,50 hari; z) <i>Bed Turn Over</i> pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 49,79 kali; 3) Meningkatnya pelayanan keluarga berencana Pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan pada pelayanan peserta KB secara menyeluruh. Sebagai bagian dari program pengendalian jumlah penduduk, maka urusan ini memegang peranan penting dalam menekan pertumbuhan penduduk. Dengan didasari oleh kesadaran yang tinggi dari masyarakat tentang pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk maka pelayanan alat KB kepada pasangan usia subur harus ditingkatkan.

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Prevalensi peserta KB Aktif pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 78,45%; b) Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 1,12%; c) Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 21,35%; d) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 21,50%; e) Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%; 4) Meningkatnya minat baca masyarakat Untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dilakukan upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Diantaranya dengan cara meningkatkan aksesibilitas masyarakat kepada perpustakaan umum serta melakukan penambahan buku bacaan dan tempat baca yang lebih banyak di masyarakat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2014 ditargetkan 154.142 buku; b) Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2014 ditargetkan 680.759 orang; c) Jumlah anggota perpustakaan pada tahun 2014 ditargetkan 31.143 orang;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	5) Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat Dengan dijadikannya urusan pertanian menjadi prioritas pembangunan maka diharapkan surplus stok pangan daerah dapat semakin meningkat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Keberadaan regulasi ketahanan pangan pada tahun 2014 ditargetkan ada; b) Ketersediaan pangan pada tahun 2014 ditargetkan 197,21 kg/kapita/tahun; c) Rata-rata konsumsi bahan pangan utama pada tahun 2014 ditargetkan 94,35 kg/kapita/tahun; 6) Meningkatnya prestasi olah raga daerah Untuk meningkatkan prestasi pemuda di daerah perlu dilakukan pembinaan dan ajang prestasi pemuda. Sedangkan untuk meningkatkan prestasi olahraga dilakukan melalui kerja sama dengan KONI kabupaten dan organisasi persatuan olahraga yang ada di daerah. Dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan diharapkan akan muncul pemuda dan olahragawan yang berprestasi di daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: a) Persentase organisasi kepemudaan yang aktif pada tahun 2014 ditargetkan 100%; b) Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) pada tahun 2014 ditargetkan 2 unit; c) Jumlah Lapangan Olah Raga pada tahun 2014 ditargetkan 27 unit; d) Persentase cabang olah raga yang aktif pada tahun 2014 ditargetkan 93,10%;

Sumber data : Perda Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

B. Strategi Daerah

Untuk mencapai tujuan daerah dalam menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi yang dicita-citakan untuk menjadikan Gresik Yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan Yang Berkualitas, maka strategi pembangunan Kabupaten Gresik untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Misi ke-1 :

Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan kegiatan keagamaan melalui fasilitasi dan bantuan kepada aktivitas keagamaan;
2. Membangun suasana yang kondusif bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam membangun kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
4. Melakukan pembinaan kepada pemuda dan masyarakat untuk meningkatkan prestasi dan olah raga di daerah;
5. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui advokasi dan pembinaan secara berkala;
6. Memelihara dan menjaga eksistensi seni dan budaya lokal.

Misi ke-2 :

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan;
2. Memperluas jangkauan pelayanan sosial dan penanganan PMKS;
3. Menyediakan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai;

4. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan secara lebih intensif;
5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pada semua jenjang;
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
8. Meningkatkan proses perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada kinerja yang baik.

Misi ke-3 :

Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:

1. Membangun akses yang luas kepada masyarakat dalam mengembangkan industri dan Perdagangan di daerah;
2. Mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal;
3. Meningkatkan investasi penanaman modal di daerah melalui pelayanan perijinan yang baik;
4. Meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan;
5. Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan pembinaan pada bidang perikanan dan kelautan;
6. Meningkatkan infrastruktur daerah baik dalam bidang bina marga maupun pengairan.

Misi ke-4 :

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana serta biaya pendidikan yang murah;
2. Meningkatnya kualitas kesehatan melalui pemerataan akses dan keterjangkauan biaya kesehatan bagi masyarakat;
3. Menekan pertumbuhan penduduk melalui pelayanan keluarga berencana yang terjangkau;
4. Menjaga tingkat ketersediaan pangan daerah demi terwujudnya ketahanan pangan di daerah.

C. Arah Kebijakan Daerah

Berdasarkan strategi pembangunan daerah, disusun arah kebijakan daerah berdasarkan misi 1 sampai dengan misi 4.

Tabel II.2
Misi dan Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2015

NO.	Misi	Arah Kebijakan
1.	Misi 1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati yang dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri", ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun sebagai berikut:	1) Membantu/ memfasilitasi peningkatan kegiatan keagamaan di masyarakat; 2) Meningkatkan rasa sejuk , santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 3) Mengembangkan budaya masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan;

NO.	Misi	Arah Kebijakan
		4) Meningkatkan prestasi olah raga melalui pembinaan induk organisasi dan komite olah raga; 5) Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui pemberdayaan pada lembaga pemerintah, sektor industri dan lembaga non formal; 6) Melestarikan dan mengembangkan keragaman kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal.
2.	Misi 2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut:	1) Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat perdesaan; 2) Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS dengan peningkatan rehabilitasi dan bantuan dasar kesejahteraan sosial 3) Meningkatkan sarana dan parasarana dasar pemukiman; 4) Mendorong percepatan pencapaian good governance melalui pengembangan produk hukum; 5) Meningkatkan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan dan monitoring tindak lanjut; 6) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih; 7) Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan peningkatan sumberdaya penerimaan daerah;

NO.	Misi	Arah Kebijakan
		8) Meningkatkan fungsi legislatif melalui pemberdayaan dan penampungan aspirasi masyarakat; 9) Meningkatkan profesionalisme aparat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak pegawai sesuai ketentuan; 10) Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan; 11) Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI); 12) Meningkatkan pengelolaan pertanahan; 13) Meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui dokumen tata ruang dan penegakan penerapannya; 14) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan; 15) Mendokumentasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan informasi hasil-hasil pembangunan; 16) Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan arsip daerah.
3.	Misis 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang	1) Mengembangkan sistem pemasaran produk unggulan/andalan; 2) Mengembangkan industri kecil dan menengah; 3) Revitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi melalui pembinaan intensif;

NO.	Misi	Arah Kebijakan
	berwawasan lingkungan.	4) Meningkatkan investasi di daerah melalui instrumentasi prosedur pelayanan investasi serta pengembangan kawasan industri dan infrastruktur; 5) Mengembangkan jaringan pemasaran produk pertanian; 6) Optimalisasi sumberdaya pertanian baik penyuluh maupun petani; 7) Mengembangkan komoditas perkebunan, melalui kimbun (kawasan industri masyarakat perkebunan); 8) Meningkatkan wilayah pengembangan sentra-sentra produksi dan populasi peternakan serta didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan; 9) Optimalisasi pemanfaatan hutan dan lahan serta pengembangan tanamannya secara berkelanjutan; 10) Meningkatkan produksi perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap perairan umum, kolam, laut dan tambak; 11) Meningkatkan pembinaan atas usaha/kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran pada tanah, air, dan udara; 12) Meningkatkan penanganan sampah secara berkelanjutan dengan mendorong swadaya masyarakat; 13) Meningkatkan kelancaran angkutan orang, barang dan jasa serta peningkatan keselamatan lalu lintas jalan;

NO.	Misi	Arah Kebijakan
		14) Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 15) Mengembangkan produk-produk wisata dan meningkatkan promosi 16) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan ; 17) Meningkatkan pelayanan irigasi; 18) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral daerah.
4.	Misi 4 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.	1) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan; 2) Meningkatkan pemerataan dan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, terutama dengan membebaskan biaya pemeriksaan di puskesmas untuk penduduk miskin; 3) Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan KB kepada masyarakat; 4) Menjadikan perpustakaan sebagai sarana penambah pengetahuan; 5) Meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan dan sumber karbohidrat dan sumber protein.

Sumber data: Perda Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

D. Prioritas Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 sebagaimana Perda Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011, prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan.
2. Revitalisasi birokrasi.
3. Pembangunan ekonomi daerah dengan titik berat ekonomi kerakyatan.
4. Revitalisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah.
5. Revitalisasi pelayanan kesehatan.
6. Penanggulangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan hidup.

Pada Tahun 2014 Prioritas pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2014, prioritas pembangunan daerah pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Daerah Tertinggal serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
5. Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;
6. Pemerataan dan Pertumbuhan perekonomian melalui: Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri;
7. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penanggulangan Bencana serta Tata Ruang;
8. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;

9. Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata, melalui Kreativitas dan Inovasi Teknologi serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
10. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan kesalehan sosial.

Berikut ini tabel yang menjelaskan prioritas dan program pembangunan Tahun 2014:

Tabel II.3
Penjelasan Program Kabupaten Gresik
Tahun 2014

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
1.	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Pendidikan Luar Biasa 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8. Program Penyelenggaraan Pendidikan Akper 9. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2.	Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengembangan Obat dan Makanan 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 10. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 13. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 14. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 15. Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
3.	Perluasan Lapangan Kerja.	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4. Program Transmigrasi Regional
4.	Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Daerah Tertinggal serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.	1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan reproduksi Remaja 3. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 4. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 6. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh Kembang Anak 7. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 8. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 10. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 11. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 12. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 13. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 15. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo 16. Program Pembinaan Eks. Penyandang

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		Penyakit sosial (Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) 17. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 18. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 19. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 20. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 21. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
5.	Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 6. Program Pengembangan Sarana/ Prasarana Pembangunan Pertanian/ Perkebunan 7. Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan 8. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 9. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 10. Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan 11. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 12. Program peningkatan produksi hasil peternakan 13. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 14. Program peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan sumberdaya laut 15. Program pengembangan budidaya perikanan 16. Program pengembangan perikanan tangkap 17. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 18. Program optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan 19. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
6.	Pemerataan dan Pertumbuhan perekonomian melalui: Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri	1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 7. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 10. Program Pembinaan PKL dan Asongan 11. Program Peningkatan Pasar 12. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 13. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 14. Program Penataan struktur Industri 15. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
7.	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penanggulangan Bencana serta Tata Ruang,	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 7. Program penyediaan dan pengolahan air baku 8. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limba

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		10. Program pengendalian banjir 11. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 12. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 13. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 14. Program Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 15. Program Pengembangan dan Implementasi Kegiatan Ke-PU-an 16. Program Pembangunan Infrastruktur 17. Program Pengembangan Perumahan 18. Program Lingkungan Sehat Perumahan 19. Program Pemberdayaan Komunikasi Perumahan 20. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 21. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam /Sosial 22. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 23. Program Pengembangan data/informasi 24. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 25. Program perencanaan pembangunan daerah 26. Program perencanaan pembangunan ekonomi 27. Program perencanaan sosial budaya 28. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 29. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah 30. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 31. Program rehab Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 32. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 33. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 34. Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas 35. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 36. Program Peningkatan Komunikasi Informasi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian 37. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 38. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		Lingkungan 39. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 40. Program Pengendalian dan Pengawasan ESDM 41. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kelistrikan, Energi dan Mineral 42. Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi 43. Program Pengembangan potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi 44. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 45. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 46. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 47. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 48. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 49. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 50. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 51. Program Perencanaan Tata Ruang 52. Program Pemanfaatan Ruang 53. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 54. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 55. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 56. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 57. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 58. Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dalam Tanggap Darurat 59. Program Pemulihan Pasca Bencana 60. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Bencana
8.	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7. Program Pendidikan Kedinasan 8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 9. Program Penelitian dan Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah 10. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 12. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 13. Program Kerjasama Informasi dan Mass Media 14. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 16. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 18. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 19. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 20. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 21. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 22. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 24. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 25. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 26. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 27. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		28. Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 29. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip 30. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 31. Program Penataan Perundang-Undangan 32. Program Perencanaan Pembangunan 33. Program Penataan Daerah otonomi Baru 34. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.	Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata, melalui Kreativitas dan Inovasi Teknologi serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga	1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 5. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 6. Program peningkatan peran serta kepemudaan 7. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 8. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 10. Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 11. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 12. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 13. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
10.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan kesalehan sosial.	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 3. Program pengembangan wawasan kebangsaan 4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		7. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Sumber data: Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2014

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, akan timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.



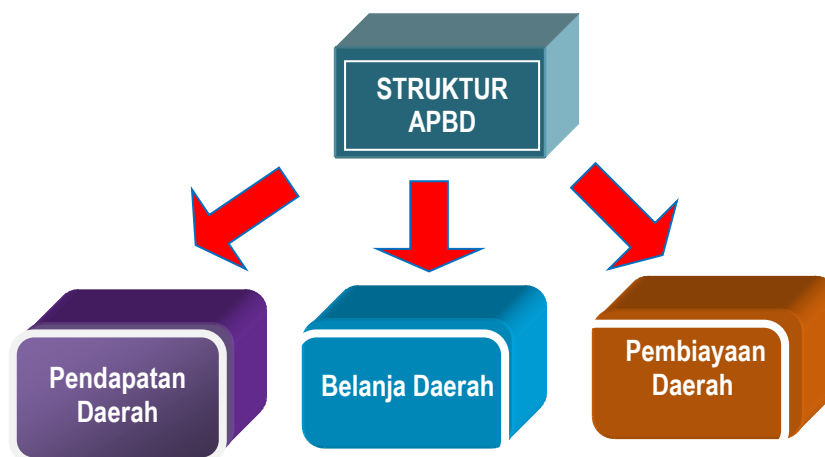
Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (iii) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah yang telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan tersebut harus sebanding dengan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014 yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014 terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah (2) Belanja Daerah (3) Pembiayaan Daerah.

Gambar III.1
Struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014



Pada komponen Pendapatan Daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Sedangkan pada komponen Belanja terdiri atas : (1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga; (2) Belanja langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Sementara komponen pembiayaan daerah terdiri atas (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembayaran Pokok Hutang.

Gambar III.2
Komponen APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014



Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu unsur penting adalah pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan pendorong

bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan kebijakan strategis serta upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara terus menerus. Kebijakan strategis serta upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui program dan kegiatan terukur, terkoordinasi serta berkelanjutan dengan mengedepankan optimalisasi potensi pendapatan daerah dan aspek pelayanan publik yang diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Pada dasarnya pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara brutto, dalam arti bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Dari sisi perencanaan, maka pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Upaya-upaya yang ditempuh dalam kaitannya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi:

- a. Peningkatan manajemen pemungutan pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya;
- c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan melalui kemudahan, ketepatan dan kecepatan sesuai dengan standar pelayanan;

- e. Mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah agar mampu memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan fungsi penyertaan modal;
- f. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;
- g. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundangan terkait dengan dasar pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kondisi terkini;
- h. Peningkatan koordinasi dan dukungan pemungutan bagi hasil pajak pemerintah dan provinsi; serta
- i. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pemungutan pendapatan daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp2.230.155.528.034,68, sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp2.206.385.836.981,47 atau 98,93%, dengan rincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

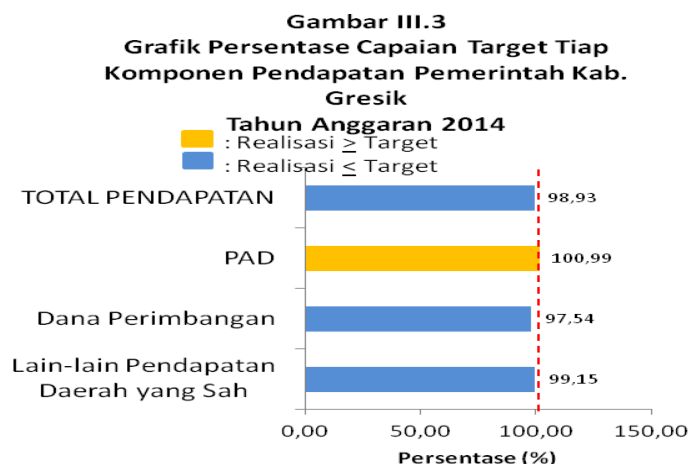
Tabel III.1
Komposisi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
1	Pendapatan	2.230.155.528.034,68	2.206.385.836.981,47	98,93
1.1	Pendapatan Asli Daerah	693.740.593.159,68	700.587.792.877,47	100,99
1.2	Dana Perimbangan	1.092.153.556.889,00	1.065.300.023.150,00	97,54
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	444.261.377.986,00	440.498.020.954,00	99,15

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD Tahun 2014 sebesar Rp2.206.385.836.981,47 telah melampaui target yang diharapkan atau mencapai 100,99%. Untuk dana perimbangan realisasi tahun 2014 sebesar

Rp1.065.300.023.150,00 atau mencapai 97,54% dari target yang direncanakan dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berada pada kisaran 99,15%.



Jika dilihat dari komposisi anggaran, PAD menyumbang 31,75% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Gresik di tahun 2014. Sedangkan dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar yaitu 48,28% dan sisanya sebesar 19,96% diperoleh dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kontribusi PAD Kabupaten Gresik pada tahun 2014 yang mencapai 31,75% lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 27,32%. Semakin besar kontribusi PAD atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah semakin baik.

Adapun rincian dari masing-masing pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya.

Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (self supporting).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.



“Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (self supporting)”

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp693.740.593.159,68 dapat direalisasikan lebih besar dari target yaitu sebesar Rp700.587.792.877,47 atau 100,99%. Sumbangan terbesar dari PAD Kabupaten Gresik berasal dari hasil pajak daerah, yaitu mencapai 52,35% dari realisasi PAD yang dihasilkan pada tahun 2014. Adapun perincian PAD Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2
Perincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	693.740.593.159,68	700.587.792.877,47	100,99
1.1.1	Pajak Daerah	400.989.671.586,58	386.741.657.665,39	96,45
1.1.2	Retribusi Daerah	120.287.567.118,30	111.030.586.229,39	92,30
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.507.856.833,70	21.557.353.346,85	100,23
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	150.955.497.621,10	181.258.195.635,84	120,07

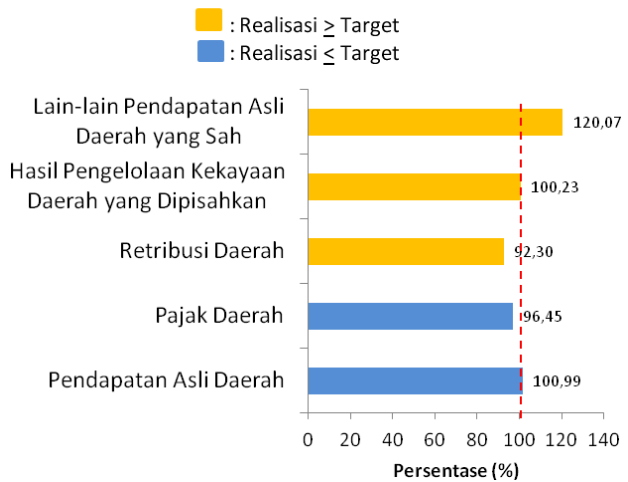
Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

Grafik disamping mengilustrasikan rincian capaian realisasi komponen-komponen PAD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014.

Terlihat bahwa komponen hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2014 belum melampaui target karena kurangnya aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat mengakibatkan perubahan dari potensi PAD yang berasal dari jenis-jenis pajak dan retribusi tertentu menjadi PAD pada tahun

2014, namun untuk komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sudah melampaui target sebesar 120,07% serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga melampaui target sebesar 100,23%.

Gambar III.4
Grafik Persentase Capaian Target Tiap Komponen
Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2014



1) Pajak Daerah

Pada era otonomi daerah, masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen utama Pendapatan Asli daerah (PAD). Penguatan *local taxing power* kepada daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dilakukan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai undang-undang tersebut pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah adalah 16 jenis meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebanyak 11 jenis.

Jenis pajak daerah kabupaten/kota yang ditargetkan dalam APBD 2014 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir (7)



“Penguatan local taxing power kepada daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terutama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009”

Pajak Air Tanah (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (9) PBB Pedesaan dan Perkotaan (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp400.989.671.586,58 dan dapat direalisasikan sebesar Rp386.741.657.665,39 atau mencapai 96,45 %. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa jenis pajak daerah yang tidak dapat mencapai target yang diharapkan, sebagaimana rincian hasil penerimaan pajak daerah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.3
Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.1.	PAJAK DAERAH	400.989.671.586,58	386.741.657.665,39	96,45
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.315.572.381,00	1.315.941.622,00	100,03
4.1.1.02	Pajak Restoran	8.782.063.884,98	10.087.615.693,35	114,87
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.050.598.600,00	563.428.892,50	53,63
4.1.1.04	Pajak Reklame	2.335.840.356,10	2.879.402.658,97	123,27
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	125.000.000.000,00	125.968.195.675,57	100,77
4.1.1.07	Pajak Parkir	1.150.000.000,00	1.182.198.676,00	102,80
4.1.1.10	Pajak Air Tanah	755.596.364,50	676.395.073,25	89,52
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.600.000.000,00	13.398.261.782,25	126,40
4.1.1.12	PBB Pedesaan dan Perkotaan	75.000.000.000,00	71.766.596.800,00	95,69

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	175.000.000.000,00	158.903.620.791,50	90,80

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.



“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi : 1. Retribusi Jasa Umum terdiri (i) Retribusi

Pelayanan Kesehatan (ii) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (iii) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil (iv) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan (v) Retribusi Pelayanan Pasar (vi) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (vii) retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 2. Retribusi Jasa Usaha terdiri (i) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (ii) Retribusi Tempat Pelelangan, (iii) Retribusi Terminal (iv) Retribusi Tempat Khusus Parkir, (v) Retribusi Rumah Potong Hewan, (vi) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, (vii) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (viii) Retribusi Penyeberangan di Air. 3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri (i) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (ii) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (iii) Retribusi Izin Trayek.

Pendapatan Hasil Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp120.287.567.118,30, terealisasi sebesar Rp111.030.586.229,39 atau 92,30%.

Adapun perincian pendapatan dari Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4
Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	120.287.567.118,30	111.030.586.229,39	92,30
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	24.663.201.588,00	24.968.327.900,00	101,24
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	13.620.390.500,00	13.603.349.700,00	99,87
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	750.000.000,00	712.252.500,00	94,97
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	70.745.000,00	70.745.000,00	100,00
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.452.000.000,00	6.459.403.000,00	100,11
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	854.066.088,00	875.308.850,00	102,49
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.716.000.000,00	1.819.504.500,00	106,03
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.200.000.000,00	1.427.764.350,00	118,98
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	26.606.365.530,30	13.077.037.350,32	49,15
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pekerjaan Umum)	1.325.500.000,00	1.304.271.500,00	98,40
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perhubungan)	45.950.000,00	41.900.000,00	91,19
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan)	0,00	31.427.000,00	0,00
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)	660.000.000,00	633.890.500,00	96,04
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sekretariat Daerah)	330.000.000,00	224.436.030,00	68,01
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	16.500.000,00	24.000.000,00	145,45
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan (Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan)	12.000.000,00	4.250.000,00	35,42
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan)	226.000.000,00	220.145.300,00	97,41

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan)	500.000.000,00	481.745.000,00	96,35
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan(Dinas Kelautan, Perikan dan Peternakan)	110.000.000,00	109.791.000,00	99,81
4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.798.415.530,30	7.525.539.520,32	110,70
4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	14.200.000.000,00	6.000.000,00	0,04
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.200.000.000,00	2.240.400.000,00	101,84
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Sekretariat Daerah)	33.000.000,00	22.409.500,00	67,91
4.1.2.02.11	Retribusi Penyeberangan di Air	125.000.000,00	182.832.000,00	146,27
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	69.018.000.000,00	72.985.220.979,07	105,75
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	65.000.000.000,00	69.361.023.236,50	106,71
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (Badan Penanaman Modal dan Perijinan)	4.000.000.000,00	3.598.907.742,57	89,97
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	18.000.000,00	25.290.000,00	140,50

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal pada PD. BPR Bank Gresik (Bank Pasar), PT. Gresik Migas, PT. Bank Jatim, PT. BPR Jatim yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	TARGET	
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	21.507.856.833,70	21.557.353.346,85	100,23
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.550.000.000,00	12.599.480.513,15	100,39
4.1.3.01.02	PD. BPR Bank Gresik (Bank Pasar)	550.000.000,00	599.480.513,15	109,00
4.1.3.01.03	PT Gresik Migas	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00
4.1.3.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	8.957.856.833,70	8.957.872.833,70	100,00
4.1.3.02.01	PT Bank Jatim	8.942.856.833,70	8.942.856.833,70	100,00
4.1.3.02.02	PT BPR Jatim	15.000.000,00	15.016.000,00	100,11

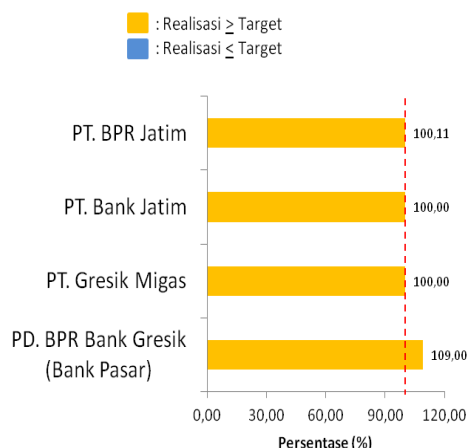
Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, pada Tahun Anggaran 2014 terdiri dari : Perolehan dari bagian laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD yaitu dari PD. BPR Bank Gresik (Bank Pasar) direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp599.480.513,15 atau 109,00%, PT. Gresik Migas direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar

Rp12.000.000.000,00 atau 100%, perolehan laba dari PT. Bank Jatim direncanakan sebesar Rp8.942.856.833,70 dan dapat direalisasikan sebesar Rp8.942.856.833,70 atau 100%, dan dari PT. BPR Jatim direncanakan sebesar

LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014

Gambar III.5
 Grafik Capaian Target Hasil Perusahaan Milik Daerah
 Pemerintah Kabupaten Gresik
 Tahun Anggaran 2014



Rp15.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp15.016.000,00 atau mencapai 100,11%.

Tujuan dibentuknya BUMD secara umum adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Dengan tercapainya target kinerja dalam tahun 2014, diharapkan Perusahaan Daerah ini dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal di masa mendatang dalam penerimaan dan pembangunan daerah Kabupaten Gresik secara lebih luas.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pos pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas: (1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan (2) Penerimaan Jasa Giro (3) Pendapatan Bunga Deposito (4) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (8) Pendapatan Denda Retribusi (9) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan (10) Pendapatan Dari Pengembalian (11) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (12) Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (13) Pendapatan Bidang Perhubungan (14) Pendapatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (15) Tindak Lanjut Penghapusan Aset.

Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp150.955.497.621,10 dan dapat terealisasikan melampaui target yaitu sebesar Rp181.258.195.635,84 atau 120,07%. Adapun perincian dari pos pendapatan tersebut pada tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Perincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	TARGET	
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	150.955.497.621,10	181.258.195.635,84	120,07

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	TARGET	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	433.000.000,00	737.430.280,00	170,31
4.1.4.02	Jasa Giro	2.900.000.000,00	4.080.198.926,20	140,7
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	17.027.068.489,46	21.762.697.666,36	127,81
4.1.4.06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	1.936.719.489,10	0
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak1)	0	1.691.128.406,73	0
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	0	961.740.880,00	0
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0	235.107.600,00	0
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	0	554.936.918,42	0
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	2.580.750,00	5.013.000,00	194,25
4.1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2.030.700.000,00	2.003.900.000,00	98,68
4.1.4.15	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	100.150.162.130,00	116.081.131.293,54	115,91
4.1.4.16	Pendapatan Bidang Perhubungan	8.643.151.251,64	10.611.713.675,49	122,78
4.1.4.17	Pendapatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	19.768.835.000,00	20.497.177.500,00	103,68
4.1.4.18	Tindak Lanjut Penghapusan Aset	0	99.300.000,00	0

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

b. Dana Perimbangan

Gambar III.6
Komponen Dana Perimbangan



Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Dana perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah. Dana Perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak: (2) Dana Alokasi Umum: dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintahan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Penerimaan dari Dana Perimbangan pada tahun 2014 direncanakan sebesar sebesar Rp1.092.153.556.889,00 terealisasi sebesar Rp1.065.300.023.150,00 atau 97,54%. Adapun perincian penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.7
Rincian Dana Perimbangan Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.092.153.556.889	1.065.300.023.150	97,54
4.2.1	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	156.704.777.889	129.851.244.150	82,86
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	112.259.101.702	97.516.434.678	86,87
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	44.445.676.187	32.334.809.472	79,75
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	863.397.519.000	863.397.519.000	100,00
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	863.397.519.000	863.397.519.000	100,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	72.051.260.000	72.051.260.000	100,00

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagikan kepada daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana bagi hasil ditujukan dalam rangka memperkecil

kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak terdiri atas : (1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (2) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang (3) Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau.



“Dana Bagi Hasil ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di

Sedangkan pos penerimaan Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber Daya Alam terdiri atas: (1) Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan (2) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan (3) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi (4) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi (5) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi (6) Bagi Hasil dari Sumber Daya Kehutanan (7) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum.

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada tahun 2014 direncanakan sebesar Rp156.704.777.889,00 terealisasi sebesar Rp129.851.244.150,00 atau 82,86%.

Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.8
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	TARGET	
4.2.1	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	156.704.777.889	129.851.244.150	82,86
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	112.259.101.702	97.516.434.678	86,87
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	44.445.676.187	32.334.809.472	72,75

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp863.397.519.000,00 terealisasi sebesar Rp863.397.519.000,00 atau 100%.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik daerah.

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari DAK pada tahun anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp72.051.260.000,00 terealisasi sebesar Rp72.051.260.000,00 atau 100%.

Adapun perincian DAK pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.9
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	TARGET	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	72.051.260.000,00	72.051.260.000,00	100,00
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	32.395.300.000,00	32.395.300.000,00	100,00
4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	4.215.960.000,00	4.215.960.000,00	100,00
4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi	5.106.770.000,00	5.106.770.000,00	100,00

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	TARGET	
4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Bersih	2.927.040.000,00	2.927.040.000,00	100,00
4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	5.391.970.000,00	5.391.970.000,00	100,00
4.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	6.966.640.000,00	6.966.640.000,00	100,00
4.2.3.01.11	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	1.482.250.000,00	1.482.250.000,00	100,00
4.2.3.01.13	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	1.547.090.000,00	1.547.090.000,00	100,00
4.2.3.01.14	Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi	488.960.000,00	488.960.000,00	100,00
4.2.3.01.15	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman	11.529.280.000,00	11.529.280.000,00	100,00

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (2) Dana Penyesuaian daqn otonomi Khusus; (3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp444.261.377.986,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp440.498.020.954,00 atau mencapai 99,15%,

Adapun perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.10
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	444.261.377.986,00	440.498.020.954,00	99,15

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	189.388.105.986,00	185.113.366.954,00	97,74
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	233.596.695.000,00	234.108.077.000,00	100,22
4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	21.276.577.000,00	21.276.577.000,00	100,00

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

1) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi; (2) Dana Bagi Hasil Pajak Bukan dari Provinsi.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan target sebesar Rp189.388.105.986,00 terealisasi sebesar Rp185.113.366.954,00 atau 97,74%.

Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.11
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	189.388.105.986,00	182.297.665.248,00	96,26
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	189.371.282.618,00	181.359.600.277,00	95,77
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	51.387.147.844,00	50.353.465.142,00	97,99
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	58.795.219.932,00	59.622.147.445,00	101,41
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	50.205.913.478,00	47.701.726.151,00	95,01
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	615.582.350,00	686.075.112,00	111,45

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	28.367.419.014,00	22.996.186.427,00	81,07
4.3.3.05	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dari Provinsi	16.823.368,00	3.753.766.677,00	22312,81
4.3.3.05.01	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari RP3HH	0,00	3.653.795.736,00	0,00
4.3.3.05.03	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Tera	0,00	0,00	0,00
4.3.3.05.04	Sumbangan pihak ketiga dari pembelian kayu	16.823.368,00	99.970.941,00	594,24

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

2) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

Penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus pada tahun 2014 sebesar Rp233.596.695.000,00 terealisasi sebesar Rp234.108.077.000,00 atau 100,22%.

Adapun perincian dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.12
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	TARGET	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	233.596.695.000,00	234.108.077.000,00	100,22
4.3.4.01	Dana Penyesuaian			
4.3.4.01.15	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS	211.561.698.000,00	211.561.698.000,00	100,00
4.3.4.01.18	Dana Bantuan Pemerintah/Presiden	898.000.000,00	898.000.000,00	100,00
4.3.4.04	Dana Insentif Daerah			
4.3.4.04.01	Dana Insentif Daerah	21.136.997.000,00	21.136.997.000,00	100,00
4.3.4.05	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi			
4.3.4.05.01	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	0,00	511.382.000,00	0,00

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2014 sebesar Rp21.276.577.000,00 terealisasi sebesar Rp21.276.577.000,00 atau 100%.

3. Permasalahan dan Solusi

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2014 secara keseluruhan sebesar 98,93 %. Permasalahan tersebut disebabkan komponen pendapatan daerah dari dana perimbangan, khususnya bagi hasil pajak/ bukan pajak dari pemerintah serta dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, khususnya dari Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Disamping itu masih ada beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum sesuai dengan yang direncanakan.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah :

1. Dengan melihat bahwa komponen dana perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah kewenangan pemerintah dan provinsi, maka dalam hal menetapkan rencana pendapatan diperlukan koordinasi intensif sehingga realisasi dari dana perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah akan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dapat mencapai target, diperlukan upaya perhitungan rasional berdasarkan data dasar jenis pendapatan secara rasional sesuai dengan kondisi terkini. Hal tersebut dipakai sebagai dasar penentuan rencana pendapatan, sehingga dalam pelaksanaan optimalisasi pendapatan akan sesuai dengan perkembangan terkini atas setiap jenis pendapatan.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gresik, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-



“Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang

undangan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

- (1) BELANJA TIDAK LANGSUNG, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,
- (2) BELANJA LANGSUNG merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp2.406.996.580.880,01 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.172.832.221.494,31 atau mencapai 90,27%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.13
Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

NO.	URAIAN	ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI BELANJA (Rp.)	%
	BELANJA	2.406.996.580.880,01	2.172.832.221.494,31	90,27
1	Belanja Tidak Langsung	1.207.158.194.722,01	1.124.406.247.047,25	93,14
2	Belanja Langsung	1.199.838.386.158,00	1.048.425.974.447,06	87,38

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 51,75% dari realisasi belanja Kabupaten Gresik di tahun 2014 dan sisanya sebesar 48,25% merupakan kontribusi dari belanja langsung.

Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk tahun anggaran 2014, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan jenis belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp1.207.158.194.722,01 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.124.406.247.047,25 atau 93,14%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel III.14
Perincian Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.207.158.194.722,01	1.124.406.247.047,25	93,14
2.1.1	Belanja Pegawai	851.401.407.408,01	800.421.027.329,00	94,01
2.1.2	Belanja Bunga	308.564.814,00	67.000.868,25	21,71
2.1.3	Belanja Subsidi	128.700.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	112.202.416.000,00	103.401.483.000,00	92,16
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	28.972.465.000,00	27.024.005.000,00	93,27

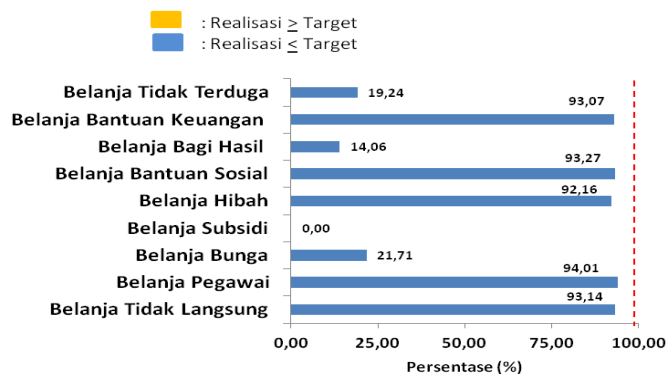
NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	4.540.846.800,00	638.334.900,00	14,06
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	206.603.794.700,00	192.277.210.950,00	93,07
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	577.185.000,00	19,24

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp851.401.407.408,01 dan direalisasikan sebesar Rp800.421.027.329,00 atau 94,01%. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik.

Gambar III.7
Grafik Capaian Belanja Tidak Langsung
Pemerintah Kab. Gresik
Tahun Anggaran 2014



2 Belanja Bunga

Belanja Bunga Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp308.564.814,00 dan direalisasikan sebesar Rp67.000.868,25 atau 21,71%.

3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp128.700.000,00, namun tidak direalisasikan.

4 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp112.202.416.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp103.401.483.000,00 atau 92,16%. Belanja ini diberikan pada lembaga, kelompok lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp28.972.465.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp27.024.005.000,00 atau 93,27%.

6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp4.540.846.800,00 dan direalisasikan sebesar Rp638.334.000,00 atau 14,06%.

7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp206.603.794.700,00 dan direalisasikan sebesar Rp192.277.210.950,00 atau 93,07%. Belanja bantuan ini diberikan kepada desa dan partai politik.

8 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp577.185.000,00 atau 19,24%.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan jenis belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja langsung pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp1.199.838.386.158,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.048.425.974.447,06 atau 87,38%.

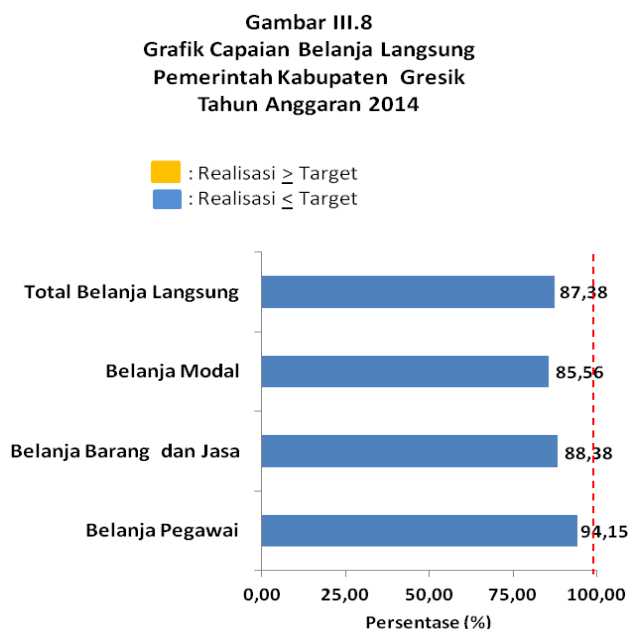
Adapun perincian Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.15
Perincian Belanja Langsung
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Belanja Langsung	1.199.838.386.158,00	1.048.425.974.447,06	87,38
1	Belanja Pegawai	91.624.285.931,00	86.264.228.669,00	94,15
2	Belanja Barang dan Jasa	495.990.534.958,00	438.356.848.596,00	88,38
3	Belanja Modal	612.223.565.269,00	523.804.897.182,06	85,56

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

Grafik berikut menggambarkan capaian rincian Belanja Langsung Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014.



2. Permasalahan dan Solusi

Penyerapan anggaran belanja di Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014 cukup baik dengan indikator penyerapan secara

keseluruhan mencapai 90,27%, tidak terealisasi sebesar 9,73% karena adanya efisiensi, sisa lelang, atau alasan lainnya.

Secara umum, kinerja pemerintah dapat berjalan dengan baik, program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun apabila dicermati, dalam melaksanakan program dan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Hal tersebut menyebabkan penyerapan anggaran dilakukan pada triwulan IV atau menjelang berakhirnya tahun anggaran. Oleh karena itu diharapkan setiap SKPD dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun sehingga penyerapan anggaran tidak terakumulasi pada akhir tahun anggaran, serta meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi.

C. Rencana dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali.

Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk



“Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus / (defisit) anggaran ”

mengantisipasi surplus/defisit anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban, serta menjadi kredibilitas pemerintah daerah.

Penganggaran komponen pembiayaan diarahkan untuk menutupi beban hutang Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, yang

pada gilirannya akan mengurangi beban pemerintah pada tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya, penetapan kebijakan pembiayaan daerah disertai dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan.

Optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyeimbangkan antara Pos Penerimaan dan Pos Pengeluaran Daerah pada komponen pembiayaan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014, dianggarkan sebesar Rp176.841.052.845,33 dan telah direalisasikan sebesar Rp176.864.952.845,53 atau 100,03%, dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.16
Komposisi Pembiayaan
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	179.232.839.512,33	179.282.766.311,33	100,03
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.391.786.667,00	2.391.979.644,53	100,00
	Pembiayaan Netto	176.841.052.845,33	176.890.979.644,53	100,03

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

Adapun perincian anggaran dan realisasi masing-masing bagian komponen pembiayaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Besarnya Penerimaan Daerah dalam pembiayaan dianggarkan sebesar Rp179.232.839.512,33 dan dapat direalisasikan sebesar Rp179.282.766.311,33 atau 100,03%, Jumlah penerimaan Daerah dalam pembiayaan ini, bersumber dari (1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) (2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun perincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.17
Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014
(Sebelum dilakukan audit BPK)

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	179.232.839.512,33	179.232.839.512,33	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	49.926.799,00	

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi pendapatan dan belanja selama satu anggaran. Dengan demikian dalam APBD 2014, SILPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi APBD di tahun 2013. Terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan dari SILPA mencapai 100,00% dari target yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Besarnya pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp2.391.786.667,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.391.786.666,80 atau 100%.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemandirian Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan umum merupakan akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan desentralisasi. Sejalan dengan azas desentralisasi sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014 ini, penyelenggaraan urusan pemerintahan disajikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengelompokkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

A. Urusan Wajib

Dalam rangka penyelenggaraan 26 urusan wajib dialokasikan anggaran sebesar Rp1.162.517.654.461,00 realisasi sebesar Rp1.015.665.263.400,00, tidak

terserap sebesar Rp146.852.391.060,94. Adapun penyelenggaraan masing-masing urusan wajib adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Pada Tahun 2014 Urusan Pendidikan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 10 program terdiri 97 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp104.703.521.306,00 realisasi sebesar Rp94.728.227.057,00, tidak terserap Rp9.975.294.249,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Dinas Pendidikan melaksanakan 8 program terdiri 92 kegiatan dengan alokasi dana sebesar **Rp103.312.565.806,00**, realisasi sebesar Rp93.539.650.034,00, tidak terserap Rp9.772.915.772,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1) Efisiensi | Rp. 2.033.129.117,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp. 6.507.340.405,00 |
| 3) Lelang gagal | Rp. 1.179.786.250,00 |
| 4) Kegiatan yang tidak dilaksanakan | Rp. 52.660.000,00 |

1.2. Dinas Kesehatan melaksanakan 1 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.258.380.000,00, realisasi sebesar Rp1.060.416.523,00 tidak terserap Rp197.963.477,00, disebabkan adanya efisiensi sebesar Rp197.963.477,00.

1.3. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp132.575.500,00, realisasi sebesar Rp128.160.500,00 tidak terserap Rp4.145.000,00, disebabkan adanya efisiensi sebesar Rp4.145.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat bangunan sekolah dasar dan menengah;
- Terlaksananya pembangunan gedung SDN Betiting Cerme;
- Terwujudnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik;

- Tercukupinya sarana olahraga dan komputer pada SMP Negeri;
- Terlaksananya sosialisasi pembinaan dan pendampingan proses penerimaan dana BOP kepada Kepala Sekolah;
- Terlaksananya penyaluran dana BPS SD/SDLB, SMPTN/SMPLB;
- Terlaksana pelatihan kompetensi siswa berprestasi;
- Terlaksananya pengembangan kurikulum 2013;
- Terwujudnya peningkatan kegiatan kinerja gugus SD di Kecamatan;
- Tersedianya sarana bermain untuk siswa PAUD;
- Terlaksananya sosialisasi peran orangtua terhadap pendidikan Anak Usia Dini;
- Terwujudnya peningkatan kualitas atlet pelajar berprestasi POR di Tingkat Provinsi;
- Terlaksananya penyelenggaraan Ujian Nasional sesuai BSNP dan Permendiknas;
- Terwujudnya inovasi pembelajaran mata pelajaran;
- Terlaksananya pembelajaran SMP Negeri Satu Atap;
- Terselenggaranya pelaksanaan Hari Anak Nasional;
- Terlaksananya penerimaan peserta didik baru reguler dan online;
- Meningkatnya pelayanan dan pembimbingan pada siswa inklusi;
- Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah;
- Terlaksananya Ujian Nasional SMP/MTs dengan baik;
- Meningkatnya manajemen guru olahraga;
- Terlaksananya try-out ujian SD/SMP sehingga kualitas lulusan menjadi semakin baik;
- Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik untuk mengidentifikasi secara dini terhadap anak berkebutuhan khusus dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat;
- Meningkatnya jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata;
- Meningkatnya kualitas moral siswa;
- Terlaksananya kegiatan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Gresik;

- Terlaksananya peningkatan jumlah siswa lulusan SMA/MA/SMK yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan S1;
- Meningkatnya kemampuan manajemen bagi pengelola dan lembaga kursus;
- Tercapainya partisipasi dalam kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI);
- Tersusunnya rencana aksi Pengarustamaan Gender (PUG) di bidang pendidikan;
- Meningkatnya kepedulian masyarakat tentang pendidikan dan tersusunnya rencana aksi PUG di Bidang Pendidikan;
- Tercapainya Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun;
- Meningkatnya kemampuan pembelajaran bagi tutor kesetaraan (program paket A, paket B dan paket C);
- Terpilihnya siswa SLB yang berprestasi dalam 14 jenis lomba untuk berkompetisi di Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Terlaksananya Kelompok Kerja Guru sehingga kinerja guru meningkat;
- Terbinanya satuan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- Terbinanya sekolah model di masing-masing kecamatan sebagai contoh sekolah lain;
- Tersusunnya data pokok pendidikan yang terpilah, valid, dan up to date;
- Tersedianya profil pendidikan yang lengkap dan akurat;
- Terwujudnya peningkatan validasi verifikasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
- Tersalurkanya bantuan dana hibah daerah untuk rehabilitasi sekolah swasta sesuai sasaran;
- Terbentuknya desa berwawasan pendidikan pada 10 Desa;
- Terselenggaranya proses belajar mengajar bagi mahasiswa akademi keperawatan;
- Tersedianya literatur bagi mahasiswa akademi keperawatan sebanyak 221 buku;
- Terlaksananya rehabilitasi ruang dosen, ruang alumnus, gudang dan klinik akademi keperawatan;

- Terlaksananya penelitian, kegiatan PHBI dan pemberian reward mahasiswa akademi keperawatan terbaik; dan
- Terlaksananya rakerda UKS.

Adapun permasalahan pada Urusan Pendidikan adalah dari 16 Desa yang ditargetkan menjadi Desa berwawasan pendidikan hanya 10 Desa yang sudah siap dibina. Solusi atas permasalahan tersebut adalah perencanaan yang lebih baik dan dialihkan ke desa lain yang sudah siap dibina.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pendidikan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditargetkan 84,50% realisasi sebesar 85.42%;
- Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) ditargetkan 95% realisasi sebesar 100%;
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A ditargetkan 95,7% realisasi sebesar 98.68%;
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B ditargetkan sebesar 75.40% realisasi sebesar 85.63%;
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C ditargetkan 90% realisasi sebesar 74,01%;
- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI ditargetkan 0,025% realisasi sebesar 0.02%;
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs ditargetkan 0,1% realisasi sebesar 0.08%;
- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA ditargetkan 0,20% realisasi sebesar 0,25%;
- Angka Kelulusan (AL) SD/MI ditargetkan 100% realisasi sebesar 100%;
- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs ditargetkan 100% realisasi sebesar 100%;
- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA ditargetkan 98% realisasi sebesar 100%;

- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs ditargetkan 97.39% realisasi sebesar 96.81%;
- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/Ma ditargetkan 97% realisasi sebesar 99,49%; dan
- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV ditargetkan 97% realisasi sebesar 97,86 %.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Pendidikan antara lain:

- Target Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK tidak tercapai karena terdapat anak usia 16-17 Tahun yang masih duduk di bangku SMP dan terdapat anak usia 18 Tahun yang sudah lulus SMA. Selain itu, terdapat juga anak usia 16-18 tahun yang sekolah di luar Gresik;
- Target Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK belum tercapai disebabkan kecenderungan pada siswa SMK untuk keluar dari sekolah ketika ada kesempatan untuk bekerja;
- Target Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs belum tercapai antara lain karena sejumlah siswa melanjutkan ke luar daerah, pindah domisili maupun masuk pondok pesantren;

Solusi atas permasalahan tersebut adalah:

- Pendataan terpadu untuk mencakup siswa yang pindah domisili, melanjutkan sekolah di luar daerah dan masuk ke pondok pesantren sehingga bisa diperoleh Angka Melanjutkan Sekolah yang lebih akurat;
- Pemberian beasiswa khususnya bagi siswa SMK agar bisa menamatkan pendidikan tanpa terkendala biaya;

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Pendidikan adalah:

- Nominasi International Mathematic and Science Olympic (IMSO) untuk mata pelajaran Biologi Tingkat SMP di Argentina;
- Nominasi Odyssey of The Mind bidang studi IPA tingkat Sekolah Dasar di Iowa Amerika Serikat;
- Nominasi Odyssey of The Mind bidang studi Biologi tingkat SMA di Iowa Amerika Serikat;

- Nominasi International Mathematic and Science Olympic Tingkat SD untuk program studi IPA;
- Nominasi International Mathematic and Science Olympic Tingkat SD untuk program studi Matematika;
- Nominasi Olimpiade Sains Nasional bidang studi Geografi tingkat SMA;
- Medali Perak pada Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP untuk program studi Biologi;
- Medali Perunggu pada Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP untuk program studi Matematika;
- Nominasi Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP untuk program studi Fisika;
- Nominasi Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP untuk program studi Biologi;
- Nominasi Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD untuk program studi IPA;
- Nominasi LIPI kategori pelajar;
- Juara I Sepak Bola Tingkat Provinsi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah;
- Juara I Senam Putera Tingkat Provinsi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah;
- Juara I Senam Puteri Tingkat Provinsi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah;
- Juara I Renang Putera Tingkat Provinsi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah;
- Juara II Atletik Putri Tingkat Provinsi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah;
- Juara II Bola Volly Puteri Tingkat Provinsi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah;
- Juara II Tennis Lapangan Putera Tingkat Provinsi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah;
- Juara III Bulu Tangkis Tingkat Provinsi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah;
- Juara III Karate Tingkat Provinsi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah;

2. Urusan Kesehatan

Pada Tahun 2014 Urusan Kesehatan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 18 program terdiri 84 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp253.949.776.903,00, realisasi sebesar Rp225.808.483.270,00, tidak terserap sebesar Rp28.141.293.633,00, dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Dinas Kesehatan melaksanakan 15 program terdiri 81 kegiatan dengan alokasi dana sebesar **Rp116.323.481.050,00**, realisasi sebesar Rp94.042.753.150,00, tidak terserap Rp22.280.727.900,00, disebabkan antara lain:

- | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| 1) Efisiensi | Rp. | 18.954.717.090,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp. | 1.844.560.810,00 |
| 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan | Rp. | 1.481.450.000,00 |

2.2. Badan Pengelola Rumah Sakit Ibnu Sina melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp137.626.295.853,00, realisasi sebesar Rp131.765.730.120,00, tidak terserap sebesar Rp5.860.565.733,00, disebabkan antara lain:

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp. | 3.503.047.797,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp. | 2.357.517.936,00 |

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terpenuhinya obat-obatan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan;
- Terlaksananya pendistribusian obat ke 32 Puskesmas;
- Terlaksananya pelayanan kefarmasian sesuai standar pada sarana kesehatan;
- Meningkatnya mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
- Tersedianya peralatan kesehatan/kedokteran di Puskesmas, Pustu dan Ponkesdes sesuai standar;
- Tersedianya fasilitas perbekalan kesehatan, reagen laboratorium dasar, reagen alat canggih, bahan pakai habis, dan reagen kimia klinik di Puskesmas yang memadai;
- Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan pelayanan kesehatan khusus di Puskesmas dan jaringannya;

- Terlaksananya pelayanan kesehatan di Posyandu, Puskesmas Keliling, Upaya Kesehatan Gigi Mulut di Sekolah (UKGS), daerah rawan bencana serta Puskesmas dan jaringannya;
- Terlaksananya pengawasan sarana sanitasi dasar dan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan;
- Tersusunnya laporan evaluasi anggaran kesehatan Puskesmas;
- Terlaksananya pelayanan kesehatan Ibu, Anak, remaja dan KB;
- Terlaksananya rapat perencanaan akreditasi, bimbingan akreditasi, dan pemeliharaan alat laboratorium pada UPT. Laboratorium;
- Terlaksananya pemeriksaan laboratorium makanan kantin serta pengawasan dan pembinaan kantin sekolah;
- Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat;
- Tercapainya peningkatan kualitas Posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam pengembangan Desa Siaga;
- Tersedianya data dan Peta Status Gizi Balita;
- Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk, gizi kurang, dan ibu hamil KEK;
- Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Zat Gizi Mikro lainnya;
- Terlaksananya pemberdayaan masyarakat rangka peningkatan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), ASI Eksklusif, dan koordinasi konselor menyusui;
- Terlaksananya peningkatan perilaku kader masyarakat tentang pemberian makan pada bayi dan anak;
- Terlaksananya pembinaan sanitasi rumah sakit, petugas klinik sanitasi Puskesmas dan pengelola Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Pestisida (TP2) dan Perumahan;
- Tersedianya data kesehatan lingkungan di Puskesmas yang akurat;
- Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan di Puskesmas;

- Terlaksananya sosialisasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tentang Desa Open Defecation Free (ODF) atau terbebas dari buang air besar sembarangan dan sosialisasi program Gresik Kabupaten Sehat;
- Terlaksananya penyemprotan sarang nyamuk untuk membatasi penularan DBD;
- Terlaksananya pengadaan vaksin dan pelayanan pencegahan penanggulangan penyakit menular;
- Terlaksananya imunisasi bayi dan anak sekolah;
- Terlaksananya monitoring program surveilans serta tersusunnya laporan epidemiologi penyakit menular dan tidak menular;
- Terlaksananya evaluasi evaluasi SPM, MDGs dan Lokakarya *Distric Health Account*;
- Terlaksananya pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan dan penyusunan profil kesehatan;
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pemeliharaan Puskesmas ISO;
- Terlaksananya pengadaan komputer, pemeliharaan software, hardware dan jaringan internet Puskesmas;
- Terpeliharanya alat kesehatan/alat kedokteran di Puskesmas;
- Terlaksananya rehabilitasi dan perencanaan pembangunan Puskesmas dan Pustu;
- Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi Polindes/Poskesdes;
- Terlaksananya pembangunan Rumah Sakit di Pulau Bawean;
- Tersedianya perlengkapan dan peralatan dapur gizi di Puskemas;
- Terlaksananya kemitraan asuransi kesehatan masyarakat;
- Terlayaninya pasien Jamkesda JKN di Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya pelayanan perizinan bidang kesehatan;
- Terselenggaranya sosialisasi Puskesmas Santun Lansia dan Lomba Senam Lansia;
- Terlaksananya pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri;

- Terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan terhadap kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga;
- Terlaksananya pengembangan Desa Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dalam Gerakan Sayang Ibu (GSI) tingkat Kecamatan, Donor Darah di Puskesmas, dan Musyawarah Daerah Forkom P4K dalam GSI;
- Tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Gresik;
- Tersedianya tenaga kesehatan di desa, tenaga kesehatan untuk pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap plus dan rawat inap standar;
- Terlaksananya pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita gizi buruk;
- Terlaksananya pendampingan Taman Posyandu;
- Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas se-Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya pembangunan Gedung PONEX dan Ruang Kelas III tahap I; dan
- Tercukupinya kebutuhan alat kedokteran untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit.

Adapun permasalahan pada Urusan Kesehatan adalah:

- Jasa pelayanan untuk tenaga kesehatan di Puskesmas mengalami penurunan atau tidak sesuai dengan target, hal ini dikarenakan jumlah kunjungan pasien umum non BPJS menurun;
- Meningkatnya angka Kematian Ibu disebabkan kurangnya kompetensi petugas dan sarana prasarana di fasilitas kesehatan, serta alur rujukan yang belum optimal; dan
- Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT) pada Dinas Kesehatan tidak terlaksana disebabkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan (Nama Barang

dan Spesifikasi) tidak sesuai dengan Peraturan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, PMK No. 20 Tahun 2009.

Solusi permasalahan pada Urusan Kesehatan adalah:

- Koordinasi lintas bidang antara PSD yang menangani jasa pelayanan tenaga kesehatan bagi pasien BPJS dengan bidang yankes yang menangani jasa pelayanan tenaga kesehatan pasien non BPJS dalam penentuan target jasa pelayanan tenaga kesehatan di Puskesmas;
- Meningkatkan kompetensi petugas dengan pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (PONED), melengkapi sarana prasarana di fasilitas kesehatan, dan mengoptimalkan alur rujukan;
- Merencanakan kegiatan berdasarkan Peraturan serta Perundang-Undangan yang berlaku.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kesehatan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 ditargetkan sebesar 94,00% realisasi 85,31%;
- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani ditargetkan sebesar 80,00% realisasi 101,02%;
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan ditargetkan sebesar 94,00% realisasi 89,86%;
- Cakupan Pelayanan Nifas ditargetkan sebesar 94,00% realisasi 89,31%;
- Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, ditargetkan sebesar 80,00% realisasi 57,74%;
- Cakupan Pelayanan Anak Balita ditargetkan sebesar 85,00% realisasi 74,14%;
- Cakupan Kunjungan Bayi ditargetkan sebesar 90,00% realisasi 98,07%;
- Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ditargetkan sebesar 100% realisasi 92,70%;
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+) ditargetkan sebesar 80% realisasi 55,13%;

- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin ditargetkan sebesar 55,00% realisasi 54,13%;
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Cakupan Balita yang mendapat Vitamin A ditargetkan sebesar 90,00% realisasi 94,67%;
- Persentase Rumah Sehat ditargetkan sebesar 85,00% realisasi 83,43%;
- Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan ditargetkan sebesar 98,46% realisasi 92,91%;
- Pengadaan Obat Esensial ditargetkan sebesar 99,19% realisasi 93,06%;
- Pengadaan Obat Generik ditargetkan sebesar 99,55% realisasi 94,12%;
- Cakupan Rawat Jalan ditargetkan sebesar 52,00% realisasi 68,93%;
- Cakupan Rawat Inap ditargetkan sebesar 1,50% realisasi 0,42%;
- Cakupan Rumah Tangga Sehat ditargetkan sebesar 73,00% realisasi 67,80%;
- Posyandu Purnama ditargetkan sebesar 77,00% realisasi 86,09%.
- Pelayanan pasien jamkesmas dan jamkesda ditargetkan sebesar 10,00% realisasi 7,86%;
- *Bed Occupancy Rate* ditargetkan sebesar 69,90% realisasi 71,58%;
- *Average Length Of Stay* ditargetkan sebesar 4,25 hari realisasi 3,98 hari;
- *Turn Over Internal* ditargetkan sebesar 1,50 hari realisasi 1,56 hari;
- *Bed Turn Over* ditargetkan sebesar 49,79 kali realisasi 66,50 kali.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Kesehatan antara lain:

- Banyaknya ibu hamil yang merupakan penduduk musiman (daerah industri) sehingga lebih memilih untuk melahirkan di kampung halamannya atau di luar Kabupaten Gresik;
- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap resiko yang mungkin muncul pada neonatus dan adanya perbedaan definisi operasional antar petugas;

- Kurangnya kemitraan dengan lintas sektor, sarana prasarana di fasilitas kesehatan dan kompetensi petugas dalam pelayanan anak balita;
- Mobilitas penduduk di wilayah Tambak dan Sangkapura cukup tinggi sehingga mempengaruhi pencapaian pelayanan imunisasi;
- Kurangnya koordinasi dengan petugas kesehatan (bidan, perawat dan kader kesehatan) tentang Rumah Sehat;
- Adanya peningkatan kunjungan pasien sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan obat esensial maupun generik;
- Kunjungan pasien ke puskesmas tidak hanya pasien sakit akan tetapi pelayanan imunisasi, KB dan lain-lain.
- Perubahan pelayanan Jamkesmas menjadi BPJS menyebabkan klaim pembayaran peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), PNS, mandiri, dan ketenagakerjaan dalam satu paket sehingga sulit dipilah-pilah; dan
- Jumlah pasien meningkat dengan hari perawatan lebih pendek.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah:

- Meningkatkan KIE agar ibu hamil tetap memeriksakan kehamilannya dimanapun berada;
- Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat dan penyamaan persepsi antar petugas tentang resiko yang mungkin muncul pada neonatus;
- Meningkatkan koordinasi serta kerjasama lintas sektor, kompetensi petugas dengan pelatihan DDTK dan pengadaan DDTK Kit;
- Meningkatkan kompetensi petugas dengan pelatihan CTU;
- Meningkatkan validitas dalam pelaporan imunisasi;
- Meningkatkan koordinasi dengan petugas kesehatan di Desa;
- Peningkatan anggaran untuk obat sesuai kebutuhan;
- Penyediaan data peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), PNS, mandiri dan ketenagakerjaan secara terpisah.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Kesehatan adalah:

- Lulus kembali sertifikasi ISO 9001:2008 dari WQA;
- Lulus Akreditasi Rumah Sakit 16 Pelayanan

- Pemenang Otonomi Awards 2014 Spesial kategori Environment & Sanitation Tingkat Provinsi;
- Juara I Karya Tulis Ilmiah UKS Tingkat Provinsi;
- Lolos II Tatanan Verifikasi penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi;
- Juara II dan Harapan II Lomba Kader Tiwisada Tingkat Provinsi.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Pada Tahun 2014 Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 20 program terdiri 77 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp465.836.483.863,00, realisasi sebesar Rp405.372.438.182,06, tidak terserap Rp60.464.045.680,94, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1) Efisiensi | Rp. 2.877.722.520,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp. 36.512.319.934,00 |
| 3) Lelang gagal | Rp. 6.470.278.000,00 |
| 4) Kegiatan yang tidak dilaksanakan | Rp. 14.387.303.032,00 |
| 5) Kegiatan Yang kurang bayar | Rp. 216.422.195,00 |

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya Sarana Transportasi Jalan yang memadai pada 70 Ruas Jalan;
- Tersedianya Perencanaan (DED) saluran drainase/gorong-gorong;
- Tersedianya Sarana dan prasarana drainase pada 50 Lokasi di 3 Kecamatan;
- Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kabupaten;
- Terlaksananya Peningkatan/pemeliharaan Infrastruktur jalan (Bantuan Keuangan Provinsi) di 20 ruas;
- Tersedianya dokumen kondisi jalan kabupaten;

- Tersedianya tempat penyimpanan alat berat;
- Tersedianya kendaraan operasional penunjang sarana dan prasarana kebinamargaan sebanyak 5 unit;
- Tersedianya Alat Laboratorium kebinamargaan sebanyak 12 unit;
- Tersedianya Data Test Laboratorium jalan dan jembatan untuk kegiatan proyek di 116 lokasi;
- Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat sebanyak 14 unit;
- Terlaksananya pemasangan dan perawatan PJU di 16 Kecamatan;
- Tertatanya perijinan dan penggunaan kekayaan daerah sebanyak 3 macam perijinan;
- Tersedianya komponen jalan yang memadai di ruas jalan kabupaten;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan air Bersih di 24 lokasi;
- Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi pintu air di 3 Kecamatan, meliputi Rehabilitasi Dam Kalitopo III dan Dam Kali Topo 5 serta Pembangunan Pintu Air Rolak.
- Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Irigasi sebanyak 20 bangunan saluran irigasi;
- Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan Pintu Air Waduk Wahas, waduk Hendrosari, Waduk Wedoro, dan Saluran Irigasi Mentaras
- Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Irigasi yang terbangun di 19 Jaringan;
- Terlaksananya evaluasi pengajuan ijin pemanfaatan tanah pengairan sebanyak 91 ijin;
- Terlaksananya pengamanan antara batas tanah waduk dan tanah warga sebanyak 15 lokasi di 9 Kecamatan;
- Tersedianya sajian informasi berupa papan irigasi di 4 kecamatan;
- Terlaksananya pembinaan petugas dan anggota HIPPA di bidang sumber daya air sebanyak 38 anggota HIPPA;
- Terlaksananya pengamanan batas tanah negara sebanyak 23 lokasi di 12 Kecamatan (Bantuan Keuangan);

- Terbangunnya embung dan bangunan penampung air lainnya sebanyak 4 bangunan di 3 Kecamatan;
- Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya di 13 Waduk/Embung;
- Terlaksananya rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau di 11 Kecamatan;
- Tersusunnya dokumen perencanaan infrastruktur pengolahan air limbah sebanyak 11 dokumen;
- Terlaksananya fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah;
- Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pembinaan program sanitasi berbasis masyarakat;
- Tersedianya sarana dan prasarana air bersih di 4 Kecamatan;
- Terlaksananya peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/kali di 31 Saluran Pembuang;
- Terlaksananya pembangunan/peningkatan infrastruktur perkotaan sebanyak 18 lokasi;
- Terlaksananya revitalisasi kawasan religius di 5 lokasi;
- Terlaksananya pembangunan Stadion Olah Raga di Kabupaten Gresik sebesar 81,162 %;
- Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan perdesaan di 117 lokasi;
- Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan di 29 lokasi;
- Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan di 17 lokasi;
- Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi saluran lingkungan permukiman sebanyak 40 lokasi di 16 Kecamatan;
- Terlaksananya penerbitan Sertifikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebanyak 200 sertifikat;
- Terlaksananya sosialisasi tentang regulasi dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi terhadap 13 Asosiasi;
- Tersedianya Dokumen Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong sebanyak 9 dokumen;
- Terlaksananya pemeliharaan drainase/gorong-gorong di 36 lokasi;

- Tersedianya Dokumen Perencanaan Program ke PU-an yang disusun dalam setahun sebanyak 6 dokumen;
- Tersedianya dokumen standar harga satuan;
- Tercapainya operasional pengamanan prasarana dan sarana ke PU-an di 4 cabang dinas;
- Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi penguatan kelembagaan di 103 Desa/Kelurahan Sasaran Program PNPM Perkotaan;
- Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi penataan lingkungan berbasis komunitas di 8 Desa.
- terlaksananya program pengembangan Infrastruktur perdesaan (PPIP) di 25 desa;
- Terlaksananya pembangunan Infrastruktur di bidang irigasi, air minum, sanitasi melalui dana DAK;

Adapun permasalahan pada Urusan Pekerjaan Umum adalah:

- Pada kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten sebagian anggaran tidak terserap disebabkan pekerjaan tidak sesuai kontrak sehingga dilakukan pemutusan kontrak;
- Terdapat beberapa kegiatan tidak dilaksanakan disebabkan gagal lelang antara lain 7 paket pengadaan penerangan jalan umum dan penyediaan Prasarana dan sarana air limbah IPAL Randu Agung;
- Pada kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/air minum terjadi pemutusan kontrak/perjanjian karena pada 3 titik lokasi pengeboran terkendala terhadap lapisan batu yang tidak dapat ditembus oleh alat bor;
- Pembangunan WEP tahap II belum selesai hingga berakhirnya tahun anggaran sehingga dana tidak terserap.

Solusi permasalahan pada Urusan Urusan Pekerjaan Umum adalah:

- Anggaran tidak diserap dan diusulkan dianggarkan kembali;
- Dilakukan addendum pekerjaan pembangunan WEP tahap II;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 73,00%, realisasi 78,39%;
- Jembatan kabupaten dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 95,81%, realisasi 91,43%;
- Panjang jalan poros desa yang terbangun ditargetkan sebesar 100,00% realisasi 94,47%
- Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Gresik dalam Kondisi Baik ditargetkan sebesar 54,00%, realisasi 54,03%;
- Panjang Saluran Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik ditargetkan sebesar 82,09%, realisasi 62,98%;

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM urusan pekerjaan umum antara lain pada indikator kinerja saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik tidak dapat tercapai karena pembebasan lahan terhambat akibat belum tercapainya kesepakatan harga dengan masyarakat pemilik lahan. Solusi atas permasalahan tersebut adalah dilakukan Appraisal ulang.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Pekerjaan Umum adalah Penghargaan Otonomi Award Kategori Bidang Sanitasi dari Jawa Pos Institut Pro Otonomi (JPIP).

4. Urusan Perumahan Rakyat

Pada Tahun 2014 Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 14 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp27.856.455.200,00 realisasi sebesar Rp15.731.227.735,00, tidak terserap Rp12.125.227.465,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 4.1. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 6 program terdiri 11 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp27.464.022.200,00, realisasi sebesar Rp15.355.204.135,00, tidak terserap Rp12.108.818.065,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp. 1.159.577.106,00
- 2) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp. 10.949.240.959,00

4.3. Dinas Sosial melaksanakan 1 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp392.433.000,00, realisasi sebesar Rp376.023.600,00 tidak terserap Rp16.409.400,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana serta pengelolaan rusunawa;
- Terlaksananya Operasional Bansos Pemugaran Rumah Masyarakat Kurang Mampu;
- Tersedianya Infrastruktur Pengolahan Limbah Komunal yang layak dan terjangkau di Desa Betoyoguci Kecamatan Manyar;
- Tersedianya sarana sanitasi yang layak di 6 lokasi lingkungan permukiman;
- Terselenggaranya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran sebanyak 420 peserta;
- Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran di Wilayah Gresik Utara dan Gresik Selatan;
- Tersedianya sarana dan prasarana pemakaman meliputi pengadaan keranda, pembangunan pagar dan paving jalan makam;
- Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan PMK; dan
- Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan.

Adapun permasalahan pada Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagian besar pengembang belum tertarik dengan Program Subsidi KPR Pemerintah untuk menjual rumah dengan harga maksimal Rp88.000.000,00 per unit untuk rumah sederhana. Solusi permasalahan ini yaitu sosialisasi yang lebih intens terhadap pengembang.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perumahan Rakyat pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Rumah Tangga Pengguna Air Bersih ditargetkan sebesar 75,00%, realisasi 75,02%;
- Lingkungan Permukiman Kumuh ditargetkan sebesar 14,00% realisasi 13,90%;
- Rumah Layak Huni ditargetkan sebesar 91,00%, realisasi 90,82%.

5. Urusan Penataan Ruang

Pada Tahun 2014 Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Badan Penanaman Modal dan Perijinan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 18 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp4.466.103.360,00, realisasi sebesar Rp4.284.817.695,00, tidak terserap Rp181.285.665,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 5.1. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 3 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.536.023.760,00, realisasi sebesar Rp1.527.685.560,00, tidak terserap Rp8.338.200,00, disebabkan adanya sisa lelang.
- 5.2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 2 program terdiri 9 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.450.310.000,00, realisasi Rp2.348.790.407,00, tidak terserap Rp101.519.593,00, disebabkan antara lain:
 - 1) Efisiensi Rp. 65.044.593,00
 - 2) Sisa Lelang Rp. 36.475.000,00
- 5.3. Badan Penanaman Modal dan Perizinan melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp479.769.600,00, realisasi Rp408.341.728,00, tidak terserap Rp71.427.872,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- Tersusunnya rancangan pedoman penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
- Tersusunnya rancangan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang sebanyak 9 dokumen;
- Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang;
- Tertatanya Kawasan Kota Lama Gresik;
- Terlaksananya pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Tersusunnya dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Ujungpangkah-Panceng dan BWP Perkotaan Gresik;
- Tersusunnya Naskah Akademis dan ranperda RDTR BWP Dudusampeyan-Cerme dan BWP Gresik Selatan;
- Terpeliharanya Sistem GIS penataan dan pemanfaatan ruang;
- Tersusunnya rencana rinci tata ruang kawasan jalan Lingkar Barat Gresik;
- tersusunnya naskah akademis dan ranperda lahan pertanian pangan yang berkelanjutan;
- Terlaksananya pemrosesan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (SK Ijin Site Plan dan IMB) dan pembinaan sebanyak 494 ijin;
- Terlaksananya upgrade sistem informasi manajemen ijin mendirikan bangunan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Penataan Ruang pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Perda RTRW Kabupaten Gresik sudah disahkan pada Tahun 2011; dan
- Perubahan pemanfaatan fungsi kawasan RTRW target Tahun 2014, ada realisasi ada.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Pada Tahun 2014 Urusan Perencanaan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Sekretariat Daerah; dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 10 program terdiri 60 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.134.782.000,00, realisasi sebesar Rp8.663.985.619,00 tidak terserap Rp470.796.381,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 6.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 9 program terdiri 45 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp7.983.718.500,00 realisasi sebesar Rp7.572.065.869,00 tidak terserap Rp411.652.631,00, disebabkan antara lain:
 - 1) Efisiensi Rp. 285.376.581
 - 2) Sisa Lelang Rp. 126.276.050
- 6.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.042.063.500,00 realisasi sebesar Rp985.283.250,00 tidak terserap Rp56.780.250,00 disebabkan adanya efisiensi sebesar Rp56.780.250,00
- 6.3. Kecamatan Manyar melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, realisasi sebesar Rp20.000.000,00
- 6.4. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.354.000,00 tidak terserap Rp646.000,00 disebabkan adanya efisiensi.
- 6.6. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00
- 6.7. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00

- 6.8. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.000.000,00
- 6.9. Kecamatan Kedamean melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp.10.000.000,00
- 6.10. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00
- 6.11. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00
- 6.12. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp8.300.000,00 tidak terserap Rp1.700.000,00 disebabkan adanya efisiensi.
- 6.13. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.982.500,00 tidak terserap Rp17.500,00 disebabkan adanya efisiensi.
- Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:
- Tersusunnya Buku Informasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Tersedianya *User History Report*;
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi program sektor sanitasi yang sesuai dengan dokumen memorandum program sektor sanitasi;
 - Tersedianya dokumen Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Barat;
 - Tersusunnya buku Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
 - Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2015;

- Tersusunnya Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2013;
- Tersusunnya Buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Terlaksananya fasilitasi penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 sebanyak 85 peserta;
- Tersusunnya Buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN pembangunan;
- Tersusunnya Buku KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2014 dan KUA-PPAS Tahun 2015;
- Tersusunnya Dokumen Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya Bimtek Perencanaan dan Penganggaran untuk 57 SKPD;
- Terlaksananya Lokakarya Pengkajian Keadaan Desa dalam Rangka Integrasi Perencanaan Pembangunan sebanyak 392 Peserta;
- Tersusunnya Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah;
- Tersusunnya Dokumen Indikator Ekonomi Daerah;
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi sebanyak 30 orang;
- Terlaksananya pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengembangan kawasan Agropolitan dan Minapolitan;
- Tersusunnya laporan identifikasi bantuan permodalan dan peralatan pada UKM;
- Terlaksananya Forum Data Peningkatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Penanggulangan Kemiskinan;
- Tersusunnya Buku laporan pengendalian program bantuan pengentasan kemiskinan
- Tersusunnya Buku laporan penanggulangan kemiskinan daerah LP2KD Kabupaten Gresik
- Terlaksananya Fasilitasi Tim Koordinasi Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan
- Tersusunnya Buku PJM Pronangkis;

- Tersusunnya Buku Perencanaan Tenaga Kerja Daerah;
- Tersusunnya Dokumen rencana Induk Pengelolaan Irigasi;
- Tersusunnya Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum;
- Terpasangnya Pilar Batas dan Peta Kelurahan dan Desa di Kecamatan Menganti, Cerme, Benjeng dan Balongpanggang;
- Tersusunnya Buku LPPD Kabupaten Gresik Tahun 2013;
- Tersusunnya Laporan kinerja Pemerintah Daerah; dan
- Tercapainya Sinkronisasi Program Pembangunan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Tersedianya RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- Program RKPD yang diakomodir dalam APBD ditargetkan sebesar 90,00% realisasi 100%.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Perencanaan Pembangunan adalah Piagam Penghargaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional Kategori sangat tinggi.

7. Urusan Perhubungan

Pada Tahun 2014 Urusan Perhubungan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 12 program terdiri 52 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp10.678.215.000,00, realisasi sebesar Rp10.007.779.850,00, tidak terserap Rp670.435.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

7.1. Dinas Perhubungan melaksanakan 12 program terdiri 51 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.658.405.000,00, realisasi sebesar Rp9.987.969.900,00, tidak terserap Rp670.435.100,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi	Rp. 276.107.940,00
2) Sisa Lelang	Rp. 394.327.160,00

7.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp19.810.000,00, realisasi sebesar Rp19.809.950,00 tidak terserap Rp50,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya operasional pengelolaan terminal angkutan darat, operasional kepelabuhanan, operasional pengawasan dan pemantauan angkutan sungai dan penyeberangan, operasional pengendalian tertib lalu lintas, operasional pengawasan peraturan angkutan barang dan minerba, dan operasional UPT Di Bawean;
- Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Pengujian kendaraan bermotor;
- Tersusunnya Buku Database Dinas Perhubungan;
- Terlaksananya pemeliharaan gedung balai pengujian kendaraan bermotor, terminal Gubernur Suryo dan terminal Bunder, alat pengendali isyarat lalu lintas (APILL), marka jalan, rambu – rambu lalu lintas dan halte angkutan;
- Tersedianya peralatan keamanan dan P3K pada Armada Angkutan sebanyak 200 Unit;
- Terpilihnya awak kendaraan umum teladan Tahun 2014;
- Tersedianya fasilitas penunjang pengelolaan parkir;
- Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perkapalan sebanyak 90 orang dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Laut sebanyak 40 orang;
- Tersedianya data angkutan orang/barang yang up to date;
- Terlaksananya Pembangunan Pintu Gerbang Terminal Bunder dan pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas meliputi Traffic Light, Flash Light, Rambu, Marka dan Guard Rail di 17 lokasi;
- Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di 6 Kecamatan;
- Terlaksananya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi; dan
- Terpasangnya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas melalui Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perhubungan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Persentase Ketersediaan Angkutan Darat ditargetkan sebesar 100%, realisasi 100%;
- Persentase Ketersediaan Rambu–Rambu Lalu Lintas ditargetkan sebesar 50,00%, realisasi 52,08%;
- Persentase Angkutan Umum darat dalam kondisi layak jalan ditargetkan sebesar 72,00%, realisasi 72,49%;
- Ketersediaan Angkutan Laut Penyeberangan Target ditargetkan sebesar 154,20%, realisasi 195,11%;
- Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean ditargetkan sebesar 100%, realisasi 100%;
- Persentase Permasalahan Bidang Perhubungan yang diselesaikan ditargetkan sebesar 100%, realisasi 100%.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Pada Tahun 2014 Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 12 program terdiri 46 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp29.239.199.000,00, realisasi sebesar Rp27.357.291.403,00, tidak terserap Rp1.881.907.597,00 dengan rincian sebagai berikut:

8.1. Badan Lingkungan Hidup melaksanakan 12 program terdiri 49 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp28.651.704.000,00, realisasi sebesar Rp26.787.391.503,00, tidak terserap Rp1.864.312.497,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1) Efisiensi | Rp. 852.891.497,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp. 779.800.000,00 |
| 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan | Rp. 231.621.000,00 |

8.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp587.495.000,00, realisasi sebesar Rp569.899.900,00, tidak terserap Rp17.595.100,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1) Efisiensi | Rp. 12.631.500,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp. 4.963.600,00 |

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya sarana prasarana pengolahan persampahan di 5 Kecamatan;
- Terlaksananya pengelolaan sampah dengan volume 725 m3/hari;
- Terlaksananya sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di 40 desa/kelurahan pada 2 Kecamatan;
- Terlaksananya pembinaan pengelolaan sampah sebanyak 30 orang di 2 Kecamatan;
- Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana TPA;
- Terlaksananya pengiriman Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan cetak karcis retribusi kebersihan;
- Terlaksananya penilaian Kota Sehat;
- Terlaksananya Workshop Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terawasinya kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
- Terlaksananya Workshop Pengelolaan B3 dan pemantauan insidentil pelaku usaha berpotensi menghasilkan limbah B3;
- Terlaksananya integrasi pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam dunia usaha di 25 perusahaan;
- Terlaksananya workshop penyusunan Amdal;
- Tersedianya alat laboratorium yang bersertifikat komite akreditasi nasional dan terpenuhinya persyaratan laboratorium lingkungan;
- Terlaksananya workshop dan tersedianya buku panduan terkait peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian pantai dan laut;

- Terlaksananya studi komparasi dan workshop terkait pengendalian kerusakan hutan dan lahan;
- Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan biopori sebanyak 35 sumur resapan dan 135 biopori;
- Tersedianya pohon penghijauan untuk reklamasi pasca tambang dan pembenahan infrastruktur menuju kawasan wisata sebanyak 10.000 pohon;
- Terlaksananya sosialisasi dan pameran Lingkungan Hidup;
- Tersusunnya Buku SPM Bidang Lingkungan Hidup, Inventarisasi Biomassa dan Pembuatan Peta Kerusakan Lahan;
- Tersusunnya buku Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Kabupaten Gresik Tahun 2014 ;
- Terlaksananya uji emisi kendaraan bermotor roda empat sebanyak 230 sampel;
- Terselesaikannya kasus pencemaran dan sengketa lingkungan sebanyak 9 kasus;
- Terlaksananya workshop pengelolaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- Terlaksananya penataan taman kota ruang terbuka hijau di 2 Kecamatan;
- Terlaksananya pemeliharaan taman dan jalur hijau kota di 4 Kecamatan;
- Terlaksananya penataan taman dan penambahan area RTH di 3 Kecamatan Kota;
- Terlaksananya pembinaan pengelolaan hasil samping tembakau/sampah sebanyak 45 orang;
- Tersusunnya Buku Laporan Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan dan Keanekaragaman hayati laut;
- Tersusunnya Buku kajian Kebijakan Sumber Daya Alam;
- Tersedianya Alat Biopori sebanyak 200 buah dan sumur resapan 15 titik dalam rangka rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA; dan

- Tersusunnya Buku hasil kajian pengembangan kawasan KARST.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Luas Lahan Kritis ditargetkan seluas 5.746 Ha, realisasi 8.254 Ha;
- Rasio Luas Kawasan Lindung ditarget sebesar 10,00%, realisasi 18,19%;
- Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air ditargetkan sebanyak 63 perusahaan realisasi sebanyak 60 Perusahaan;
- Jumlah usaha/kegiatan yang melaporkan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara sebanyak 175 Perusahaan realisasi sebanyak 199 Perusahaan;
- Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan ditargetkan seluas 717,35 Ha realisasi 717,75 Ha;
- Penanganan sampah ditargetkan sebanyak 92,00% realisasi 94,12%;
- Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk ditargetkan sebanyak 0,030 m3/penduduk realisasi 0.056 m3/penduduk; dan
- Jumlah Tempat Pengolahan Sampah (TPS) ditargetkan 100 unit realisasi 103 unit.

Prestasi yang diperoleh pada urusan lingkungan hidup adalah :

- Piagam penghargaan Sekolah Adiwiyata untuk 3 (tiga) SMA, Sekolah Adiwiyata Mandiri untuk 1 (satu) SD, 2 (dua) SMP, dan 3 (tiga) SMA Tingkat Nasional.

9. Urusan Pertanahan

Pada Tahun 2014 Urusan Pertanahan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 5 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp6.433.479.050,00, realisasi sebesar Rp2.683.161.670,00, tidak terserap Rp3.750.317.380,00 disebabkan antara lain:

- | | | |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp. | 404.308.230,00 |
| 2) Kegiatan yang tidak dilaksanakan | Rp. | 3.346.009.150,00 |

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya lahan untuk pembangunan Lapter Bawean dan Bendung Gerak Sembayat;
- terselesaikannya konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Gresik sebanyak 13 kasus.

Adapun permasalahan pada Urusan Pertanahan adalah:

- Pengadaan tanah untuk Tanggul Kali Lamong belum terealisasi karena kesepakatan harga tanah belum tercapai, masyarakat menuntut harga yang lebih tinggi dari harga appraisal yang telah ditetapkan.
- Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah tidak dilaksanakan karena jalan Mengare merupakan jalan Kabupaten yang kurang dari 5 hektar sehingga proses pelebaran dapat dilaksanakan oleh SKPD terkait sedangkan untuk jalan di Pulau Bawean tidak dilaksanakan karena terjadi Bencana alam longsor dan harus dibuat jalan baru.

Solusi permasalahan pada Urusan Pertanahan adalah untuk pengadaan tanah tanggul Kali Lamong dilakukan penaksiran harga tanah (appraisal) ulang sedangkan untuk kegiatan perencanaan pengadaan tanah dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pertanahan Tahun 2014 adalah penyelesaian kasus tanah negara ditargetkan 0% realisasi 0%.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada Tahun 2014 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 51 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp5.218.388.250,00, realisasi sebesar Rp4.482.427.447,00, tidak terserap Rp735.960.803,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 10.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 1 program terdiri 34 kegiatan dengan alokasi dana sebesar

Rp5.044.488.250,00, realisasi sebesar Rp4.311.534.547,00, tidak terserap Rp732.953.703,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp. 445.431.048,00
- 2) Sisa Lelang Rp. 242.100.155,00
- 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp. 45.422.500,00

- 10.2. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.000.000,00, realisasi sebesar Rp5.000.000,00,
- 19.3. Kecamatan Kebomas melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00,
- 19.4. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00,
- 19.5. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.354.000,00, tidak terserap Rp646.000,00, disebabkan efisiensi;
- 19.6. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00,
- 19.7. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.991.900,00, tidak terserap Rp8.100,00, disebabkan efisiensi;
- 19.8. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.000.000,00,
- 19.9. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00,

- 19.10. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00,
- 19.11. Kecamatan Kedamean melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp.10.000.000,00,
- 19.12. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,00, realisasi sebesar Rp.15.000.000,00,
- 19.13. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00,
- 19.14. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00,
- 19.15. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00,
- 19.16. Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.900.000,00, realisasi sebesar Rp9.900.000,00,
- 19.17. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp7.710.000,00, tidak terserap Rp2.290.000,00, disebabkan efisiensi;
- 19.18. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.937.000,00, tidak terserap Rp63.000,00, disebabkan efisiensi;
- Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:
- Tersusunnya dokumen kerangka indikator dan kebijakan tentang kependudukan;
 - Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan kependudukan tentang Mobilitas dan Mutasi Penduduk;

- Tercapainya kesinambungan Standart ISO 1991:2008;
- Terlaksananya Program Nasional KTP-elektronik;
- Tercatat dan Tersusunnya Arsip Akta Catatan Sipil;
- Terlaksananya Sidang Pencatatan Perkawinan sebanyak 70 kutipan;
- Terlaksananya verifikasi dan validasi data kependudukan dan catatan sipil;
- Terlaksananya pemeliharaan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK);
- Tersedianya dokumentasi, replika dan data warehouse kependudukan;
- Terlaksananya pemeliharaan jaringan dan perangkat keras SIK;
- Tersedianya Sistem Pelaporan Data Kependudukan yang berkesinambungan dan akurat;
- Tersusunnya Dokumen Proyeksi Data Kependudukan;
- Tersajinya Informasi Kependudukan di Kecamatan;
- Terlaksananya Sosialisasi Perda tentang Kependudukan;
- Terbinanya Perangkat Desa tentang Sistem Pendataan dan Pelaporan Kependudukan;
- Terlaksananya Sosialisasi Kepengurusan dan Pengadministrasian KTP dan KSK;
- Tersedianya Laporan Kependudukan yang baik dan akurat; dan
- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Data Kependudukan;

Adapun permasalahan pada Urusan Kependudukan adalah:

- Untuk pelaksanaan KTP-elektronik, terdapat anggaran yang tidak diserap karena terdapat anggaran yang sama di APBN TA 2014 (pengadaan tinta toner KTP-elektronik); dan
- Untuk Sosialisasi Pencatatan Perkawinan belum bisa dilaksanakan karena Peraturan Presiden tentang Pencatatan Perkawinan belum diterbitkan.

Solusi permasalahan pada Urusan Kependudukan adalah:

- Pelaksanaan KTP-elektronik tidak dilanggarkan pada APBD TA 2015 menyelaraskan penganggaran pada APBN TA 2015, namun apabila tidak dianggarkan pada APBN TA 2015 akan dialokasikan pada APBD TA 2015

- Sosialisasi pencatatan perkawinan dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2015.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Kepemilikan KTP ditargetkan sebesar 92,00% realisasi 97,48%;
- Cakupan Penerbitan Akta kelahiran ditargetkan sebanyak 95,24% realisasi sebanyak 168.86%;
- Pengurusan KTP ditargetkan 1 hari realisasi 1 hari.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Tahun 2014 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 17 program terdiri 21 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp627.936.850,00, realisasi sebesar Rp612.581.850,00, tidak terserap Rp15.355.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

11.1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan 4 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp444.186.750,00, realisasi sebesar Rp429.536.750,00, tidak terserap Rp14.650.000,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1) Efisiensi | Rp. 13.915.000,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp. 735.000,00 |

11.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp28.750.100,00, realisasi sebesar Rp28.750.100,00.

11.3. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.

- 11.4. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 11.5. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 11.6. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 11.7. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 11.8. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 11.9. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 11.10. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 11.11. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00.
- 11.12. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, realisasi sebesar Rp20.000.000,00.
- 11.13. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.295.000,00, tidak terserap Rp705.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

11.14. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00,

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya fasilitasi perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak sebanyak 55 orang;
- Terselenggaranya Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Sosialisasi Focal Point Gender (FPG) sebanyak 70 orang;
- Terlaksananya Temu Kreatifitas Anak dalam upaya pemahaman anak tentang pemenuhan hak-hak anak sebanyak 750 anak;
- Terlaksananya fasilitasi layanan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan sebanyak 150 orang;
- Terselenggaranya Evaluasi Gerakan Sayang Ibu dan Pembinaan P2WKSS;
- Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebanyak 32 orang;
- Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Peran Caleg Perempuan dalam Pembangunan sebanyak 250 orang;
- Terlaksananya Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Gresik;
- Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di 10 Kecamatan;
- Terlaksananya Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kecamatan Driyorejo;
- Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan di Kecamatan Menganti; dan
- Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender di Kecamatan Ujung Pangkah.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan ditargetkan sebesar 94% realisasi 94,38%;
- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan Rumah Sakit ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi ditargetkan sebesar 89% realisasi 100%;
- Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi ditargetkan sebesar 40% realisasi 100%.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pada Tahun 2014 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 12 kegiatan dengan alokasi dana sebesar **Rp3.009.700.500,00**, realisasi sebesar Rp2.957.935.575,00, tidak terserap Rp51.764.925,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1) Efisiensi | Rp. 12.304.900,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp. 39.460.025,00 |

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tercapainya peserta KB sesuai dengan PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) sebanyak 100 orang;

- Terlaksananya penyuluhan TMKK dan PKK KB Kes sebanyak 100 orang;
- Terlaksananya pembinaan kelompok remaja tentang KIE sebanyak 18 kelompok;
- Terselenggaranya pembinaan kelompok remaja peduli KB sebanyak 30 orang;
- Terlaksananya Monitoring Pendataan Keluarga Sejahtera;
- Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat peduli KB sebanyak 3908 petugas lapangan dan pembinaan;
- Terlaksananya KIE keluarga sejahtera sebanyak 12 kali;
- Terbentuknya kelompok PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) sebanyak 20 kelompok;
- Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita di Kecamatan sebanyak 96 orang;
- Terlaksananya Pelatihan Kelompok Bina Keluarga dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga bagi anggota UPPKS sebanyak 50 orang;
- Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana, dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja; dan
- Terlaksananya pelayanan kesehatan alat kontrasepsi KB Pasca Salin.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Prevalensi peserta KB Aktif ditargetkan sebesar 78,45% realisasi 78,77%;
- Cakupan Pasangan Usaha Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun ditargetkan sebesar 1,12% realisasi 0,98%;
- Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi atau *unmeet need* ditargetkan sebesar 21,35% realisasi 12,14%;
- Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ditargetkan sebesar 21,50% realisasi 93,48%;
- Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah:

- Juara II Lomba KB Perusahaan Tingkat Nasional;
- Juara Manggala Satya Kencana Ketua Penggerakan PKK Peduli KB – TP PKK Tingkat Nasional;
- Juara I Lomba KB Perusahaan Tingkat Provinsi;
- Juara III Lomba MKJP Perusahaan Tingkat Provinsi;
- Juara III Lomba KB Pasca Salin Tingkat Provinsi; dan
- Juara III Lomba Duta Mahasiswa Tingkat Provinsi.

13. Urusan Sosial

Pada Tahun 2014 Urusan Sosial di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 25 program terdiri 37 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.443.011.500,00, realisasi sebesar Rp4.819.907.450,00, tidak terserap Rp623.104.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 13.1. Dinas Sosial melaksanakan 6 program terdiri 17 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.511.362.000,00, realisasi sebesar Rp2.281.694.800,00, tidak terserap Rp229.667.200,00, disebabkan efisiensi;
- 13.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.754.685.500,00, realisasi sebesar Rp2.366.200.000,00, tidak terserap Rp388.485.500,00, disebabkan efisiensi;
- 13.3. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.4. Kecamatan Kebomas melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;

- 13.5. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.6. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.354.000,00, tidak terserap Rp646.000,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 13.7. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.8. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.989.650,00, tidak terserap Rp10.350,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 13.9. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.10. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.11. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 13.12. Kecamatan Kedamean melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.13. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00;

- 13.14. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.15. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.16. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.17. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp7.000.000,00, realisasi sebesar Rp .7.000.000,00;
- 13.17. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp5.720.000,00, tidak terserap Rp4.280.000,00, disebabkan efisiensi;
- 13.18. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.964.000,00, realisasi sebesar Rp9.949.000,00, tidak terserap Rp15.000,00, disebabkan efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya fasilitasi pendamping PKH dalam pembinaan RTSM yang diberi bantuan sebanyak 85 PKH dan 105 orang;
- Tersedianya bantuan bagi keluarga sangat miskin sebanyak 120 ekor kambing/30KK;
- Tersedianya keluarga rentan yang diberi bantuan sebanyak 90 orang;
- Tersedianya bantuan terhadap lanjut usia sebanyak 70 orang;
- Tersusunnya buku tentang pendataan masyarakat berkebutuhan khusus (disable);
- Tersusunnya validitas data 10 jenis PMKS di Kabupaten Gresik;
- Tersedianya pelayanan terhadap PMKS untuk seleksi PSBR dan Tetirah sebanyak 64 orang;

- Terlaksananya penanganan masalah-masalah yang menyangkut tanggap darurat;
- Terbinanya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);
- Tersedianya bantuan bagi penyandang cacat sebanyak 60 orang;
- Tersedianya bantuan tambahan gizi bagi anak panti asuhan terhadap 8 panti asuhan;
- Tersedianya bantuan usaha bagi legiun veteran, janda veteran, dan perintis kemerdekaan;
- Terlaksananya rehabilitasi PMKS di sebanyak 300 orang;
- Tersedianya bantuan UEP bagi peserta pembinaan dan karang taruna sebanyak 70 orang dan 18 Karang Taruna;
- Terlaksananya wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 50 orang berupa bantuan ternak kambing;
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan raskin dan santunan kematian;
- Terlaksananya rapat validasi data RTM; dan
- Terwujudnya Pembinaan Operasional Raskin;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Sosial Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi ditargetkan sebesar 19 unit realisasi 17 unit;
- Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial ditargetkan 435 PMKS realisasi 1.281 PMKS;
- Jumlah PMKS diestimasi sebanyak 67.352 jiwa realisasi 38.987 jiwa;
- Bantuan santunan kematian ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Jumlah hari besar agama yang dirayakan ditargetkan sebanyak 5 kegiatan realisasi 5 kegiatan;
- Bantuan sarana ibadah ditargetkan sebesar 90% realisasi 100%;
- Penyaluran Raskin ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Sosial pada sarana sosial adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin panti. Adapun solusi atas permasalahan tersebut adalah perlunya sosialisasi peraturan pengelolaan panti kepada masyarakat.

14. Urusan Ketenagakerjaan

Pada Tahun 2014 Urusan Ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 21 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp5.931.730.000,00, realisasi sebesar Rp5.590.902.841,00 tidak terserap Rp340.827.159,00 disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1) Efisiensi | Rp. 65.178.059,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp. 271.649.100,00 |

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya kegiatan Job Fair sebanyak 1 kali;
- Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sejumlah 112 orang;
- Tercapainya peningkatan pemahaman dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan pencari kerja pada 60 orang pencari kerja;
- Terciptanya tenaga kerja terampil yang siap pakai sejumlah 96 orang;
- Terciptanya kelompok kerja yang produktif sebanyak 60 orang;
- Tersusunnya laporan bulanan Informasi Pasar Kerja;
- Terlaksananya pembinaan lanjutan dan ekspos produk kewirausahaan pada 18 kelompok usaha;
- Terlaksananya pembinaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada 5 lembaga dan 200 Calon TKI;
- Terlaksananya pendataan tenaga kerja asing pada 50 perusahaan;
- Terlaksananya fasilitasi pendaftaran pencari kerja penyandang cacat, pendaftaran/pencarian lowongan kerja penyandang cacat;

- Terlaksananya pencegahan perselisihan hubungan industrial sebanyak 55 kasus;
- Terlaksananya pembinaan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja di 50 perusahaan;
- Terwujudnya standar upah yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak;
- Tersusunnya Buku Usulan dan Saran teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan hasil kegiatan LKS Tripartit serta jumlah peserta sosialisasi LKS Bipartit;
- Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan norma-norma ketenagakerjaan pada 50 perusahaan dan 260 pemeriksaan;
- Terlaksananya sosialisasi peningkatan sumber daya manusia sebanyak 50 orang anggota serikat pekerja / serikat buruh; dan
- Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan dan Pengolahan LKS Bipartit di Perusahaan sebanyak 30 orang.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2014 , adalah sebagai berikut:

- Tingkat partisipasi angkatan kerja ditargetkan sebesar 67,51% realisasi 63.66%;
- Pencari kerja yang ditempatkan ditargetkan sebesar 32,33% realisasi 83.16%;
- Angka pengangguran penduduk usia 15-24 tahun ditargetkan sebesar 20,12% realisasi 3.02%;
- Kepatuhan terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditargetkan sebesar 70,44% realisasi 68,67%;
- Kepatuhan Terhadap Norma kerja ditargetkan sebesar 87,50% realisasi 96,83%;
- Kepatuhan Terhadap Norma Jaminan Sosial Tenaga kerja ditargetkan sebesar 94,28% realisasi 97.81%;
- Angka Kecelakaan Kerja ditargetkan sebesar 2,82% realisasi 1,14%;
- Angka Penuntasan/penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditargetkan sebesar 100% realisasi 88.30%;

- Pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama ditargetkan sebesar 8,47% realisasi 8,40%; dan
- Kepatuhan atas ketentuan mengenai Kepemilikan Lembaga Kerjasama Bipartit ditargetkan sebesar 3,71% realisasi 46,67%.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Ketenagakerjaan antara lain:

- Mindset perusahaan yang masih menganggap K3 sebagai *cost* bukan *asset*;
- Masih banyaknya pelanggaran normatif yang dilakukan oleh perusahaan terutama perusahaan skala menengah ke bawah terkait dengan UMK dan norma kerja lainnya;
- Masih adanya perusahaan-perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjaanya pada program BPJS Ketenagakerjaan;
- Masih ada perusahaan yang belum menerapkan norma K3 di tempat kerja;
- Dari 94 perlisihan yang masuk ke Disnaker yang terbanyak adalah Perselisihan PHK, perusahaan mengadakan efisiensi karena tidak mampu membayar upah (UMK terlalu tinggi kenaikannya) sehingga banyak Pekerja/SP banyak melakukan Unjuk Rasa/Mogok Kerja menuntut kenaikan upah sesuai Peraturan Gubernur yang ada;
- Masih adanya perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan PP dan PKB karena masih dalam proses perundingan.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah:

- Diadakan sosialisasi tentang pemahaman K3 lebih mendalam;
- Dilakukan pembinaan lebih intensif tentang Norma-Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Norma K3 dan aturan ketenagakerjaan.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Ketenagakerjaan adalah:

- Penghargaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 Penempatan Tenaga Kerja Tingkat Nasional;
- Penghargaan Pemerhati K3 dan Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) Tingkat Nasional diterima oleh 65 Perusahaan;

- Penghargaan Pembina K3 dan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) Tingkat Provinsi Jawa Timur diterima oleh Bupati Gresik dan 61 Perusahaan;
- Penghargaan Zero Accident Award Tingkat Provinsi Jawa Timur diterima oleh 61 Perusahaan.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pada Tahun 2014 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 40 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp3.903.611.350,00 realisasi sebesar Rp3.825.278.405,00 tidak terserap Rp78.332.945,00 rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 15.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 7 program terdiri 32 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.197.869.350,00 realisasi sebesar Rp3.156.043.655,00, tidak terserap Rp41.825.695,00, disebabkan:
 - 1) Efisiensi Rp. 35.390.195,00
 - 2) Sisa Lelang Rp. 6.435.500,00
- 15.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp672.292.000,00 realisasi sebesar Rp635.784.750,00, tidak terserap Rp36.507.250,00, disebabkan efisiensi.
- 15.3. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00 realisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 15.4. Kecamatan Kebomas melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00 realisasi sebesar Rp10.000.000,00.

5.5. Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.950.000,00 realisasi sebesar Rp9.950.000,00.

15.6. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.500.000,00 realisasi sebesar Rp3.500.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Menengah pada 50 UKM;
- Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan untuk peningkatan SDM bagi Wirausaha di Kabupaten Gresik sebanyak 3 kali;
- Tersusunnya Buletin Promosi Produk Unggulan;
- Terselenggaranya Expose Produk sebanyak 10 UKM;
- Terselenggaranya Fasilitasi bagi KUKM untuk mengikuti Pameran sebanyak 15 KUKM (3 kali pameran);
- Terselenggaranya penataan PKL dan Asongan di TPG II sebanyak 46 Pedagang;
- Terselenggaranya kegiatan pembinaan Koperasi berprestasi sebanyak 750 Koperasi;
- Terwujudnya Koperasi yang sehat dan akuntabel sebanyak 50 Koperasi;
- Terbinanya Koperasi yang mampu mensejahterahkan anggota Masyarakat sebanyak 150 koperasi;
- Terwujudnya Koperasi yang mandiri sebanyak 15 Koperasi;
- Terlaksananya Revitalisasi KUD sebanyak 18 KUD;
- Terlaksanakannya pameran produk unggulan Kabupaten Gresik sebanyak 2 pameran;
- Tersusunnya perumusan kebijakan pada Perusahaan Daerah Pasar Gresik sebanyak 4 Peraturan Bupati;
- Terlaksanakannya Sertifikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor (UKM Nelayan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
- Terbentuknya klaster IKM di Kabupaten Gresik;

- Terlaksananya sosialisasi tentang UKM di Kecamatan Kebomas sebanyak 63 UKM;
- Tersedianya data koperasi wanita di Kecamatan Gresik sebanyak 21 Koperasi Wanita;
- Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi UKM di Kecamatan Bungah sebanyak 88 Orang.

Adapun permasalahan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah:

- Beberapa UKM tidak melaporkan peningkatan pangsa pasar pasca pameran;
- Kurang maksimalnya pendataan perkembangan UKM sehingga menyulitkan untuk membuat *waiting list* UKM yang akan diikutsertakan dalam kegiatan promosi;
- Jaringan perbankan belum optimal yang disebabkan karena masih minimnya pemahaman UKM Nelayan dan masyarakat berpenghasilan rendah tentang fungsi SHAT; dan
- Pembagian peserta SHAT oleh pemerintah pusat masih belum merata terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

Solusi permasalahan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah:

- Penguatan koordinasi dan Pendataan secara berkesinambungan dengan melibatkan instansi lain dan stake holder yang terkait;
- Penguatan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan SKPD terkait; dan
- Penguatan koordinasi dengan SKPD dan stakeholders serta memaksimalkan kegiatan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Koperasi aktif ditargetkan 90% realisasinya sebesar 91%;
- Usaha Mikro dan Kecil ditargetkan 63% realisasinya 97%; dan

- Koperasi yang mendapatkan penilaian baik ditargetkan 80% realisasinya 82,08%.

16. Urusan Penanaman Modal

Pada Tahun 2014 Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, serta Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 41 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.150.728.800,00 realisasi sebesar Rp4.633.547.961,00 tidak terserap Rp517.180.839,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 16.1. Badan Penanaman Modal dan Perijinan melaksanakan 6 program terdiri 39 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.499.258.300,00, realisasi sebesar Rp3.993.721.811,00, tidak terserap Rp505.536.489,00, disebabkan Efisiensi.
- 16.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp901.470.500,00, realisasi Rp878.158.275,00, sebesar tidak terserap Rp23.312.225,00, disebabkan Efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersusunnya buku pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN di Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya forum komunikasi dan kerjasama bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
- Terlaksana pemeliharaan aplikasi dan perangkat lunak pelayanan;
- Tersedianya buku Laporan evaluasi kegiatan penanaman modal serta terlaksananya pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- Terwujudnya pengembangan pelayanan investasi sesuai dengan standar *Internasional Organization for Standardization (ISO 9001:2008)*;
- Tersedianya data tata ruang investasi yang detail berdasarkan Geography Information System Potensi Investasi;

- Terlaksananya pelaksanaan promosi investasi;
- Terlaksananya fasilitasi kemitraan pengusaha daerah dengan PMA PMDN serta Sektor Migas;
- Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan regulasi sebanyak 191 izin;
- Tersedianya sistem informasi dan pengelolaan data izin reklame;
- Tersedianya kajian regulasi daerah di bidang penanaman modal;
- Tersusunnya BAP realisasi investasi perusahaan;
- Terlaksananya pendaftaran perusahaan;
- Terlaksananya operasional tim percepatan pengembangan Gresik Selatan;
- Terlaksananya rekomendasi penerbitan izin Gangguan (HO) dan Izin Usaha sebanyak 40 izin;
- Terlaksananya pelayanan izin prinsip dan lokasi sebanyak 274 izin;
- Terlaksananya verifikasi perizinan usaha sebanyak 72 perusahaan;
- Terlaksananya sosialisasi perizinan di 6 kecamatan;
- Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah penanam modal sebanyak 5 kasus;
- Tersedianya sistem pelayanan dan pelacakan berkas perizinan secara online;
- Tersusunnya dokumen kajian terkait Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD);
- Tersusunnya dokumen kajian skala prioritas kebutuhan infrastruktur untuk menunjang pengembangan kawasan industri di Gresik Utara;
- Terselenggarakannya kegiatan pasar bandeng dan kontes bandeng tradisional sebanyak 2 event;
- Terfasilitasinya kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha selama 1 Tahun;
- Tercapainya peningkatan kinerja BUMD sebanyak 3 BUMD;
- Terlaksananya analisis penyertaan modal kepada BUMD;
- Tersusunnya Rancangan Perda Penyertaan Modal;

- Tersusunnya buku penatakelolaan dan penatausahaan BUMD;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Penanaman Modal Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Kenaikan Nilai Realisasi PMDN ditargetkan sebesar 851,50 milyar rupiah realisasi 7.606 milyar rupiah;
- Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Lokasi ditargetkan sebesar 100% realisasi 103,33%;
- Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) ditargetkan sebesar 100% realisasi 78,26%;
- Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Gangguan (HO) ditargetkan sebesar 100% realisasi 69,17%;
- Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ditargetkan sebesar 100% realisasi 66,83 %;
- Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Prinsip ditargetkan sebesar 100% realisasi 79,40%;
- Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Usaha ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Penanaman Modal antara lain:

- Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tanggal 2 Oktober 2014 Pemerintah Daerah sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan;
- Adanya bangunan tambahan yang diketahui pada saat pemeriksaan lokasi sehingga penerbitan HO menunggu proses penerbitan IMB tambahan;
- Untuk ijin IMB, sering terjadi ketidakcocokan masalah tanah dan berkas masuk pada akhir Desember;
- Pada saat pemeriksaan lapangan terdapat revisi (gambar) atau menambah kelengkapan sesuai kondisi yang harus dipenuhi namun belum ditindaklanjuti oleh pemohon;

Solusi atas permasalahan tersebut adalah:

- Penerbitan izin HO menunggu selesainya penerbitan IMB;
- Melaksanakan kegiatan percepatan pelayanan perizinan pada tahun 2015;
- Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Desa atau Kelurahan terkait dengan riwayat status tanah sedangkan untuk berkas yang masuk akhir desember diproses tahun selanjutnya;

17. Urusan Kebudayaan

Pada Tahun 2014 Urusan Kebudayaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 7 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp3.153.430.500,00,00 realisasi sebesar Rp3.057.474.500.00, tidak terserap Rp95.956.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pelestarian adat budaya daerah;
- Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air;
- Terlaksananya pengelolaan museum;
- Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Tingkat Provinsi yang diselenggarakan di Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya fasilitasi Perkembangan keragaman budaya daerah;
- Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah;
- Terlaksananya pembangunan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kebudayaan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya ditargetkan sebanyak 8 kegiatan realisasi 18 kegiatan;
- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya ditargetkan sebesar 8 unit realisasi 6 unit;

- Peninggalan/Cagar Budaya (Situs) yang dilestarikan ditargetkan sebesar 36,36% realisasi 100%.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Kebudayaan adalah:

- 10 penyaji terbaik festival karya tari Jawa Timur Tahun 2014;
- 3 vokalis terbaik festival lagu daerah Jawa Timur Tahun 2014;
- 3 penata musik terbaik festival lagu daerah Jawa Timur Tahun 2014.
- 10 penulis terbaik pada lomba penulisan naskah kesejarahan Tahun 2014 tingkat Provinsi Jawa Timur.

18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Tahun 2014 Urusan Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Sekretariat Daerah; dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.453.622.550,00, realisasi sebesar Rp2.359.163.841,00, tidak terserap Rp94.458.709,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 18.1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan 6 program terdiri 12 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.688.241.050,00, realisasi sebesar Rp1.666.636.455,00, tidak terserap Rp21.604.595,00, disebabkan adanya efisiensi:
- 18.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp574.536.500,00, realisasi sebesar Rp502.046.386,00 tidak terserap Rp72.490.114,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi	Rp 41.710.114,00
2) Kegiatan yang tidak dilaksanakan	Rp 30.780.000,00
- 18.3. Kecamatan Gresik melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00;

- 18.4. Kecamatan Kebomas melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp70.000.000,00, realisasi sebesar Rp69.636.000,00, tidak terserap Rp364.000,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 18.5. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 18.6. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 18.7. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.155.000,00, realisasi sebesar Rp6.155.000,00;
- 18.8. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 18.9. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,00, realisasi sebesar sebesar Rp10.000.000,00;
- 18.10. Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.39.690.000,00, realisasi sebesar Rp39.690.000,00;
- 18.11. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.000.000,00, realisasi sebesar Rp5.000.000,00;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terselenggaranya pembinaan generasi muda dalam hal keimanan dan ketaqwaan;
- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pemuda Kabupaten Gresik di bidang kepemimpinan;
- Tercapainya pembinaan dan penyeleksian pemuda pelopor;

- Terlaksananya pameran hasil ekonomi kreatif pemuda;
- Terlaksananya pembinaan pemuda antar propinsi, SP3 dan paskibraka;
- Tercapainya peningkatnya jumlah pemuda Kabupaten Gresik yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
- Terlaksananya pembinaan tenaga keolahragaan di Kabupaten Gresik;
- Meningkatkan kebugaran jasmani karyawan dan masyarakat Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya olahraga tradisional untuk masyarakat umum;
- Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
- Terselenggaranya pelatihan atlet olahraga berprestasi;
- Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan;
- Terwujudnya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Persentase organisasi kepemudaan yang aktif ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) ditargetkan sebanyak 2 unit realisasi 4 Unit;
- Lapangan Olah Raga ditargetkan sebesar 27 unit realisasi 24 unit; dan
- Persentase cabang olah raga yang aktif ditargetkan sebesar 93,10% realisasi 100%.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada Tahun 2014 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Satuan Polisi Pamong Praja; Sekretariat Daerah; dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 13 program terdiri 93 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp14,411,607,800,00

realisasi sebesar Rp13.886.980.029,00 tidak terserap Rp524.627.771,00 dengan rincian sebagai berikut:

19.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 1 program terdiri 9 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.539.056.000,00 realisasi sebesar Rp1.515.022.350,00, tidak terserap Rp24.033.650,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi Rp. 19.495.250,00

2) Sisa Lelang Rp. 4.538.400,00

19.2. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan 9 program terdiri 28 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.714.234.000,00 realisasi sebesar Rp2.654.361.417,00, tidak terserap Rp59.872.583,00, disebabkan efisiensi;

19.3. Satuan Polisi Pamongpraja melaksanakan 9 program terdiri 12 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.285.652.000,00, realisasi sebesar Rp4.196.667.362,00, tidak terserap Rp88.984.638,00, disebabkan efisiensi;

19.4. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.922.000.300,00, realisasi sebesar Rp3.599.919.500,00 tidak terserap Rp322.080.800,00 disebabkan antara lain:

1) Efisiensi Rp 320.714.800,00

2) Sisa Lelang Rp 136.600.000,00

19.5. Kecamatan Gresik melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp100.300.000,00, realisasi sebesar Rp100.300.000,00,00;

19.6. Kecamatan Kebomas melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp103.912.000,00, realisasi sebesar Rp103.328.000,00 tidak terserap Rp584.000,00 disebabkan efisiensi;

- 19.7. Kecamatan Manyar melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp116.000.000,00, realisasi sebesar Rp116.000.000,00;
- 19.8. Kecamatan Cerme melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp101.000.000,00, realisasi sebesar Rp100.354.500,00 tidak terserap Rp645.500,00 disebabkan efisiensi;
- 19.9. Kecamatan Benjeng melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp113.600.000,00, realisasi sebesar Rp113.600.000,00;
- 19.10. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp101.000.000,00, realisasi sebesar Rp100.990.900,00 tidak terserap Rp9.100,00 disebabkan efisiensi;
- 19.11. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp113.930.000,00, realisasi sebesar Rp105.460.000,00 tidak terserap Rp8.470.000,00 disebabkan efisiensi;
- 19.12. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp101.000.000,00, realisasi sebesar Rp101.000.000,00;
- 19.13. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp106.000.000,00, realisasi sebesar Rp106.000.000,00;
- 19.14. Kecamatan Kedamean melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp101.000.000,00, realisasi sebesar Rp101.000.000,00;
- 19.15. Kecamatan Menganti melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp106.000.000,00, realisasi sebesar Rp106.000.000,00;

- 19.16. Kecamatan Sidayu melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp134.938.500,00, realisasi sebesar Rp134.938.500,00;
- 19.17. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 4 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp111.000.000,00, realisasi sebesar Rp111.000.000,00;
- 19.18. Kecamatan Panceng melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp88.614.000,00, realisasi sebesar Rp88.614.000,00;
- 19.19. Kecamatan Bungah melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp104.400.000,00, realisasi sebesar Rp104.400.000,00;
- 19.20. Kecamatan Dukun melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp82.000.000,00, realisasi sebesar Rp81.178.000,00 tidak terserap Rp822.000,00 disebabkan efisiensi;
- 19.21. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp128.585.000,00, realisasi sebesar Rp109.515.000,00 tidak terserap Rp19.070.000,00 disebabkan efisiensi;
- 19.22. Kecamatan Tambak melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp137.386.000, realisasi sebesar Rp137.330.500,00 tidak terserap Rp55.500,00 disebabkan efisiensi;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tercapainya penyebaran informasi bencana;
- Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi bencana;
- Tersedianya kebutuhan sembako bagi korban bencana;
- Terlaksananya sosialisasi mitigasi bencana kepada aparat dan masyarakat;
- Terselenggaranya forum koordinasi perusahaan untuk bencana alam;

- Tersedianya air bersih untuk daerah rawan bencana;
- Terwujudnya tenaga penanggulangan bencana yang tangguh;
- Terlaksananya pelatihan dan pembinaan pengurus desa tangguh;
- Terselenggaranya posko siaga banjir dan tanah longsor;
- Terlaksananya peningkatan ketrampilan dan pengetahuan kasi trantib desa;
- Terlaksananya petugas pengamanan hari-hari besar dan unjuk rasa;
- Terselenggaranya pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang aman dan lancar;
- Terlaksananya evaluasi, pengawasan dan pelaporan pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden;
- Terlaksananya Rapat Koordinasi rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
- Terselenggaranya Sosialisasi RANHAM;
- Terpeliharanya kerukunan antar umat beragama;
- Terlaksananya upacara hari-hari besar Nasional;
- Terlaksananya upacara hari jadi Propinsi Jawa Timur;
- Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan kepada generasi muda / murid SMA;
- Terlaksananya upacara bendera 17 Agustus 2014;
- Terbinanya anggota korsik;
- Terlaksananya verifikasi dan pembinaan administrasi bantuan keuangan parpol;
- Terselenggaranya forum komunitas intelijen daerah;
- Terbentuknya forum kewaspadaan dini masyarakat;
- Terciptanya situasi keamanan yang kondusif;
- Terlaksananya pembinaan anggota Satpol PP dan Linmas;
- Terciptanya kesiagaan aparat keamanan desa dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan;
- Terlaksananya penyidikan dan penindakan terhadap pelanggar PERDA;
- Terlaksananya operasi penertiban pelanggaran PERDA;

- Terlaksananya pembinaan mental dan jasmani anggota Satpol PP;
- Terciptanya kerjasama yang baik antar anggota Satpol PP se-Jawa Timur;
- Terlaksananya operasi penertiban larangan peredaran minuman keras (MIRAS);
- Terlaksananya operasi penertiban pelarangan pelacuran dan perbuatan cabul /PSK;
- Tercapainya peningkatan kualitas dan prestasi khafilah yang dikirim mengikuti MTQ;
- Terselenggaranya peringatan hari besar Agama Islam;
- Terselenggaranya kegiatan pembinaan keagamaan kepada pengelola tempat ibadah dan zakat;
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan operasional tempat ibadah yang mendapat bantuan sarana dan prasarana keagamaan;
- Terselenggaranya kegiatan istighosah dan khotmil Qur'an;
- Terselenggaranya pemberangkatan haji;
- Terlaksananya fasilitasi penyampaian santunan anak yatim dan fakir miskin; dan
- Terlaksananya pembinaan Simkamswakarsa.

Adapun Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Jumlah Parpol yang mendapat sosialisasi ditargetkan sebanyak 11 parpol realisasi 11 parpol;
- Jumlah LSM/Ormas/OKP yang dibina ditargetkan sebanyak 164 LSM realisasi sebanyak 164 LSM/Ormas/OKP;
- Konflik yang dapat diselesaikan ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kabupaten Gresik ditargetkan sebesar 70% realisasi 100%,

- Demo/protes yang tertib terhadap Perda/Perbub ditargetkan 98% realisasi 100%
- Keberadaan Perda tentang penyelenggaraan Trantibum ditargetkan ada realisasi ada.
- Keberadaan Perda tentang PSK dan Miras ditargetkan ada realisasi ada
- Rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk ditargetkan 0,05% realisasi 0,011%.
- Sistem pengendalian dan penanggulangan bencana alam ditargetkan ada realisasi ada.

Adapun penyebab tidak tercapainya target indikator RPJM urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri pada indikator kinerja rasio Satpol PP disebabkan tdiak adanya kuota penerimaan pegawai negeri sipil.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada Tahun 2014 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Kecamatan; dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 22 program terdiri 186 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp144.229.530.335,00, realisasi sebesar Rp120.407.950.570,00, tidak terserap Rp23.821.579.765,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 20.1. **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 1 program terdiri 12 kegiatan dengan**

alokasi dana sebesar Rp2.033.770.800,00, realisasi sebesar Rp1.800.658.200,00, tidak terserap Rp233.122.600,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp 136.649.600,00
- 2) Sisa Lelang Rp 28.319.000,00
- 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp 68.144.000,00

20.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 11 program terdiri 54 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp63.471.227.060,00, realisasi sebesar Rp59.699.261.946,00, tidak terserap Rp3.771.965.114,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp 3.036.449.658,00
- 2) Sisa Lelang Rp 735.515.456,00

20.3. Sekretariat DPRD melaksanakan 8 program terdiri 39 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp32.379.194.410,00, realisasi sebesar Rp19.762.663.156,00, tidak terserap Rp12.616.531.254,00, disebabkan efisiensi;

20.4. Inspektorat Daerah melaksanakan 3 program terdiri 11 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.858.056.500,00, realisasi sebesar Rp2.460.818.670,00, tidak terserap Rp397.237.830,00, disebabkan efisiensi;

20.5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 1 program terdiri 31 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.716.550.400,00, realisasi sebesar Rp20.383.100.738,00, tidak terserap Rp5.333.440.662,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp 3.823.115.858,00
- 2) Sisa Lelang Rp 1.510.324.804,00

20.6. Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 3 program terdiri 37 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.387.579.515,00,

realisasi sebesar Rp7.112.482.262,00, tidak terserap Rp1.275.097.253,00, disebabkan antara lain:

Efisiensi Rp 1.084.784.221

Sisa Lelang Rp 190.313.032

20.7. Kecamatan Gresik melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.017.900.000,00, realisasi sebesar Rp1.992.731.601,00, tidak terserap Rp25.168.399,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi Rp 23.168.399,00

2) Kegiatan yang tidak Rp 2.000.000,00
dilaksanakan

20.8. Kecamatan Kebomas melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.318.201.000,00, realisasi sebesar Rp1.200.555.105,00, tidak terserap Rp27.645.895,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi Rp 23.645.895,00

2) Kegiatan yang tidak Rp 4.000.000,00
dilaksanakan

20.9. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp360.000.000,00, realisasi sebesar Rp350.438.700,00, tidak terserap Rp9.561.291,00, disebabkan efisiensi;

20.10. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp349.150.000,00, realisasi sebesar Rp341.600.876,00, tidak terserap Rp7.549.124,00, disebabkan efisiensi;

20.11. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp410.323.250,00, realisasi sebesar Rp410.126.547,00, tidak terserap Rp3.194.703,00, disebabkan efisiensi;

- 20.12. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp337.950.000,00, realisasi sebesar Rp316.062.317,00, tidak terserap Rp21.887.683,00, disebabkan antara lain:
- 1) Efisiensi Rp 18.887.683,00
 - 2) Kegiatan yang tidak Rp 3.000.000,00 dilaksanakan
- 20.13. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp344.495.000,00, realisasi sebesar Rp334.031.378,00, tidak terserap Rp10.463.622,00, disebabkan efisiensi;
- 20.14. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp435.500.000,00, realisasi sebesar Rp423.670.233,00, tidak terserap Rp11.829.767,00, disebabkan efisiensi;
- 20.15. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp313.500.000,00, realisasi sebesar Rp311.862.700,00, tidak terserap Rp1.637.300,00, disebabkan efisiensi;
- 20.16. Kecamatan Kedamean melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp388.000.000,00, realisasi sebesar Rp384.911.641,00, tidak terserap Rp3.088.359,00, disebabkan efisiensi;
- 20.17. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp344.704.400,00, realisasi sebesar Rp337.796.973,00, tidak terserap Rp6.907.427,00, disebabkan efisiensi;
- 20.17. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp271.161.500,00, realisasi sebesar Rp268.620.946,00, tidak terserap Rp2.540.554,00, disebabkan efisiensi;

- 20.18. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp332.650.000,00, realisasi sebesar Rp330.505.638,00, tidak terserap Rp2.144.362,00, disebabkan efisiensi;
- 20.19. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp339.721.000,00, realisasi sebesar Rp339.078.675,00, tidak terserap Rp642.325,00, disebabkan efisiensi;
- 20.20. Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp307.960.000,00, realisasi sebesar Rp306.527.818,00, tidak terserap Rp532.182,00, disebabkan efisiensi;
- 20.21. Kecamatan Dukun melaksanakan 4 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp447.458.000,00, realisasi sebesar Rp436.796.700,00, tidak terserap Rp10.661.300,00, disebabkan efisiensi;
- 20.22. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp433.732.500,00, realisasi sebesar Rp387.282.419,00, tidak terserap Rp46.450.081,00, disebabkan efisiensi;
- 20.22. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp328.645.000,00, realisasi sebesar Rp326.364.322,00, tidak terserap Rp2.280.678,00, disebabkan efisiensi;
- 20.23. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI melaksanakan 5 program terdiri 23 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp300.000.000,00, realisasi sebesar Rp300.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan sebanyak 66 LHP;
- Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus yang ditandatangani Bupati Gresik sebanyak 82 LHP;

- Tersusunnya laporan hasil evaluasi SAKIP, SPIP, Kinerja Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Proyek di 20 SKPD;
- Tersusunnya dokumen inventarisasi temuan pengawasan selama 1 tahun;
- Terlaksananya tindak lanjut pemeriksaan terhadap temuan pengawasan sebanyak 66 OP;
- Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal sebanyak 493 temuan;
- Terlaksananya evaluasi terhadap temuan pengawasan internal yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 434 temuan;
- Tersusunnya Laporan Hasil Review (LHR) atas laporan keuangan Daerah;
- Terlaksananya pelatihan teknis Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- Terlaksananya pelatihan teknis satgas SPIP;
- Tersusunnya dokumen SOP Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- Terlaksananya pelatihan tenaga kesehatan yang kompeten dan professional sebanyak 40 orang;
- Terlaksananya diklat Pim Tingkat II, III dan IV Tahun 2014 sebanyak 70 orang peserta;
- Terlaksananya pelatihan Pengamat Jalan yang kompeten dan profesional sebanyak 40 orang;
- Terlaksananya pengiriman CPNS untuk mengikuti diklat prjabatan sebanyak 322 orang;
- Terlaksananya Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah bagi PNS sebanyak 100 orang;
- Terlaksananya pengiriman anggota PPNS daerah untuk mengikuti Diklat PPNS sebanyak 6 orang;
- Terlaksananya pengiriman peserta diklat, sosialisasi, kursus dan bimtek PNS sebanyak 64 orang;
- Terlaksananya diklat manajemen kepemimpinan organisasi para Pejabat di lingkungan Pemkab Gresik sebanyak 40 orang;

- Terlaksananya penempatan CPNS dan pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 349 orang;
- Terlaksananya penyerahan SK kenaikan pangkat;
- Termutakhirnya database Kepegawaian dalam Sitem Informasi Kepegawaian Daerah Kab. Gresik sebanyak 9786 orang;
- Terlaksananya penyerahan penghargaan PNS sebanyak 303 orang;
- Terlaksananya pelaksanaan sidak disiplin ke setiap SKPD sebanyak 40 kali;
- Terlaksananya pengiriman PNS tugas belajar sebanyak 15 orang;
- Terlaksananya seleksi CAPRA IPDN Tahun 2014 sebanyak 30 orang;
- Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi pengelola barang sebanyak 40 orang;
- Tersusunnya rekomendasi mutasi dan kenaikan pangkat dari tim Baperjakat;
- Terselenggaranya Bimbingan teknis bagi Pejabat Fungsional sebanyak 195 orang;
- Terlaksananya bimtek bagi PNS yang akan memasuki usia pensiun sebanyak 173 orang;
- Terlaksananya rakor kepegawaian;
- Terlaksananya Acara Pelantikan Pejabat Pemkab Gresik sebanyak 3 kali;
- Terlaksananya Pelayanan Informasi Kepegawaian;
- Tersusunnya dokumen strategi untuk pengembangan pelayanan perijinan penelitian;
- Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- Tersusunnya dokumen KLHS Perencanaan Kawasan Pelabuhan Internasional;
- Tersusunnya rekomendasi aksi pengembangan kemitraan pembangunan yang berkelanjutan;
- Terjalinnya koordinasi forum komunikasi PTS sebanyak 16 lembaga;
- Terbentuknya struktur dan keanggotaan Dewan Riset Daerah Kabupaten Gresik;

- Terlaksananya sosialisasi sistem inovasi daerah;
- Tersusunnya dokumen kajian pengaruh industrialisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan kemiskinan;
- Tersusunnya dokumen Kajian Ekspektasi Masyarakat tentang pembangunan yang berkeadilan;
- Terlaksananya penyusunan dan pembahasan Ranperda sebanyak 3 Perda;
- Terlaksananya pengundangan produk hokum dalam Lembaran Daerah sebanyak 41 Peraturan;
- Terlaksananya sosialisasi Desa Sadar Hukum, penyuluhan hukum dan lomba Kadarkum sebanyak 720 peserta;
- Tersedianya buku abstrak dan katalog perundang-undangan sebanyak 850 buku;
- Terlaksananya kajian produk hukum daerah sebanyak 2 Peraturan;
- Terlaksananya penanganan pelanggaran peraturan daerah sebanyak 5 perkara;
- Terlaksananya penanganan kasus terhadap aparatur pemerintah dan/atau perangkat daerah sebanyak 5 perkara;
- Tersedianya buku himpunan Perbup dan Perda sebanyak 1100 buku;
- Terlaksananya penataan dokumen fisik dan elektronik, penggandaan Perda dan Perbup, dan pengadaan buku referensi perundang-undangan;
- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah sebanyak 762 orang;
- Terlaksananya evaluasi Peraturan Desa sebanyak 180 Peraturan desa;
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah;
- Tersusunnya Buku Profil Otonomi Daerah Kabupaten Gresik;
- Tersusunnya rancangan Perbup Rincian Tugas dan Fungsi UPTD dan UPTB;
- Tersusunnya rancangan Peraturan Bupati Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015;
- Terlaksananya pengembangan budaya kerja pada SKPD;

- Terlaksananya Perintisan dan Sertifikasi Manajemen ISO 9001:2008 Puskesmas serta Audit dan Resertifikasi Manajemen ISO 9001:2008;
- Tersedianya Buku Laporan Hasil Evaluasi dan Survey IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
- Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- Terbentuknya Unit Pelayanan Percontohan sebanyak 2 unit;
- Terlaksananya Pemberian Penghargaan Standar Pelayanan Publik *The Sunan Giri Award* pada 6 Desa 3 Kelurahan;
- Terlaksananya Evaluasi Hasil ANJAB dan ABK SKPD Hasil Perubahan Perda SOTK;
- Terlaksananya kegiatan keprotokolan;
- terselesaikannya pengaduan masyarakat sebesar 100%;
- Terlaksananya kegiatan peringatan HUT Korpri Tahun 2014;
- Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknik ASB sebanyak 78 orang;
- Tersusunnya Buku Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas;
- Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan pembangunan/rehabilitasi JPD dan infratraktur pendukungnya;
- Terlaksananya verifikasi proposal bantuan keuangan dari desa/lembaga;
- Tercapainya Sinkronisasi Program Pembangunan;
- Tersedianya Perangkat Komputer yang terinstal perangkat Legal (Windows 8 Profesional) sebanyak 38 unit.
- Terproteksinya data elektronik dari virus / *spyware* yang terkoneksi WAN dan LAN pada 58 SKPD;
- Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Penyusunan Pemanfaatan Jaringan Teknologi Informasi;
- Tersusunnya SPM dan NSPK di bidang komunikasi dan informasi;
- Tersedianya Data Warehouse pada 58 SKPD;
- Terlaksananya pembangunan gedung perkantoran Masjid Al Inabah;
- Tersusunnya Standarisasi Acuan Harga Barang;
- Tersedianya Tenaga Pengurus dan Penyimpan Barang; dan

- Terselenggaranya proses pengadaan barang/jasa (Pelelangan, seleksi dan penunjukan langsung).

Adapun permasalahan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah:

- Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait moratorium PNS, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2014 tidak menyelenggarakan Seleksi CPNS;
- Pemkab. Gresik pada tahun 2014 tidak mendapatkan kuota tenaga kesehatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Penerbitan jurnal penelitian tidak diteruskan pelaksanaannya karena belum dibentuk Tim Mitralestari yang menyeleksi hasil kajian atau penulisan ilmiah;

Solusi permasalahan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah:

- Konsultasi kepada Kementerian PAN dan RB dan Pemerintah Provinsi terkait peluang pelaksanaan rekrutmen CPNS;
- Perlu dibentuk Tim Mitralestari untuk penerbitan jurnal penelitian;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Perda yang ditetapkan ditargetkan sebanyak 40 Perda realisasi 92 Perda;
- Jumlah Perda yang dibatalkan ditargetkan sebanyak 0 Perda realisasi 0 Perda;
- Kasus hukum yang diselesaikan ditargetkan sebanyak 80% realisasi 100%;
- Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti/dilaksanakan ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Peraturan Bupati yang ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;

- Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi ditargetkan 25% realisasi 100%;
- Prosentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100% realisasi 98%;
- Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditargetkan sebanyak 34 kali realisasi sebanyak 34 Kali;
- Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD) ditargetkan baik realisasi Sangat Baik;
- Opini laporan keuangan ditargetkan (Wajar Tanpa Pengecualian) WTP realisasi WDP;
- Laporan keuangan yang disusun ditargetkan tepat waktu realisasi tepat waktu;
- APBD ditetapkan tepat waktu realisasi tepat waktu;
- Tersedianya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peningkatan PAD ditargetkan sebesar 27,49% realisasi 39,34%;
- Keberadaan kemandirian daerah ditargetkan 24,84% realisasi 31,76%;
- Perusahaan Daerah dalam kondisi sehat ditargetkan 2 perusahaan realisasi 3 perusahaan;
- Aset (Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan) ditargetkan 95,95% realisasi 98,60%;
- Voting yang dilakukan dalam sidang paripurna ditargetkan sebesar 0% realisasi 0%;
- Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan raperda ditargetkan 100% realisasinya 100%;
- Perda inisiatif DPRD Tahun 2011-2014 ditargetkan sebesar 18 perda realisasi 33 perda;
- Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya ditargetkan sebesar 100% realisasi 79,70%;
- Rasio jabatan yang terisi ditargetkan sebesar 100% realisasi 88,95%;

- Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Kesesuaian SOTK SKPD dengan Pedoman/Peraturan tentang SOTK ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan ditargetkan 80% realisasi 100%
- Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga ditargetkan sebesar 24 MOU realisasi 22 MOU;
- Keberadaan unit pelayanan pengadaan ditargetkan ada realisasi Ada;
- Keberadaan E-procurement (pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik) ditargetkan ada realisasi Ada yaitu melalui LPSE Kab. Gresik; dan
- Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah ditargetkan 25 orang realisasi 44 orang.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah Juara II Lomba MTQ Hafidz Korpri Tingkat Provinsi Jawa Timur.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Pada Tahun 2014 Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Ketahanan Pangan; Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 33 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.536.990.100,00 realisasi sebesar Rp1.477.483.927,00 tidak terserap Rp59.506.173,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 21.1. Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan 4 program terdiri 31 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.306.863.600,00 realisasi

sebesar Rp1.251.057.427,00 tidak terserap Rp55.806.173,00, disebabkan efisiensi.

21.2. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp98.239.000,00, realisasi sebesar Rp96.114.000,00 tidak terserap Rp2.125.000,00, disebabkan antara lain:

- | | | |
|----------------|----|--------------|
| 1) Efisiensi | Rp | 200.000,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp | 1.925.000,00 |

21.3. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp131.887.500,00, realisasi sebesar Rp130.312.500,00 tidak terserap Rp1.575.000,00, disebabkan Sisa lelang.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terpenuhinya kebutuhan pangan untuk daerah yang terkena kerawanan pangan;
- Tersusunnya informasi perencanaan pangan berbasis pola pangan harapan (PPH) serta analisis konsumsi pangan;
- Tercapainya kecukupan pangan di tingkat rumah tangga;
- Tersusunnya data harga pangan yang akurat;
- Tersedianya kemudahan transportasi serta efisiensi biaya angkut untuk pengangkutan hasil panen;
- Terciptanya kemandirian pangan desa;
- Terlaksananya pengujian laboratorium terhadap sampel berbagai jenis makanan yang beredar di masyarakat dan sosialisasi mutu dan keamanan pangan;
- Terlaksananya pembinaan manajemen pemanfaatan modal untuk pembelian gabah;
- Terlaksananya rakor dan pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;

- Terselenggaranya promosi konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) 16 Kecamatan se-Kab. Gresik;
- Terselenggaranya sosialisasi pangan alternatif atau pangan non beras; dan
- Terselenggaranya pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Tersedianya regulasi ketahanan pangan target ada realisasi ada;
- Ketersediaan pangan ditargetkan 197,21 Kg/kapita/tahun realisasi sebesar 176,36 Kg/kapita/tahun;
- Rata-rata konsumsi bahan pangan utama ditargetkan 94,35 Kg/kapita/tahun realisasi sebesar 91,32 Kg/kapita/tahun.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Ketahanan Pangan adalah:

- Peringkat I Pemangku Ketahanan Pangan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Nasional;
- Peringkat III kategori Pembina Ketahanan Pangan untuk Bupati Gresik Tingkat Provinsi;

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Tahun 2014 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 67 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp12.076.349.500,00, realisasi sebesar Rp11.668.897.920,00, tidak terserap Rp407.451.580,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 22.1. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.927.842.500,00, realisasi sebesar

Rp3,729,814,250,00, tidak terserap Rp198.028.250,00 disebabkan antara lain:

1) Efisiensi Rp 110.193.750,00

2) Sisa Lelang Rp 84.142.500,00

- 22.2. Kecamatan Gresik melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00, realisasi sebesar Rp30.000.000,00;
- 22.3. Kecamatan Kebomas melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp40.000.000,00, realisasi sebesar Rp40.000.000,00;
- 22.4. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 22.5. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp14.880.000,00, tidak terserap Rp120.000,00 disebabkan efisiensi;
- 22.6. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 2 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp65.000.000,00, realisasi sebesar Rp65.000.000,00;
- 22.7. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 22.8. Kecamatan Kedamean melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp35.000.000,00, realisasi sebesar Rp35.000.000,00;
- 22.9. Kecamatan Menganti melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00, realisasi sebesar Rp30.000.000,00;

- 22.10. Kecamatan Sidayu melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp18.845.000,00, realisasi sebesar Rp18.845.000,00;
- 22.11. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00, realisasi sebesar Rp30.000.000,00;
- 22.12. Kecamatan Panceng melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp49.165.000,00, realisasi sebesar Rp49.165.000,00;
- 22.13. Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 22.14. Kecamatan Dukun melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp23.732.000,00, realisasi sebesar Rp23.732.000,00;
- 22.15. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp28.210.000,00, realisasi sebesar Rp28.210.000,00,00;
- 22.16. Kecamatan Tambak melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp48.800.000,00, realisasi sebesar Rp40.790.000,00, tidak terserap Rp10.000,00 disebabkan efisiensi;
- 22.17. Badan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 3 program terdiri 39 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp7.702.755.000,00, realisasi sebesar Rp7.493.488.670,00, tidak terserap Rp209.266.330,00 disebabkan antara lain :
- 1) Efisiensi Rp 197.266.330,00
 - 2) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp 12.000.000,00
- Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:
- Peningkatan Kapasitas Pelatihan Aparatur Pemerintahan dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa;

- Tersusunnya rancangan perda tentang aparaturnya perangkat desa;
- Terlaksananya penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Terlaksananya bimbingan teknis administrasi pertanahan desa terhadap aparaturnya Pemerintahan Desa;
- Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan administrasi desa;
- Tersedianya Software dan hardware Sistem Informasi Administrasi Desa;
- Terselenggaranya Sosialisasi undang-undang desa;
- Terlaksananya Pembinaan Dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW);
- Terlaksananya revitalisasi lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) atau nama lainnya;
- Meningkatnya partisipasi lembaga desa dalam pembangunan desa;
- Terselenggaranya Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes, Pasar Desa, Lembaga Ekonomi Mikro);
- Meningkatnya pengelolaan pasar desa/BumDesa;
- Tersusunnya Data Lembaga Keuangan Mikro bukan Bank bukan Koperasi di Pedesaan yang Valid dan Update;
- Tersusunnya Rekapitulasi Profil Desa/kelurahan;
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bulan Bhakti Gotong-royong;
- Terlaksananya pembinaan administrasi BKAD;
- Terlaksananya kegiatan partisipasi kelompok dalam pendidikan kemasyarakatan dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Masyarakat Desa/Kelurahan (PKPKM);
- Terlaksananya pemberdayaan aparaturnya desa dalam rangka mengurangi jumlah rumah tangga miskin;
- Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- Terlaksananya Pengenalan Produk TTG dan Produk Unggulan;
- Terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan Program PMT-AS;
- Meningkatnya Pembangunan Desa melalui Pokmas TTG;

- Terlaksananya Kegiatan TMMD di Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Benjeng;
- Meningkatnya keberdayaan masyarakat pesisir dan pantai;
- Terlaksananya pengembangan sumber daya lokal berbasis kawasan melalui pelatihan;
- Terpenuhinya sarana dan prasarana dasar perdesaan yang memadai;
- Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber mata air;
- Terlaksananya pemberdayaan unit pengelola keuangan dan usaha (UPKu);
- Tersalurkannya bantuan modal untuk pengembangan UED;
- Terlaksananya pembinaan dan monitoring program pengembangan keswadayaan masyarakat Desa / Kelurahan (CCB);
- Terlaksananya Pembangunan wilayah terpadu antar desa;
- Terlaksananya Pengembangan Labsite dan Implementasi serta Pendampingan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP);
- Terlaksananya pelatihan kader pemberdayaan masyarakat;
- Meningkatnya Inovasi di Bidang TTG;
- Penyelenggaraan lomba karya penanggulangan kemiskinan;
- Terselenggaranya Pemetaan Perkembangan UPKu di Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pelatihan;
- Terlaksananya Tilik Warga;
- Terlaksananya Program Kerja dan Kegiatan PKK, DWP dan Organisasi Wanita;
- Meningkatnya kapasitas SDM Wanita Kader Desa; dan
- Terlaksananya Pembinaan Posyandu di Desa.

Adapun permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat adalah:

- Terdapat sebagian Desa dan Kelurahan yang belum memahami tentang Pedoman Teknis Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan serta Pemahaman Tugas Pokok, Fungsinya;
- Terdapat sebagian Desa dan Kelurahan yang belum memahami tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa;

Solusi permasalahan pada Urusan Urusan Pemberdayaan Masyarakat adalah:

- Dilakukan Fasilitasi Pelatihan, Pembinaan dan Penganggaran terhadap Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- Dilakukan Fasilitasi Pelatihan, Pembinaan dan Penganggaran terhadap tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Desa;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- PKK aktif ditargetkan sebesar 84,41% realisasi 100%;
- Posyandu Aktif ditargetkan sebesar 98,95% realisasi 100%;
- Persentase keluarga miskin ditargetkan sebanyak 19,67% realisasi 13,58%.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat adalah:

- Juara III Lomba Pasar Tradisional Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara VII Lomba UPKu Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara II Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur.

23. Urusan Statistik

Pada Tahun 2014 Urusan Statistik di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 1 program terdiri 3 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp550.000.000, realisasi sebesar Rp529.784.500, tidak terserap Rp20.215.500, disebabkan adanya efisiensi sebesar Rp20.215.500,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersusunnya buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- Tersusunnya buku Statistik Kabupaten dan Statistik Kecamatan;
- Tersusunnya buku Analisa Indikator Pembangunan Manusia dalam kegiatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Statistik Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Keberadaan dokumen "Gresik dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka" ditargetkan ada realisasi ada;
- Keberadaan dokumen "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)" ditargetkan ada realisasi ada;
- Keberadaan dokumen "Indeks Pembangunan Manusia (IPM)" ditargetkan ada realisasi ada.

24. Urusan Kearsipan

Pada Tahun 2014 Urusan Kearsipan di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip serta Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp309.344.500,00 realisasi sebesar Rp305.563.750,00 tidak terserap sebesar Rp3.780.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

24.1. Kantor Perpustakaan dan Arsip melaksanakan 4 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp183.275.000, realisasi sebesar Rp182.609.900,00 tidak terserap Rp665.100,00, disebabkan adanya efisiensi.

24.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp126.069.500,00 realisasi sebesar Rp122.953.850,00 tidak terserap Rp3.115.650,00 disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terwujudnya penataan arsip secara baku;
- Meningkatnya arsip yang tertata, tertib dan Rapi;
- Memperpanjang umur dan menjaga kelestarian dokumen/arsip daerah;
- Meningkatnya kemampuan pengelolaan arsip desa;
- Tersedianya Data Base Informasi Kearsipan; dan
- Terlaksananya pengelolaan arsip Sekretariat Daerah;
- Terlaksananya sosialisasi kearsipan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kearsipan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku ditargetkan sebesar 74,33% realisasinya 99,76%.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada Tahun 2014 Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 24 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp9.770.582.025,00 realisasi sebesar Rp9.479.873.983,00 tidak terserap Rp290.708.042,00 dengan rincian sebagai berikut:

25.1. Sekretariat Daerah melaksanakan 5 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.562.639.025,00 realisasi sebesar Rp5.448.605.958,00 tidak terserap Rp114.033.067,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi	Rp 22.018.092,00
2) Sisa Lelang	Rp 17.475.860,00

25.2. Sekretariat DPRD melaksanakan 1 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.207.943.000, realisasi sebesar Rp4.031.268.025,00 tidak terserap Rp176.674.975,00, disebabkan adanya efesiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya Proxy Server; Router Load Balancing; back Up backbone Jaringan WAN Pemkab Gresik dan terselenggaranya pelatihan teleconference;
- Tersedianya administrator troubleshooting Windows 8
- Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana persandian;
- Tersedianya Aplikasi Service Desk untuk Meningkatkan Layanan Telekomunikasi dan Komunikasi di SKPD;
- Terselenggaranya Lomba dan Seminar TIK;
- Termuatnya berita dan informasi pembangunan daerah di media massa sebesar 388 advetorial dan 280 iklan;
- Tersedianya media untuk mempublikasikan kegiatan DPRD; dan
- Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Pemerintahan Kabupaten Gresik dan wartawan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 sebagai berikut:

- Keberadaan website Pemerintah Daerah ditargetkan ada realisasi ada;
- Pengunjung website setiap tahun ditargetkan 554.261 netter realisasi 725.213 netter;
- Sistem informasi yang tersedia ditargetkan 26 buah realisasi 32 buah;
- Jumlah pemberitaan di media ditargetkan 400 kali realisasi 692 kali;
- Persuratan secara elektronik ditargetkan ada realisasi ada.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Komunikasi dan Informatika adalah:

- Penghargaan IDSA Indonesia Digital Society Award 2014 oleh Menteri Koinfo;

- "Telecenter Joko Samudro" Juara III dalam kategori Pengembangan UKM Ekonomi Kerakyatan tingkat Provinsi Jawa Timur 2014.

26. Urusan Perpustakaan

Pada Tahun 2014 Urusan Perpustakaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kecamatan Manyar dan Kantor Perpustakaan dan Arsip.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 29 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.733.319.000,00 realisasi sebesar Rp1.584.870.970,00 tidak terserap Rp148.448.030,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 26.1. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 26.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip melaksanakan 4 program terdiri 28 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.723.319.000,00, realisasi sebesar Rp1.574.870.970,00 tidak terserap Rp148.448.030,00, disebabkan adanya efisiensi sebesar Rp37.252.430,00, dan kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp111.195.600,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Meningkatnya minat baca masyarakat;
- Meningkatnya jumlah perpustakaan yang dikelola dengan baik;
- Meningkatnya jumlah pengunjung dan anggota perpustakaan;
- Bertambahnya khazanah pustaka di perpustakaan daerah.

Adapun permasalahan pada Urusan Perpustakaan adalah:

- Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan Perpustakaan dan minat baca di daerah kepada 4 desa dan 1 kelurahan tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai aturan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang direvisi ke dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Solusi

permasalahan tersebut adalah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perpustakaan Tahun 2014 sebagai berikut:

- Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan ditargetkan 154.142 buku realisasi 139.555 buku;
- Pengunjung Perpustakaan ditargetkan 680.759 orang pengunjung realisasi 1.074.695 orang pengunjung;
- Jumlah anggota Perpustakaan ditargetkan 31.143 anggota realisasi 24.266 anggota.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Perpustakaan antara lain:

- Target koleksi buku tidak tercapai adanya kenaikan harga buku sehingga jumlah buku yang terbeli tidak sesuai;
- Target anggota perpustakaan tidak tercapai karena kecenderungan masyarakat menggunakan internet;

B. URUSAN PILIHAN

Pada Tahun 2014 penyelenggaraan 7 urusan pilihan dialokasikan anggaran sebesar Rp37.320.731.697,00 realisasi sebesar Rp32.760.711.047,00 tidak terserap sebesar Rp4.560.020.650,00. Adapun penyelenggaraan masing-masing Urusan Pilihan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pertanian

Pada Tahun 2014 Urusan Pertanian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Ketahanan Pangan; Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan; dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 15 program terdiri 74 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp18.339.751.250,00 realisasi

sebesar Rp17.131.572.378,00 tidak terserap Rp1.208.178.872,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1.1. Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp526.263.000,00 realisasi sebesar Rp459.731.100,00 tidak terserap Rp66.531.900,00, disebabkan adanya sisa lelang.
- 1.2. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan 10 program terdiri 54 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp12.692.237.750,00 realisasi sebesar Rp11.786.601.848,00 tidak terserap Rp905.635.902,00, disebabkan antara lain:
 - 1) Efisiensi Rp 204.250.977,00
 - 2) Sisa Lelang Rp 194.524.925,00
 - 3) Kegiatan yang tidak Rp 506.860.000,00 dilaksanakan
- 1.3. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 10 program terdiri 34 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.806.620.500,00 realisasi sebesar Rp4.582.592.430,00 tidak terserap Rp224.028.070,00, disebabkan antara lain:
 - 1) Efisiensi Rp 81.564.990,00
 - 2) Sisa Lelang Rp 142.463.080,00
- 1.4. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melaksanakan 4 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp314.630.000,00 realisasi sebesar Rp302.647.000,00 tidak terserap Rp11.983.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersalurkannya Sarana Produksi Pertanian (Saprota) yang diadakan untuk korban bencana banjir, kekeringan dan Puso sebanyak 5.000 Kg Benih Padi dan 4.000 Kg Pupuk Organik;
- Terlaksananya Bimtek pengolahan mangga, tomat dan cabe;
- Terlaksananya pendampingan bagi pelaku agribisnis perkebunan yang memahami pembuatan gula merah tebu dan aren;

- Terlaksananya promosi yang dapat dilaksanakan terhadap jumlah produk unggulan daerah;
- Terlaksananya pelatihan bagi petani tentang pengolahan mangga;
- Tersedianya sarana alat mesin pertanian yang diperlukan petani sebanyak 17 Unit Hand Traktor, 3 Unit Pompa Air;
- Terlaksananya pemberdayaan bagi kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang sudah berbadan hukum dan dapat memahami tentang pengoperasian tata kelola air sebanyak 15 kelompok HIPPA dan 1 kelompok HIPPA/Gabungan HIPPA;
- Terlaksananya Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Tanaman Pangan sebanyak 650 Peserta;
- Teridentifikasinya peta jaringan irigasi di Kabupaten Gresik di Daerah irigasi Lowayu dan daerah irigasi Gogor;
- Terlaksananya Sekolah Lapang Good Agriculture Procedure (GAP) Tanaman Buah (SL-GAP) tanaman buah sebanyak 100 orang di 4 lokasi;
- Tercapainya Gerakan Pengendalian Hama Tanaman (GPHT) terhadap jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sebesar 100%;
- Tersedianya data pertanian/ perkebunan yang akurat dan update;
- Terlaksananya pelatihan bagi petani tanaman palawija;
- Terlaksananya sosialisasi tentang peningkatan produksi hortikultura dalam rangka Pengembangan Kawasan Hortikultura sebanyak 300 Orang;
- Terlaksananya pelatihan tentang peningkatan produksi tanaman sayuran sebanyak 120 Orang;
- Terbinanya petani tanaman perkebunan;
- Terawasinya peredaran pupuk bersubsidi;
- Terlaksananya pelatihan peningkatan produksi tanaman pangan bagi petani;
- Terlaksananya pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani sereal;

- Terlaksananya pelatihan pengetahuan dan keterampilan Petani dalam Pengembangan Pupuk Organik;
- Terbina petani dalam pengendalian OPT tanaman perkebunan sebanyak 75 Orang;
- Terlaksananya kegiatan perencanaan, sosialisasi, monitoring dan pengendalian bantuan keuangan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT);
- Terlaksananya kegiatan perencanaan, sosialisasi, monitoring dan pengendalian bantuan keuangan pembangunan jaringan irigasi;
- Terlaksananya pembangunan peningkatan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan petani;
- Terlaksananya pembangunan lumbung desa sebanyak 7 unit;
- Terlaksananya pelatihan tentang penggunaan pupuk sesuai anjuran dan terpenuhinya kebutuhan air;
- Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman tebu di lahan kering bagi petani sebanyak 400 Orang;
- Tersedianya sarana dan prasarana perkebunan tanaman tembakau (sumur bor, pompa air dan hand traktor);
- Terlaksananya bimbingan teknis bagi Gapoktan tentang manajemen PUAP (LKM) sebanyak 90 Orang;
- Terlaksananya pertemuan rutin penyuluh pertanian dan Gapoktan sebanyak 170 pertemuan;
- Terjalinnya kerjasama, antara Gapoktan dan Pelaku Usaha;
- Tersusunnya program kerja Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten sebanyak 260 Orang;
- Terlaksananya bimbingan teknis bagi Gapoktan tentang peningkatan produksi pertanian sebanyak 300 Orang;
- Terlaksananya pelatihan bagi penyuluh untuk peningkatan kompetensi dan kualitas SDM penyuluh sebanyak 96 Orang;
- Terselenggaranya diklat bagi penyuluh pertanian dan perikanan swadaya sebanyak 70 Orang;

- Terlaksananya penilaian peningkatan kinerja bagi Poktan, Gapoktan, dan Penyuluh Pertanian;
- Terlaksananya pelatihan vaksinasi ND bagi peternak di 3 Kecamatan;
- Terselenggaranya kontes ternak unggulan sebanyak 100 Peserta;
- Terlaksananya pembangunan dan renovasi kantor Balai Penyuluh Pertanian sebanyak 8 unit;
- Terlaksananya pelatihan petani tembakau sebanyak 50 Peserta;
- Terlaksananya pelatihan dan pelayanan kesehatan hewan sebanyak 50 Orang;
- Terlaksananya pengawasan ternak korban;
- Terlaksananya sosialisasi hibah ternak kepada 34 kelompok peternak penerima hibah;
- Terlaksananya studi kelayakan Rumah Potong Hewan (RPH) dan pasar Hewan;
- Terlaksananya jaminan pelayanan mutu untuk produk olahan peternakan dan sarana prasarana teknologi peternakan;

Adapun permasalahan pada Urusan Pertanian terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan disebabkan:

- Adanya kenaikan harga mesin panen dan perontok padi (*Combine Harvester*);
- Alat pengolahan gula merah belum terdaftar sebagai ALSINTAN di Kementrian dan belum memiliki SNI sehingga tidak dapat dilaksanakan proses lelang.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pertanian Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Produksi Pertanian ditargetkan 549.485 ton realisasi 553.633 ton;
- Produksi Sayur ditargetkan 17.972 ton realisasi sebesar 11.957 ton;
- Produksi Buah ditargetkan 524.205 Kwintal realisasi sebesar 657.771 Kwintal;

- Produksi Perkebunan ditargetkan 14.018 ton realisasi sebesar 17.302 ton;
- Produksi Peternakan untuk daging ditargetkan 10.610,00 ton realisasi sebesar 10.510,16 ton, telur ditargetkan 2.822,61 ton realisasi sebesar 2.754,96 ton, dan susu ditargetkan 470,16 ton realisasi sebesar 315,00 ton
- Populasi Ternak untuk sapi ditargetkan 48.366 ekor realisasi sebesar 47.697 ekor, kerbau ditargetkan 285 ekor realisasi sebesar 198 ekor, kambing ditargetkan 53.355 ekor realisasi sebesar 66.357 ekor, domba ditargetkan 30.499 ekor realisasi sebesar 30.898 ekor, kuda ditargetkan 324 ekor realisasi sebesar 215 ekor, ayam buras ditargetkan 660.962 ekor realisasi sebesar 663.830 ekor, ayam ras petelur ditargetkan 131.000 ekor realisasi sebesar 140.000 ekor, ayam ras pedaging ditargetkan 2.258.286 ekor realisasi sebesar 6.532.000 ekor, itik ditargetkan 25.892 ekor realisasi sebesar 27.920 ekor, entok dan angsa ditargetkan 13.564 ekor realisasi sebesar 29.478 ekor.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Pertanian adalah petani ada yang beralih ke komoditas lain yang secara ekonomis lebih menguntungkan, hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dimana petani memiliki kebebasan untuk berganti komoditas yang diinginkan.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Pertanian adalah:

- Penghargaan Satya Lencana Pembangunan Pada Acara Pekan Nasional KTNA Ke XIV Tahun 2014;
- Juara 1 Lomba HIPPA Tingkat Bakorwil Pamekasan;
- Juara 2 Lomba HIPPA Tingkat Provinsi Jawa Timur.

2. Urusan Kehutanan

Pada Tahun 2014 Urusan Kehutanan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp875.348.100,00, realisasi sebesar Rp816.166.160,00, tidak terserap Rp59.181.940,00, disebabkan antara lain:

- | | | |
|----------------|----|---------------|
| 1) Efisiensi | Rp | 2.741.940,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp | 56.440.000,00 |

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Peningkatan jumlah kelompok usaha/tani yang telah mengikuti pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- Meningkatnya populasi tanaman untuk penghijauan lingkungan;
- Terbangunnya hutan rakyat;
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang tanaman obat;
- Meningkatnya pengetahuan kelompok tani tentang budidaya bambu sebanyak 200 orang;
- Meningkatnya ketertiban pelaksanaan industri kayu sebanyak 60 Orang;
- Terlaksananya sosialisasi penerapan sistem verifikasi legalitas kayu sebanyak 80 orang.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kehutanan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ditargetkan sebesar 1,3% realisasi 1,36%;
- Produksi hasil hutan untuk Kayu Jati ditargetkan 525 m³ realisasi sebesar 535 m³, non Kayu Jati ditargetkan 58 m³ realisasi sebesar 8.51 m³.

3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Pada Tahun 2014 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan serta Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 9 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.180.430.000,00, realisasi sebesar

Rp1.160.049.756,00, tidak terserap Rp20.380.244,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Badan Penanaman Modal dan Perizinan melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp206.075.000,00, realisasi sebesar Rp194.804.256,00, tidak terserap Rp11.270.744,00, disebabkan adanya efisiensi sebesar Rp11.270.744,00.

3.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp974.355.000,00, realisasi sebesar Rp965.245.500,00, tidak terserap Rp9.109.500,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1) Efisiensi | Rp 7.900.900,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp 1.208.600,00 |

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya Penerbitan Izin Air Tanah sesuai dengan regulasi sebanyak 68 izin;
- Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertambangan sesuai regulasi sebanyak 18 ijin;
- Terlaksananya Sosialisasi hemat energi di Kabupaten Gresik tentang masalah krisis energi dan Konservasi BBM ke BBG sebanyak 60 peserta;
- Terlaksananya Pembinaan dan Pemahaman terhadap masyarakat pemanfaat dan pengguna energi tentang program hemat energi sebanyak 60 orang;
- Terlaksananya Sosialisasi Energi Baru Terbarukan, Konversi Energi dan Penghematan Energi sebanyak 60 orang;
- Tersusunnya Study Kelayakan Terhadap Penataan dan Pengembangan Kelistrikan sebanyak 10 buku;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Kelistrikan, Energi, Mineral dan MIGAS; dan
- Menigkatnya pemahaman masyarakat atas pentingnya pemanfaatan dan penghematan energi dengan memanfaatkan sumber energi lain.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Presentase ABT berijin yang membayar pajak, ditargetkan sebesar 74,06% realisasi 72,22%

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral antara lain kurangnya sosialisasi pembayaran pajak perijinan ABT dan masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak ABT dalam membayar Pajak.

4. Urusan Pariwisata

Pada Tahun 2014 Urusan Pariwisata di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 18 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.053.153.000,00, realisasi sebesar Rp1.823.005.968,00, tidak terserap Rp230.147.032,00, disebabkan antara lain:

- | | | |
|-------------------------------------|----|----------------|
| 1) Efisiensi | Rp | 131.147.032,00 |
| 2) Kegiatan yang tidak dilaksanakan | Rp | 99.000.000,00 |

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pembuatan profil materi wisata Kabupaten Gresik melalui teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata;
- Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri;
- Terlaksananya Pameran Gebyar Wisata Nusantara;
- Terlaksananya Pemilihan Duta Wisata Cak Yuk;
- Dikenalnya potensi pariwisata Gresik khususnya dalam bidang kuliner dan berbagai souvenir khas Gresik;
- Terlaksananya pemilihan Cak yuk yang berkualitas dan berwawasan;
- Terlibatnya masyarakat dalam pelestarian kawasan wisata;
- Meningkatnya kualitas sarana wisata diobjek wisata unggulan;
- Meningkatnya kualitas sarana prasarana dikawasan wisata giri;
- Meningkatnya promosi wisata;

- Tercapainya peningkatan wawasan tentang usaha pariwisata;
- Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pendataan obyek wisata dan jasa usaha pariwisata;
- Terlaksananya kelancaran penarikan retribusi dan kenyamanan bagi pengunjung;
- Tercapainya pengenalan/promosi potensi daerah/ciri khas Gresik;
- Tercapainya presentase peningkatan wawasan duta wisata untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan pariwisata Kabupaten Gresik;
- Tercapainya peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
- Tercapainya presentase meningkatnya pengetahuan duta wisata ke masyarakat, instansi yang ada di Kabupaten Gresik;
- Tercapainya presentase jumlah kunjungan wisata kepada obyek daya tarik yang sedang di promosikan;

Adapun permasalahan pada Urusan Pariwisata adalah tidak dilaksanakannya pembangunan pos penarikan retribusi di Prambangan. Adapun solusi permasalahan pada Urusan Pariwisata adalah penarikan retribusi dilaksanakan di kawasan wisata (parkir Sunan Giri);

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pariwisata Tahun 2014 adalah Jumlah kunjungan wisata ditargetkan sebanyak 1.460.000 orang realisasi 3.620.974 orang.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada Tahun 2014 Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 12 program terdiri 50 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp11.781.453.697,00 realisasi sebesar Rp8.971.474.260,00 tidak terserap Rp2.809.979.437,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi	Rp	139.739.572,00
2) Sisa Lelang	Rp	885.243.865,00

3) Lelang gagal Rp 1.784.996.000,00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya patroli pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan sebanyak 10 kali;
- Tersedianya speed boat pengawasan dan kelengkapannya sebanyak 1 unit;
- Terlaksananya sosialisasi potensi sumberdaya laut menjaga kelestarian terumbu karang sebanyak 140 orang;
- Terlaksananya pameran potensi bahari;
- Terlaksananya sosialisasi tentang program PITAP pada 1 Poklina;
- Tersedianya sarana laboratorium kelautan, perikanan dan peternakan;
- Terlaksananya sosialisasi demplot udang vaname;
- Terlaksananya sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan sebanyak 50 buah;
- Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan perikanan tangkap sebanyak 60 Orang;
- Terlaksananya pendataan potensi kelautan dan perikanan di 3 Kecamatan;
- Terlaksananya Sosialisasi Program Usaha Mina Perdesaan (PUMP) dan Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) pada 9 poklhasar;
- Terlaksananya sosialisasi PUMP–PB pada 36 Pokdakan;
- Terbangunnya sarana dan prasarana pabrik es;
- Tersedianya bibit ikan dan udang;
- Terlaksananya pembuatan saluran tambak tersier sebanyak 4 paket;
- Terlaksananya pembangunan Los TPI;
- Terlaksananya pengadaan jaring nelayan;
- Terbangunnya tambatan perahu;
- Terlaksananya sosialisasi dan terbangunnya stan pasar hasil pengolahan sebanyak 25 orang;
- Terbangunnya bangsal pengolahan hasil perikanan sebanyak;
- Terlaksananya pengadaan cool box;

- Terlaksananya pembangunan Infrastruktur dan tersedianya alat laboratorium Balai Benih Ikan (BBI); dan
- Terbangunnya dermaga;

Adapun permasalahan pada Urusan Kelautan dan Perikanan adalah Perencanaan pengadaan kapal penangkapan ikan yang dibuat melalui dana DAK tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan DAK Tahun 2014. Solusi permasalahan tersebut adalah menjadi Dana SILPA untuk dilaksanakan pada tahun 2015

Capaian indikator sasaran meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan di Urusan Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut:

- Produksi Perikanan Budi daya udang windu ditargetkan 1.975 ton realisasi sebesar 3.375,70 ton, udang vannamee ditargetkan 4.100 ton realisasi sebesar 6.237,08 ton, bandeng ditargetkan 36.840 ton realisasi sebesar 65.975,68 ton, kerapu ditargetkan 11 ton realisasi sebesar 66.71 ton, nila ditargetkan 1.138 ton ditahun realisasi sebesar 2.354,89 ton.
- Produksi Perikanan penangkapan ditargetkan 17.500 ton sedangkan realisasi sebesar 17.379,23 ton.
- Produksi Perikanan perairan umum ditargetkan 675 ton realisasi sebesar 916,75 ton.
- Produktivitas tambak payau ditargetkan 101,11 ton/Ha realisasi sebesar 258,82 ton/Ha.
- Produktivitas tambak tawar ditargetkan 116,87 ton/Ha realisasi sebesar 301.215 ton/Ha.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Kelautan dan Perikanan adalah Juara I Kategori Nelayan Tradisional Teladan Tingkat Propinsi Jawa Timur

6. Urusan Perdagangan

Pada Tahun 2014 Urusan Perdagangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 10 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp2.088.728.350,00 realisasi sebesar Rp1.877.499.975,00 tidak terserap Rp211.228.375,00 dengan rincian sebagai berikut:

6.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 6 program terdiri 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.895.223.350,00 realisasi sebesar Rp1.686.081.875,00 tidak terserap Rp209.141.475,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp 44.141.475,00
- 2) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp 165.000.000,00

6.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp193.505.000,00 realisasi sebesar Rp 191.418.100,00 tidak terserap Rp2.086.900,00, disebabkan efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya laporan hasil pengawasan barang yang memenuhi standart mutu 4 komoditi;
- Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrollogian daerah;
- Terselenggaranya pelatihan ekspor dan wirausaha;
- Terlaksananya operasi pasar murah 4 hari;
- Terselenggaranya kegiatan pembinaan Organisasi PKL dan Asongan 25 PKL dan asongan;
- Terpeliharanya sarana prasarana pasar di 5 UPTD; dan
- Terkumpulnya informasi tentang peredaran rokok yang dilekati pita cukai illegal dan rokok yang tidak dilekati pita cukai.

Adapun permasalahan pada Urusan Perdagangan pada Kegiatan Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Masyarakat di Sektor Industri Olahan Pangan di Lingkungan Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau tidak dilaksanakan karena Gresik bukan daerah Industri Hasil Tembakau.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perdagangan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan penerbitan SIUP ditargetkan 11,50% realisasi sebesar 15,61%;
- Pertumbuhan penerbitan TDP ditargetkan 10,3% realisasi sebesar 2,7%;
- Pertumbuhan penerbitan TDG ditargetkan 16,92% realisasi sebesar 18,37%;
- Pertumbuhan nilai investasi perdagangan ditargetkan 1,60% realisasi sebesar 1,99%;
- Jumlah Pameran/Ekspo per tahun ditargetkan 3 even realisasi sebesar 40 even.

Adapun penyebab tidak tercapainya target indikator RPJM urusan Perdagangan pada indikator kinerja Pertumbuhan Penerbitan TDP karena penerbitan TDP sesuai dengan permohonan ijin yang masuk, disamping itu masa berlakunya ijin selama 5 tahun.

7. Urusan Industri

Pada Tahun 2014 Urusan Perindustrian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 9 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.001.867.300,00 realisasi sebesar Rp980.942.550,00, tidak terserap Rp20.924.750,00, disebabkan efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terbentuknya Jaringan Klaster Industri 3 Sentra IKM (120 Orang);
- Tersedianya Data base Sentra IKM;
- Tersusunnya Standar Mutu Kabupaten;
- Terlaksananya Sosialisasi Kelengkapan Legalitas IKM bagi 120 IKM;
- Terlaksananya kegiatan fasilitas bagi IKM 160 Peserta;
- Terlaksananya Pelatihan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri di 3 sentra sebanyak 120 peserta;

- Terlaksananya Sosialisasi Produk IKM sebanyak 80 IKM;
- Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Limbah bagi IKM;
- Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Produk IKM sebanyak 80 orang;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perindustrian Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan jumlah industri ditargetkan 1% realisasi sebesar 1,15%.
- Pertumbuhan nilai produksi ditargetkan 3,5% realisasi sebesar 3,5%.

C. Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pada Tahun 2014 dialokasikan anggaran untuk belanja Hibah sebesar Rp112.202.416.000,00 realisasi sebesar Rp103.401.483.000,00, tidak terserap Rp8.800.933.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

dengan rincian sbb:

- a. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp26.489.500.000,00 realisasi sebesar Rp21.080.643.000,00 tidak terserap sebesar Rp5.408.857.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. KPUD. Kabupaten Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap Rp1.000.000.000,00;
 2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.500.000.000 realisasi sebesar Rp4.500.000.000;
 3. Kwartir Pramuka Kab. Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 realisasi sebesar Rp976.043.000,00 tidak terserap Rp523.957.000,00;
 4. Dewan Masjid Indonesia (DMI) dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 realisasi sebesar Rp400.000.000,00;
 5. Majelis Ulama Islam (MUI) dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 realisasi sebesar Rp400.000.000,00;

6. Dekranasda Kab. Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 realisasi sebesar Rp400.000.000,00;
7. KPA (Komisi Penanggulangan Aids) dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 realisasi sebesar Rp150.000.000,00;
8. Kantor NU Cabang Bawean dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp100.000.000,00;
9. Bamag (Badan Musyawarah Antar Gereja) dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp100.000.000,00;
10. PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp100.000.000,00;
11. Dekopinda Kab. Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp100.000.000,00;
12. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bl. Panggang dengan alokasi anggaran sebesar Rp80.000.000,00 realisasi sebesar Rp80.000.000,00;
13. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Dukun dengan alokasi anggaran sebesar Rp80.000.000,00 realisasi sebesar Rp80.000.000,00;
14. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Panceng dengan alokasi anggaran sebesar Rp80.000.000,00 realisasi sebesar Rp80.000.000,00;
15. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sidayu dengan alokasi anggaran sebesar Rp80.000.000,00 realisasi sebesar Rp80.000.000,00;
16. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Uj. Pangkah dengan alokasi anggaran sebesar Rp80.000.000,00 realisasi sebesar Rp80.000.000,00;
17. RQH (Robithoh Hamalatil Qur'an) dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 realisasi sebesar Rp75.000.000,00;
18. Karang Taruna Karya Utama dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap Rp50.000.000,00;
19. Kantor MWC NU dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 realisasi sebesar Rp30.000.000,00;

20. Piveri (Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia) dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000 realisasi sebesar Rp15.000.000;
 21. DHC 45 (Dewan Harian Cabang) dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000,00 realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
 22. Karang Wreda Lansia Gending dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000,00 realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
 23. Koperasi/IKM/UKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp695.000.000,00 realisasi sebesar Rp600.000.000,00 tidak terserap Rp95.000.000,00;
 24. Bumdes dengan alokasi anggaran sebesar Rp112.000.000,00 realisasi sebesar Rp112.000.000,00; dan
 25. Sekolah Swasta (SD/SMP/SMA/TPQ/MADIN/PONPES SEDERAJAT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.342.500.000,00 realisasi sebesar Rp12.604.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp3.738.500.000,00.
- b. Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp12.442.800.000,00 realisasi sebesar Rp10.772.300.000,00 tidak terserap sebesar Rp 1.670.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pokmas Barokah dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000,00 realisasi sebesar Rp125.000.000,00;
 2. Pokmas Usaha Mandiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000,00 realisasi sebesar Rp125.000.000,00;
 3. Pokmas Harapan Jaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000,00 realisasi sebesar Rp125.000.000,00;
 4. Pokmas Mulyo I dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000,00 realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
 5. Pokmas Mulyo II dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000,00 realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
 6. Pokmas Mulyo III dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000,00 realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
 7. Pokmas Mulyo IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000,00 realisasi sebesar Rp10.000.000,00;

8. Pokmas Mulyo V dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000,00 realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
 9. Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Desa Karangrejo dengan alokasi anggaran sebesar Rp220.000.000,00 realisasi sebesar Rp220.000.000,00;
 10. Hibah Peternak dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.315.300.000,00 realisasi sebesar Rp2.315.300.000,00;
 11. Tempat Ibadah dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.382.500.000,00 realisasi sebesar Rp7.712.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp 1.670.500.000,00;
 12. Hibah Untuk Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp100.000.000,00.
- c. Belanja Hibah Dana Bos Daerah sebesar Rp60.334.116.000,00 realisasi sebesar Rp 58.855.840.000,00 tidak terserap Rp1.478.276.000,00.
1. BOP SD Sederajat (442 lbg) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.549.207.000,00 realisasi sebesar Rp7.453.050.000,00 tidak terserap sebesar Rp96.157.000,00;
 2. BOP SMP Sederajat (217 lbg) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.802.344.000,00 realisasi sebesar Rp12.598.230.000,00 tidak terserap sebesar Rp204.114.000,00;
 3. BOP SLTA Sederajat (147 Lbg) dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.970.615.000,00 realisasi sebesar Rp15.675.185.000,00 tidak terserap sebesar Rp295.430.000,00;
 4. BOP TPA/TPQ/MADIN/TK/RA/PAUD/KOBER (3.179 Lbg) dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.323.340.000,00 realisasi sebesar Rp21.529.060.000,00 tidak terserap sebesar Rp794.280.000,00;
 5. BOP Ponpes (130 Ponpes) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.107.380.000,00 realisasi sebesar Rp1.069.660.000,00 tidak terserap sebesar Rp37.720.000,00;

6. BOP Paket ABC (21 Lbg) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 581.230.000,00 realisasi sebesar Rp530.655.000,00 tidak terserap sebesar Rp50.575.000,00.
- d. Belanja Hibah Dana Bos Provinsi sebesar Rp12.936.000.000,00 realisasi sebesar Rp12.692.700.000,00 tidak terserap sebesar Rp243.300.000,00.
 1. BPPDGS (BK Propinsi) dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.376.000.000,00 realisasi sebesar Rp11.132.700.000,00 tidak terserap sebesar Rp243.300.000,00;
 2. BOS SMA(BKSM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.560.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.560.000.000,00.

Adapun Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp 28.972.465.000,00 realisasi sebesar Rp 27.024.005.000,00 tidak terserap Rp 1.948.460.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.074.765.000,00 realisasi sebesar Rp 2.924.765.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - DDUB PNPM Perdesaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.478.265.000,00 realisasi sebesar Rp2.478.265.000,00;
 - DDUB PNPM Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp511.250.000,00 realisasi sebesar Rp511.250.000,00;
 - BADAN / LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT dengan alokasi anggaran sebesar Rp85.250.000,00 realisasi sebesar Rp85.250.000,00.
2. Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.897.700.000,00 realisasi sebesar Rp 24.099.240.000,00 tidak terserap sebesar Rp 1.798.460.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Santunan Janda Miskin dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.199.800.000,00 realisasi sebesar Rp6.199.800.000,00;

- Santunan Yatim dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.984.400.000,00 realisasi sebesar Rp1.984.200.000,00 tidak terserap sebesar Rp200.000,00;
- Bantuan Rehab Rumah Keluarga Miskin dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.685.500.000,00 realisasi sebesar Rp6.755.500.000,00 tidak terserap sebesar Rp930.000.000,00;
- Santunan Kematian dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.971.000.000,00 realisasi sebesar Rp7.954.500.000,00 tidak terserap sebesar Rp16.500.000,00;
- Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp367.040.000,00 tidak terserap sebesar Rp632.960.000,00;
- Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.057.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.050.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp7.000.000,00.

Adapun Belanja Bantuan Bagi Hasil pada Tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp4.540.846.800,00 realisasi sebesar Rp638.334.900,00 tidak terserap Rp3.902.511.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Bagi hasil PBB kepada Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap sebesar Rp3.000.000.000,00;
- Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.540.846.800,00 realisasi sebesar Rp638.334.900,00 tidak terserap sebesar Rp902.511.900,00.

D. Pelaksanaan Bantuan Keuangan

Pada Tahun 2014 Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp206.603.794.700,00 realisasi sebesar Rp192.277.210.950,00, tidak terserap Rp14.326.583.750,00 dengan rincian sebagai berikut:
dengan rincian sbb:

1. Bantuan Keuangan Kepada Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp205.821.733.400,00 realisasi sebesar Rp191.495.149.650,00 tidak terserap sebesar Rp14.326.583.750,00 yang dipergunakan untuk:
 - ADD dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.500.000.000,00 realisasi sebesar Rp38.499.999.650 tidak realisasi sebesar Rp350,00;
 - Tunjangan Aparatur Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.889.600.000,00 realisasi sebesar Rp50.976.500.000,00 tidak terserap sebesar Rp8.913.100.000,00;
 - Tunjangan BPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.068.000.000,00 realisasi sebesar Rp10.121.700.000,00 tidak terserap sebesar Rp2.946.300.000,00;
 - Purna Tugas Perangkat dan Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp735.000.000,00 realisasi sebesar Rp232.500.000,00 tidak terserap sebesar Rp502.500.000,00;
 - Kompensasi Sekdes Non Pns dengan alokasi anggaran sebesar Rp340.000.000,00 realisasi sebesar Rp60.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp280.000.000,00;
 - Bantuan Pelaksanaan Pilkades dengan alokasi anggaran sebesar Rp328.883.400,00 realisasi Rp0,00 tidak terserap sebesar Rp328.883.400,00;
 - RT / RW dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.164.000.000 realisasi sebesar Rp realisasi sebesar Rp3.164.000.000,00;
 - Jalan Poros Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.246.125.100,00 realisasi sebesar Rp34.245.800.000,00 tidak terserap sebesar Rp325.100,00;
 - Insfrastruktur Desa Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.152.374.900,00 realisasi sebesar Rp37.002.300.000,00 tidak terserap sebesar Rp150.074.900,00;
 - Jalan Usaha Tani dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.225.000.000,00 realisasi sebesar Rp7.092.600.000,00 tidak terserap sebesar Rp132.400.000,00;

- Jitut dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.050.000.000,00 realisasi sebesar Rp3.050.000.000,00;
- Balai Desa / Balai Dusun dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.410.500.000,00 realisasi sebesar Rp4.410.500.000,00
- Gapuro Desa / Dusun dengan alokasi anggaran sebesar Rp290.000.000,00 realisasi sebesar Rp290.000.000,00
- Pasar Desa / Pasar Hewan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.417.500.000,00 realisasi sebesar Rp1.417.500.000,00
- Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp881.750.000,00 realisasi sebesar Rp831.750.000,00 tidak terserap sebesar Rp50.000.000,00.
- Lumbung Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp100.000.000,00;
- Pariwisata Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp240.000.000,00 realisasi sebesar Rp,00 tidak terserap sebesar Rp240.000.000,00;
- Sarana Olahraga Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp783.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap sebesar Rp783.000.000,00.

E. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik pada Tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp782.061.300,00 realisasi sebesar Rp782.061.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Partai Politik Hati Nurani Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.350.500,00 realisasi sebesar Rp33.350.500,00;
2. Belanja Bantuan Partai Politik Gerakan Indonesia Raya dengan alokasi anggaran sebesar Rp28.144.900,00 realisasi sebesar Rp28.144.900,00;
3. Belanja Bantuan Partai Politik Politik Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.676.500 realisasi sebesar Rp8.676.500,00;

4. Belanja Bantuan Partai Politik Amanat Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp62.528.100,00 realisasi sebesar Rp62.528.100,00;
5. Belanja Bantuan Partai Politik Kebangkitan Bangsa dengan alokasi anggaran sebesar Rp161.693.100,00 realisasi sebesar Rp161.693.100,00;
6. Belanja Bantuan Partai Politik Golongan Karya dengan alokasi anggaran sebesar Rp107.296.900,00 realisasi sebesar Rp107.296.900,00;
7. Belanja Bantuan Partai Politik Persatuan Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.970.100,00 realisasi sebesar Rp 50.970.100,00;
8. Belanja Bantuan Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp105.175.200,00 realisasi sebesar Rp105.175.200,00;
9. Belanja Bantuan Partai Politik Demokrat dengan alokasi anggaran sebesar Rp122.759.500,00 realisasi sebesar Rp122.759.500,00;
10. Belanja Bantuan Partai Politik Kebangkitan Nasional Ulama dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.441.800,00 realisasi sebesar Rp90.441.800,00;
11. Belanja Bantuan Partai Politik Buruh dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.024.700,00 realisasi sebesar Rp11.024.700,00.

F. Pelaksanaan Bantuan Belanja Tidak Terduga

Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp577.185.000,00 tidak terserap sebesar Rp2.422.815.000,00.

Adapun rincian pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing SKPD di Kabupaten Gresik sebagaimana dalam Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014 (Buku I dan Buku II), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sehingga tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan lebih efisien dan efektif.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Gresik menerima tugas pembantuan dari Pemerintah sebanyak 5(lima) urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan;
2. Urusan Tenaga Kerja;
3. Urusan Kesehatan;
4. Urusan Pertanian;
5. Urusan Kependudukan.

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Dasar Hukum

- a. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-032.04.4.4.059116/2014;
- b. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-032.06.4.059040/2014;
- c. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-032.07.4.059041/2014.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan: Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik
4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya:

1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

1.1. Kegiatan : Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

Lokasi	: Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp32.040.000,00
- Realisasi	: Rp32.040.000,00 (100%)
Keluaran	: Monitoring HPI, Obat Ikan Kimia Biologis dan Lingkungan
- Target	: 33 kali monitoring
- Realisasi	: 33 kali monitoring
Hasil	Jumlah Laboratorium Uji Kualitas Air, Hama Penyakit Ikan (HPI) dan Residu yang memenuhi standart teknis
- Target	: 1 unit
- Realisasi	: 1 unit

1.2. Kegiatan : Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan

Lokasi	: Kecamatan Sidayu
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana

- Target : Rp65.790.000,00
- Realisasi : Rp65.782.400,00 (99,9%)
- Keluaran : Terselenggaranya koordinasi dan Perencanaan Kelompok Pembudidaya Ikan di Kawasan Minapolitan
- Target : 12 bulan
- Realisasi : 12 bulan
- Hasil : Pengembangan kawasan Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya
- Target : 1 Kawasan
- Realisasi : 1 Kawasan

1.3. Kegiatan : Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan

- Lokasi : Kecamatan Ujungpangkah
- Realisasi Fisik : 100%
- Tolok Ukur Kinerja
- Masukan : Jumlah Dana
- Target : Rp607.210.000,00
- Realisasi : Rp542.248.000,00 (89,3%)
- Keluaran : Pengembangan Denfarm Budidaya Ikan/Udang dan bantuan sarana prasarana
- Target : 1 kelompok
- Realisasi : 1 kelompok
- Hasil : Jumlah Pembudidaya yang menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya
- Target : 1 kelompok
- Realisasi : 1 kelompok

1.4. Kegiatan : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya

Lokasi	: Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp94.960.000,00
- Realisasi	: Rp90.465.800,00 (95,27%)
Keluaran	: Jumlah perencanaan kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data teknis dan akurat
- Target	: 1 dokumen
- Realisasi	: 1 dokumen
Hasil	: Operasional Pengelolaan Satker
- Target	: 12 bulan
- Realisasi	: 12 bulan

2. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

2.1. Kegiatan : Fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Lokasi	: Kecamatan Sidayu
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp300.000.000,00
- Realisasi	: Rp275.452.000,00 (91,82%)
Keluaran	: Fasilitas pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
- Target	: 1 lokasi
- Realisasi	: 1 lokasi

Hasil	:	Meningkatnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional
- Target	:	10%
- Realisasi	:	10%

2.2. Kegiatan : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP

Lokasi	:	Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik	:	100%
Tolok Ukur Kinerja		
Masukan	:	Jumlah Dana
- Target	:	Rp88.394.000,00
- Realisasi	:	Rp74.262.400,00 (84.01%)
Keluaran	:	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
- Target	:	1 paket
- Realisasi	:	1 paket
Hasil	:	Tertibnya administrasi pengelolaan dan pelaporan satker
- Target	:	12 bulan
- Realisasi	:	12 bulan

3. Program Pengelolaan Sumber Daya laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

3.1. Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha

Lokasi	:	Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik	:	100%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan	:	Jumlah Dana
- Target	:	Rp776.530.000,00
- Realisasi	:	Rp747.961.140,00 (96,32%)
Keluaran	:	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat/PUGAR dan pembangunan gudang penyimpanan garam)
- Target	:	5 kelompok
- Realisasi	:	5 kelompok
Hasil	:	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan
- Target	:	5 kelompok
- Realisasi	:	5 kelompok

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

- APBN	:	Rp1.964.924.000,00
- APBD	:	Rp -
Jumlah	:	Rp1.964.924.000,00

B. Urusan Ketenagakerjaan

1. Dasar Hukum:

DIPA Nomor: 026.04.4.059454/2014 Tanggal 5 Desember 2013

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan:

Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan:

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja.

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaanya:

1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

1.1 Kegiatan : Administrasi Kegiatan

Lokasi	: Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp58.000.000,00
- Realisasi	: Rp57.325.000,00 (98,84%)
Keluaran	: Kelancaran Administrasi Kegiatan
- Target	: 1 Tahun
- Realisasi	: 1 Tahun
Hasil	: Terselenggaranya Administrasi Kegiatan dengan Lancar
- Target	: 100%
- Realisasi	: 100%

1.2 Kegiatan : Padat Karya Infrastruktur I

Lokasi	: Desa Klotok Kecamatan Balongpanggang
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp235.260.000,00
- Realisasi	: Rp235.212.378,00 (99,98%)
Keluaran	: Penyerapan Tenaga Kerja
- Target	: 88 Orang
- Realisasi	: 88 Orang
Hasil	: Perbaikan Jalan Desa/Lingkungan (plengsengan)
- Target	: 150 m
- Realisasi	: 150 m

1.3 Kegiatan	: Padat Karya Infrastruktur II
Lokasi	: Desa Mentaras Kecamatan Dukun
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp235.260.000,00
- Realisasi	: Rp235.257.390,00 (99,99%)
Keluaran	: Penyerapan Tenaga Kerja
- Target	: 88 Orang
- Realisasi	: 88 Orang
Hasil	: Perbaikan Jalan Desa/Lingkungan (paving)
- Target	: 147 m
- Realisasi	: 147 m

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

- APBN	: Rp528.520.000,00
- APBD	: Rp -
Jumlah	: Rp528.520.000,00

C. Urusan Kesehatan

a. 1. Dasar Hukum:

DIPA Nomor: SP DIPA-024-03.4.059455/2014 Tanggal 5 Desember 2013

2. Instansi pemberi tugas pembantuan: KEMENKES RI

3. Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

4. Program dan Kegiatan Yang diterima dan Pelaksanaanya:

1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak

1.1 Kegiatan	: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Lokasi	: Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik	: 100%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan	:	Jumlah Dana
- Target	:	Rp2.950.800.000,00
- Realisasi	:	Rp2.929.280.500,00 (99,27%)
Keluaran	:	Terlaksananya kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan di Puskesmas
- Target	:	32 Puskesmas
- Realisasi	:	32 Puskesmas
Hasil	:	Peningkatan kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan di Puskesmas
- Target	:	100%
- Realisasi	:	100%

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN	:	Rp2.950.800.000,00
- APBD	:	Rp -
Jumlah	:	Rp2.950.800.000,00

b. 1. Dasar Hukum:

DIPA Nomor: SP DIPA-024.04.4.050150/2014 Tanggal 21 Oktober 2014

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementerian Kesehatan RI

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan: RSUD Ibnu Sina
Kabupaten Gresik

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaanya:

1. Program	:	Pembinaan Upaya Kesehatan
1.1 Kegiatan	:	Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB
Lokasi	:	RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik	:	57,14%
Tolok Ukur Kinerja	:	
Masukan	:	Jumlah dana

- Target : Rp20.000.000.000,00
- Realisasi : Rp7.772.535.650,00 (38,86%)
- Alasan tidak terserap :
- Gagal Lelang : Rp12.227.464.350,00
- Keluaran : Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB
- Target : 14 macam
- Realisasi : 8 macam
- Hasil : Meningkatnya Upaya Kesehatan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Target : 100%
- Realisasi : 75%
- Permasalahan dan Solusi
- Permasalahan : Sebanyak 2 (dua) paket pengadaan alat kesehatan tidak direalisasi karena gagal lelang.
- Solusi : Diajukan kembali pada APBN melalui E-Planing tahun 2015

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp20,000,000,000.00
- APBD : Rp -
- Jumlah** : Rp20,000,000,000.00

D. Urusan Pertanian

a. 1. Dasar Hukum:

DIPA Nomor: SP DIPA-018.04.4.059453/2014 Tanggal 5 Desember 2013

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jendral Hortikultura

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan:

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya:

**1. Program Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produksi
Tanaman Hortikultura Berkelanjutan**

**1.1. Kegiatan : Peningkatan Produktivitas dan
Mutu Produksi Tanaman Buah
Berkelanjutan**

Lokasi	: Kec. Panceng
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp. 936.225.000,00
- Realisasi	: Rp. 734.107.550,00 (78,46%)
Keluaran	: Pengembangan kawasan buah dan Sekolah Lapang-Good Agriculture Practice(SL-GAP) Mangga Malaba
- Target	: 80 ha dan 4 Poktan
- Realisasi	: 80 ha dan 4 Poktan
Hasil	: Terlaksananya pengembangan kawasan buah dan SL-GAP
- Target	: 80 ha dan 4 Poktan
- Realisasi	: 80 ha dan 4 Poktan

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN	: Rp936.225.000,00
- APBD	: Rp -
Jumlah	: Rp936.225.000,00

b. 1. Dasar Hukum:

DIPA Nomor: SP DIPA-018.03.4.059115/2014 Tanggal 5 Desember 2013

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan:

Kementrian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jendral Tanaman Pangan

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan:

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya:

1. Program Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produksi

**Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan
Swasembada Berkelanjutan**

**1.1. Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka
Kacang dan Umbi**

Lokasi : 5 Kecamatan

Realisasi Fisik : 67,56%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp1.124.800.000,00

- Realisasi : Rp759.964.400,00 (67,56%)

Keluaran : - Luas pengembangan budidaya kedelai
melalui Sekolah Lapang Pengelolaan
Tanaman Terpadu (SLPTT)

- Luas pengembangan budidaya kedelai
melalui Perluasan Areal Tanam (PAT)

- Laporan pelaksanaan SLPTT

- Target : SLPTT 500 ha, PAT 500 ha dan 1 laporan

- Realisasi : SLPTT 300 ha, PAT 350 ha dan 1 laporan

Hasil : Tercapainya pengembangan budidaya kedelai
melalui SLPT dan perluasan areal tanaman

- Target : 100%

- Realisasi : 67,56%

Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan : Kegiatan SLPTT dan PAT terealisasi seluas
300 ha dan 350 ha karena sesuai dengan
arahan dari Kementerian Pertanian agar
dilakukan penghematan anggaran dengan

mengurangi luasan SLPTT dan PAT.

- Solusi : Diusulkan kembali pada APBN tahun berikutnya.

1.2. Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal

- Lokasi : 11 Kecamatan
- Realisasi Fisik : 100%
- Tolok Ukur Kinerja
- Masukan : Jumlah Dana
- Target : Rp3.545.600.000,00
- Realisasi : Rp3.509.285.000,00 (98,98%)
- Keluaran : Luas pengembangan budidaya komoditas sereal melalui SLPTT
- Target : SLPTT 13.000 ha dan Laporan pelaksanaan SLPTT 2 laporan.
- Realisasi : SLPTT 13.000 ha dan Laporan pelaksanaan SLPTT 2 laporan.
- Hasil : Tercapainya pengembangan budidaya komoditas sereal melalui SLPTT
- Target : 100%
- Realisasi : 99,49%

1.3. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Fisik : 100%
- Tolok Ukur Kinerja
- Masukan : Jumlah Dana
- Target : Rp40.000.000,00
- Realisasi : Rp25.100.000,00 (62,75%)

Keluaran	: Jumlah laporan yang berkaitan dengan kegiatan perbenihan
- Target	: 1 laporan
- Realisasi	: 1 laporan
Hasil	: Tersusunnya laporan yang berkaitan dengan kegiatan pembenihan
- Target	: 100%
- Realisasi	: 100%

1.4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

Lokasi	: Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp70.000.000,00
- Realisasi	: Rp43.999.680,00 (62,86 %)
Keluaran	: Tersusunnya rancangan program, kegiatan dan rencana kerja serta laporan kegiatan tanaman pangan
- Target	: 2 Renja Tanaman Pangan dan 3 laporan
- Realisasi	: 2 Renja Tanaman Pangan dan 3 laporan
Hasil	: Rancangan program, kegiatan dan rencana kerja serta laporan kegiatan tanaman pangan sesuai petunjuk teknis
- Target	: 100%
- Realisasi	: 100%

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN	: Rp4.780.400.000,00
- APBD	: Rp -
Jumlah	: Rp4.780.400.000,00

E. Urusan Kependudukan

1. Dasar Hukum:

DIPA Nomor: SP DIPA-010.08.4.050151/2014 Tanggal 25 September 2013

2. Instansi Pemberi Tugas: Kementrian Dalam Negeri (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Gresik

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya:

1. Program Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

1.1 Kegiatan : Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : -

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp1.356.370.000,00

- Realisasi : Rp59.919.010,00

Keluaran : Terselenggaranya koordinasi dalam rangka pengembangan sistim administrasi kependudukan

- Target : 1 Paket

- Realisasi : 1 Paket

Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana sistem administrasi kependudukan

- Target : 1 Paket

- Realisasi : -

Permasalahan dan :

Solusi

- Permasalahan : a. Pengadaan Tinta/ribbon, film printer dan pembersih printer dengan nilai Rp629.695.000 tidak terealisasi karena penyedia barang tidak bisa memenuhi pengadaan belanja sehingga dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK
- b. Sebagian alokasi anggaran untuk pengadaan barang dan jasa telah dianggarkan dalam APBD
- Solusi : Setelah koordinasi dengan Dirjen Adminduk, akan diusulkan untuk dianggarkan pada APBN TA 2015

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp1.356.370.000,00
- APBD : Rp-
- Jumlah : Rp1.356.370.000,00**

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Gresik merupakan salah satu substansi penting sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, untuk diinformasikan dan merupakan bagian keterangan pertanggungjawaban Bupati Gresik kepada DPRD Kabupaten Gresik, sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat.

Adapun bidang penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:

- A. Kerjasama antar daerah;
- B. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- C. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- D. Pembinaan batas wilayah;
- E. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- F. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Memenuhi amanat ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) di Kabupaten Gresik pada tahun 2014 dapat dilaporkan sebagai berikut:

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan

Kebijakan kerjasama daerah di Kabupaten Gresik secara eksplisit merupakan bagian dari Misi kedua pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2011-2015, yaitu "Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik".

Kebijakan ini mengacu dan atau sejalan dengan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Oleh karena itu untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

2.1. Kegiatan : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik

Daerah yang bekerjasama : **Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Nomor : 120.1/ 86 /0121/2014

Nomor : 180/ 20.1 /437.12/2014

SKPD yang melaksanakan : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Tanggal : 3 Maret 2014

Realisasi capaian indikator output/keluaran dan outcome/hasil:

- Output/Keluaran : Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang pembiayaannya dibiayai 50% dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 50% oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.
 - Outcome/Hasil : Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Gresik untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien.
- Jangka Waktu : 1 (satu) tahun

2.2. Kegiatan : Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Tahun 2014

- Daerah yang bekerjasama : **Pemerintah Provinsi Jawa Timur**
- Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Nomor : 180/ 4 /437.12/2014
 Nomor : 120.1/ 29 /012/2014
- SKPD yang melaksanakan : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
- Tanggal : 20 Januari 2014
- Realisasi capaian indikator output/keluaran dan outcome/hasil:
- Output/Keluaran : - Peningkatan sarana polindes menjadi Ponkesdes sebanyak 225 Ponkendes;
 - Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Rawat Inap PLUS sebanyak 1 Puskesmas;

- Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Rawat Inap Standart sebanyak 2 Puskesmas;
 - Pengembangan Taman Posyandu;
 - Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Buruk;
 - Pembelian Alat-Alat Kesehatan.
- Outcome/Hasil : Mendekatkan sarana pelayanan kesehatan pada masyarakat.
- Jangka Waktu : 1 (satu) tahun

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan

Seiring dengan dinamisnya pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki peluang yang sangat besar untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dijamin dalam Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kerjasama dengan pihak ketiga meliputi:

- a. Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
- c. Kerjasama investasi; dan
- d. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

2.1. Kegiatan : Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

Pihak Ketiga yang : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Nomor : 001/PKS-Gresik/II/2014

Tentang Pengelolaan dan Penatausahaan
Dana Deposito Berjangka

SKPD yang : DPPKAD Kabupaten Gresik
melaksanakan

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi capaian indikator output/keluaran dan outcome/hasil:

- Output/Keluaran : Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten
Gresik pada PT. Bank Bukopin dalam bentuk
Deposito Berjangka

- Outcome/Hasil : Pendapatan Asli Daerah

Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu deposito berjangka

**2.3. Kegiatan : Pengelolaan dan Penatausahaan Dana
Deposito Berjangka**

Pihak Ketiga yang : PT. Bank Rakyat Indonesia
bekerjasama

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara
Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Nomor : 180/ 6667 /437.12/2014

Nomor : B.4944A/KC-IX/OPS/10/2014

Tentang Pengelolaan dan Penatausahaan
Dana Deposito Berjangka

SKPD yang : DPPKAD Kabupaten Gresik
melaksanakan

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi capaian indikator output/keluaran dan outcome/hasil:

- Output/Keluaran : Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Outcome/Hasil : Pendapatan Asli Daerah
- Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu deposito berjangka

2.4. Kegiatan : Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

- Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Nomor : 180/ 6656 /437.12/2014
 Nomor : 8BR-GRK.100/IX/2014
 Tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka
- SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi capaian indikator output/keluaran dan outcome/hasil:
- Output/Keluaran : Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Outcome/Hasil : Pendapatan Asli Daerah
- Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu deposito berjangka

2.5. Kegiatan : Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014

Pihak Ketiga yang bekerjasama : Direktorat Jenderal Pemberdayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri tentang Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Nomor : N PUB-14-25/PNPM Mandiri Perdesaan/I/2014

Nomor : 414.2/3/HK/437.12/2014

Tanggal, 20 Januari 2014

SKPD yang melaksanakan : Badan Pemberdayaan Masyarakat

Lokasi : 13 kecamatan

Realisasi capaian indikator output/keluaran dan outcome/hasil:

- Output/Keluaran : Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan (Adanya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Sarana Prasarana Perdesaan)
- Outcome/Hasil : Meningkatkan keberdayaan Masyarakat dan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Memfasilitasi Proses Pengelolaan Pembangunan yang Partisipatif dan Demokratis.

Jangka Waktu : 1 (satu) tahun

**2.6. Kegiatan : Pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perkotaan**

Pihak Ketiga yang bekerjasama : Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Dasar Hukum : Naskah Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kabupaten Gresik tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2014.

NOMOR : 180/1311/437.12/2014

NOMOR : 97/NPK/CB/2014

Tanggal, 19 Mei 2014

SKPD yang melaksanakan : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Terlaksananya Program PNPM Mandiri Perkotaan.

- outcome/Hasil : Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, yang meliputi perbaikan infrastruktur, sosial, ekonomi dan tata pemerintahan

Jangka Waktu : 1 (satu) tahun

C. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan

Kebijakan dalam pembinaan batas wilayah adalah mengupayakan pemasangan patok batas wilayah kelurahan/desa, terutama untuk batas terluas wilayah Kabupaten Gresik yang bebatasan langsung dengan daerah lain.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

2.1. Kegiatan : Penegasan Batas Wilayah Kelurahan/Desa

Daerah/Kecamatan/Desa/ : Kabupaten Gresik
Kelurahan yang
berbatasan

Dasar Hukum : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Top Dam V Brawijaya Nomor 050/6658/437.12/2014 dan Nomor B/30/IX/2014 tentang Survey dan Penataan Batas Daerah

SKPD yang melaksanakan : Bagian Administrasi pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

Realisasi capaian indikator output/keluaran dan outcome/hasil:

-Output/Keluaran : Terpasangnya Pilar Batas dan Peta Kelurahan dan Desa (Terpasangnya 160 Pilar Batas Desa di 4 (Empat) Kecamatan yakni 40 (Empat Puluh) Pilar Batas di Kec. Menganti, 40 (Empat Puluh) Pilar Batas di Kec. Cerme, 40 (Empat Puluh) di Kec. Benjeng, dan 40 (Empat Puluh) Kec. Balongpanggang)

-Outcome/Hasil	: Kepastian Batas Desa di 4 Kecamatan
Sumber dan Jumlah Dana	
-APBD Kab. Gresik	: Rp. 692.000.000,00
-APBD/Kota/Prop	: Rp. -
- Jumlah	: Rp. 692.000.000,00

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Bencana yang terjadi di Kabupaten Gresik merupakan bencana dalam skala kecil atau lokal yang meliputi:

a. Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan di Kabupaten Gresik pada tahun 2014 terjadi mulai pertengahan Agustus sampai dengan akhir Oktober 2014. Adapun desa yang ditetapkan dalam status keadaan darurat bencana kekeringan kategori kering kritis di Kabupaten Gresik tahun 2014 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel VI.1
Daftar Desa Yang Ditetapkan Dalam Status
Keadaan Darurat Bencana Kekeringan Katagori Kering Kritis
Di Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2014

No.	KECAMATAN	DESA		DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
1.	BENJENG	1	GLURANPLOSO	4	392	1.799
		2	MUNGGUGIANTI	2	407	1.900
		3	BULUREJO	6	951	3.730
		4	KEDUNGRUKEM	4	622	2.557
		5	DELIKSUMBER	4	482	2.678
		6	KALIPADANG	5	626	3.116
		7	KARANGANKIDUL	3	634	2.832
		8	DERMO	1	298	1.348
		9	KLAMPOK	4	678	2.988
		10	SIRNOBOYO	5	1.229	5.150

No.	KECAMATAN	DESA		DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
		11	METATU	3	1.030	4.594
		12	BANTER	2	531	2.408
		13	JOGODALU	3	930	3.643
		14	JATIREMBE	1	651	2.529
		15	PUNDUTRATE	3	607	2.719
		16	MUNGGUGEBANG	3	587	2.618
2.	CERME	1	DOORO	-	186	956
		2	DAMPAAN	-	270	1.353
		3	PANDU	3	432	1.937
		4	LENGKONG	-	203	990
		5	JONO	2	429	1.661
		6	KANDANGAN	4	967	4.017
		7	DUNGUS	3	570	2.783
		8	GEDANGKULUD	3	1.058	4.895
		9	WEDANI	2	770	3.907
3.	DUDUKSAMPEYAN	1	PETIS BENEM	1	312	1.443
		2	SUMARI	3	948	3.933
		3	TAMBAKREJO	3	1.034	5.582
		4	SETROHADI	2	417	1.796
		5	KRAMAT	1	153	744
4.	KEDAMEAN	1	CERMEN	4	371	1.696
		2	TULUNG	2	523	2.380
		3	LAMPAH	7	923	3.992
		4	TURIREJO	6	980	4.018
5.	BALONGPANGGANG	1	KEDUNGPRING	5	597	2.569
		2	BALONGPANGGANG	5	1.169	5.123
		3	PACUH	3	793	3.565
		4	PUCUNG	4	428	1.902
6.	SIDAYU	1	PENGULU	4	346	2.109
		2	MOJOASEM	-	106	511
		3	RANDUBOTO	4	727	3.605
		4	RACIKULON	-	157	779
		5	SROWO	-	231	1.070
7.	BUNGAH	1	PEGUNDAN	1	254	1.178
		2	GUMENG	1	367	2.240
Jumlah 7 Kec.			45 Desa	126	26.376	119.343

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gresik Tahun 2014

Penanggulangan bencana kekeringan dilakukan dengan tindakan Pembuatan sumur bor di Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang dan Desa Racikulon Kecamatan Sidayu dan pendistribusian air bersih. Selain itu terdapat bantuan dari PT. Petrokimia Gresik, PT. Bank Jatim, PT. Smelting, dan PT. PGN Saka berupa tandon air dan distribusi air bersih ke desa-desa terdampak kekeringan.

b. Bencana Banjir dan tanah longsor

Bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Gresik dengan status bencana lokal kabupaten terjadi pada tanggal 11 s.d. 20 Desember 2014, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.2
Kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Gresik
Tahun 2014

No	TANGGAL	KECAMATAN/ DESA	RUMAH	SAWAH Ha	JALAN DESA (M)	JALAN KAB (M)	TANGGUL JEBOL (M)	JEM BATAN	KET.
1	11-12- 2014	TAMBAK							Banjir dan longsor di Pulau Bawean
		1. Telukjati Dawang	-	-	-	100	-	-	
2	11-12- 2014	SANGKAPURA							
		1. Kotakusuma	429	-	200	500	-	-	
		2. Sawahmulya	81	-	-	-	30	1	
		3. Gunungteguh	6	-	45	-		1	
		4. Daun	53	-	14	-	14	1	
		5. Balikterus	1	-	-	-	-	1	
		6. Kebunteluk dalem	5	-	-	-	-	1	
		7. Lebak	2	-	-	-	-	-	

No	TANGGAL	KECAMATAN/ DESA	RUMAH	SAWAH Ha	JALAN DESA (M)	JALAN KAB (M)	TANGGUL JEBOL (M)	JEM BATAN	KET.
3	19-12- 2014	BALONGPANGGANG							LUAPAN KALI LAMONG
		1. Banjaragung	70	11	-	500	-	-	
		2. Wotansari	168	25	600	1100	-	-	
		3. Sekarputih	65	25	-	600	-	-	
		4. Kedungpring	150	10	1000	600	-	-	
		5. Pucung	200	30	900	1000	-	-	
		6. Karang semanding	110	25	450	850	-	-	
		7. Balong panggang	200	15	1500	1000	-	-	
4	19-12- 2014	BENJENG							LUAPAN KALI LAMONG
		1. Lundo	103	82	1200	-	-	-	
		2. Balongmojo	-	20	-	-	-	-	
		3. Bulangkuon	52	75	1000	-	-	-	
		4. Munggugianti	314	96	2000	1000	-	-	
		5. Kedungrukem	492	92	5000	1000	-	-	
		6. Deliksumber	325	153	5200	-	-	-	
		7. Sedapurklagen	286	79	5000	-	-	-	
		8. Gluranploso	-	65	1000	-	-	-	
		9. Bengkelolor	-	48	1000	-	-	-	
		10. Bulurejo	483	87	2000	3000	-	-	
		11. Dermo	153	36	1000	-	-	-	
		12. Klampok	310	110	-	1000	-	-	
		13. Kedungsekar	-	20	-	-	-	-	

No	TANGGAL	KECAMATAN/ DESA	RUMAH	SAWAH Ha	JALAN DESA (M)	JALAN KAB (M)	TANGGUL JEBOL (M)	JEM BATAN	KET.
		14. Sirnobooyo	512	122	3500	-	-	-	
		15. Kalipadang	75	54	1000	-	-	-	
		16. Karangan kidul	55	98	2700	-	-	-	
		17. Munggu gebang	257	213	3000	-	-	-	
		18. Banter	102	35	1000	-	-	-	
5	20-12- 2014	MENGANTI							LUAPAN KALI LAMONG
		1. Boboh	285	-	-	-	-	-	
6	20-12- 2014	CERME							
		1. Dadapkuning	-	20	-	-	-	-	
		2. Ngembung	-	20	-	-	-	-	
		3. Sukoanyar	100	188	-	-	-	-	
		4. Dampaan	-	65	-	-	-	-	
		5. Dooro	-	45	-	-	-	-	
		6. Guranganyar	50	50	-	-	-	-	
		7. Morowudi	800	45	-	2000	-	-	
		8. Iker-iker Geger	459	-	-	-	-	-	
		9. Dungus	350	150	-	-	-	-	
		10. Lengkong	-	65	-	-	-	-	
		11. Pandu	-	10	-	-	-	-	
		12. Cerme Kidul	50	10	-	-	-	-	

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gresik Tahun 2014

Penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Gresik antara lain:

- Pendirian posko bencana;
- Pemberian sembako kepada warga yang terdampak banjir dan tanah longsor;
- Pendirian dapur umum di Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Cerme;
- Pembangunan tanggul sementara; dan

- Pemasangan tenda pengungsi di Desa Morowudi dan Desa Munggugianti. Disamping itu terdapat bantuan dari pihak ketiga yaitu dari PT. Petrokimia Gresik, BRI Cabang Gresik, PT. PGN Saka berupa tandon air dan distribusi air bersih.

2. Status Bencana

Status bencana yang terjadi di Kabupaten Gresik dalam kurun waktu tahun 2014 masih merupakan bencana lokal.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran untuk penanggulangan bencana terdiri dari:

- APBN sebesar Rp702.500.000,00 digunakan untuk penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor sebesar Rp302.500.000,00, dan pembuatan sumur bor sebesar Rp400.000.000,00;
- APBD Provinsi Jatim sebesar Rp204.336.000,00 digunakan untuk pendistribusian air bersih ke 45 Desa terdampak kekeringan; dan
- APBD Kabupaten Gresik sebesar Rp3.612.412.000,00 digunakan untuk penanggulangan bencana.

4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di Kabupaten Gresik dilakukan antara lain:

- 1) Mengupayakan pembuatan tanggul untuk mengantisipasi luapan air Bengawan Solo dan Kali Lamong;
- 2) Mengusulkan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan normalisasi sungai agar aliran air menuju muara menjadi lancar;
- 3) Mengusulkan pembuatan sumur bor dan normalisasi telaga/embung pada tiap-tiap daerah yang mengalami kekeringan;
- 4) Menyediakan bantuan tandon dan air bersih;

5) Menyediakan stok bantuan sembako.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bencana

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik berkerjasama dengan:

- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas Sosial
- Dinas Kesehatan
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Kecamatan dan Desa
- TNI-POLRI
- Ormas/LSM/RAPI
- dan lain-lain

E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi

Gangguan yang terjadi adalah gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti Gepeng, PKL dan bangunan liar, pelanggaran IMB, penambangan Galian Gol C tidak berizin, pemasangan Reklame Ilegal, dan lain-lain.

2. SKPD yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Adapun dasar hukum penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah:

- Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Gresik;

- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

NO	URAIAN	PENDIDIKAN							JML
		SD	SMP	SMA	D1	D2	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru Muda Tingkat I (Ib)	-		2	-	-	-	-	2
	Juru (Ic)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru Tingkat I (Id)	-	1	4	-	-	-	-	5
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	3	-		-	-	3
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	102	1	2	14	-	119
	Pengatur (IIc)	-	-	2	-	-	5	-	7
	Pengatur Tingkat I (IId)	-	-	-	-	-	-	-	0
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	3	-	-	3	-	6
	Penata (IIIC)	-	-	-	-	-	-	2	2
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	-	-	-	1	2	3
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH	0	1	116	1	2	23	5	148

Sumber Data: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014

Jumlah Pegawai Fungsional SKPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Jabatan Fungsional

No.	Nama Jabatan Fungsional	PENDIDIKAN								JML
		SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1.	PPNS	-	-	-	-	-	3	3	-	6
	JUMLAH	0	0	0	0	0	3	3	-	6

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran untuk penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum berasal dari dana APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.179.270.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

5. Penanggulangan

Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan melalui kegiatan operasi penertiban secara rutin maupun berkala, antara lain:

- Penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- Operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah (Perda);
- Operasi penertiban larangan peredaran minuman keras (miras);
- Operasi penertiban pelanggaran pelacuran dan perbuatan cabul.

Selanjutnya dilaksanakan pembinaan terhadap pelanggar bekerjasama dengan instansi terkait.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Keikutsertaan aparat keamanan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Gresik yaitu bantuan dari aparat kepolisian melalui operasi-operasi gabungan maupun dengan melibatkan personil dari TNI.

BAB VII

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014 ini, pada dasarnya merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 sebagai Penjabaran Tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Bhakti 2010-2015.

Penyampaian LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan atas ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2014 merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun demikian, Saya menyadari bahwa masih ada hal-hal yang belum memenuhi harapan dan memuaskan semua pihak.

Selanjutnya, sebagai implementasi hubungan kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD maka diharapkan adanya saran konstruktif berupa rekomendasi dari DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Gresik pada masa mendatang. Dengan demikian, hubungan timbal balik yang seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjalin dengan lebih baik.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014 ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan hidayah dan meridhloi usaha kita bersama untuk mewujudkan **"Gresik bisa lebih baik"**.

Gresik, Maret 2015

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

